



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
TAHUN 2022



PENGUJIAN | KALIBRASI | SERTIFIKASI | PENDAMPINGAN INDUSTRI | KONSULTANSI
<https://bspjibanjarbaru.kemenperin.go.id>

Kementerian Perindustrian
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

Januari
2023

KATA PENGANTAR

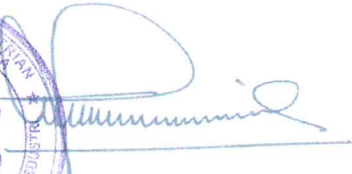
Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.

Laporan ini sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus berfungsi sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dan masyarakat) dan sebagai sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar laporan ini memuat informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2022. Capaian kinerja ini merupakan realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2022 yang akan kami manfaatkan untuk bahan evaluasi dan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya dalam upaya pemenuhan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.

Sadar sepenuhnya bahwa penguasaan metode laporan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan dari semua pihak. Semoga LAKIP Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2022 ini bermanfaat bagi stakeholders dan juga bagi kami dalam upaya peningkatan kinerja.

Banjarbaru, 10 Februari 2023
KEPALA BSPJI BANJARBARU,



ARHAMSYAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai gambaran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2024 BSPJI Banjarbaru. Tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat berpengaruh kepada capaian RENSTRA BSPJI Banjarbaru. Hal ini menjadi dasar BSPJI Banjarbaru merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program-program pokok, serta indikator dan rencana kinerja organisasi.

Program-program yang telah ditetapkan tersebut, semua telah berjalan sesuai target, walau beberapa diantaranya masih perlu perbaikan dan peningkatan lagi. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh SDM Balai, dukungan stakeholders, dan kepercayaan klien yang tetap bisa dijaga. Walau demikian, selain harus dipertahankan, keberhasilan juga harus terus ditingkatkan.

Pada tahun 2022, Anggaran untuk menunjang kegiatan Baristand Industri Banjarbaru tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan DIPA Nomor 019-07.2.247232/2022 tanggal 17 November 2021, sebesar **Rp13.784.031.000,-**. Namun setelah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan nilai pagu anggaran naik, maka pagu anggaran terakhir adalah pada Revisi DIPA ke-9 sesuai DIPA No. : DIPA-019.07.247232/2022R tanggal 22 November 2022 dimana terdapat penambahan pagu menjadi **Rp15.382.687.000,-** (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan **realisasi Rp15.300.838.329,- atau setara 99,47 persen**. Pagu anggaran tersebut terdiri dari **Rupiah Murni (RM)** sebesar **Rp11.675.954.000,-** (realisasi Rp11.601.819.151,- atau setara 99,37 persen) dan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** sebesar **Rp3.706.733.000,-** (realisasi Rp3.699.019.178,- atau setara 99,47 persen).

Adapun target penerimaan PNBP dari Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yaitu Akun 425283 (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian) dan Akun 425421 (Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan) mengalami perubahan dari target PNBP sesuai DIPA Awal TA 2022 yaitu sebesar Rp3.110.000.000,-. Sementara itu, dikarenakan adanya penggunaan kelebihan perolehan PNBP maka target akhir menjadi sebesar **Rp3.900.000.000,-** dengan realisasi penerimaan sesuai akun target sebesar **Rp4.700.997.750,-** atau setara 151,16 persen jika dibandingkan dengan target awal dan 120,54 persen jika dibandingkan dengan target akhir. Namun secara keseluruhan sesuai dengan OMSPAN, maka realisasi penerimaan **PNBP TA 2022** adalah sebesar **Rp4.905.799.388,-**. Perolehan PNBP TA 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan

PNBP TA 2021. Meningkatnya realisasi baik penerimaan maupun penggunaan anggaran ini utamanya disebabkan oleh kondisi pandemic covid-19 juga sudah berangsur lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, salah satu kebijakan terkait pengujian lingkungan yang telah ditetapkan oleh KAN yang dibarengi dengan penyesuaian tarif jasa juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan.

Realisasi keuangan TA 2022 sebesar 99,47% tidak mencapai target 100%, namun masih memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Nomor 3427/BSKJI.1/PR/XII/2022 dari Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yaitu mampu mencapai realisasi diatas 96,62%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
I.2. Peran Strategis Organisasi	1
I.3 Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Organisasi	7
2.2 Rencana Kinerja	8
2.3 Rencana Anggaran	8
2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Analisis Capaian Kinerja	14
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2021..15	
a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.....	18
b. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	22
c. Sasaran Kegiatan III : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	28
d. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.....	43
e. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.....	46
f. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional.....	50
g. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik.....	59
h. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	61
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2021-2024).....	67
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	70

BAB IV	PENUTUP	88
--------	---------------	----

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA. 2022

Pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2022

Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2022

Realisasi Renstra Satker/ Unit Kerja (2021-2024)

Data Dukung Capaian Perjanjian Kinerja TA. 2022

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tertentu.....	5
TABEL 1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
TABEL 1.3	Rekapitulasi Formasi Pengadaan CPNS 2021 Baristand Industri Banjarbaru	6
TABEL 2.1	Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BI Banjarbaru 2021-2024	7
TABEL 2.2	Rencana Anggaran BSPJI Banjarbaru Tahun 2022.....	9
TABEL 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BI Banjarbaru	11
TABEL 2.4	Rencana Aksi Tahun Anggaran 2022	12
TABEL 3.1	Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru.....	14
TABEL 3.2	Matriks Alur IKU Kementerian Perindustrian Sampai Perjanjian Kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2022.....	15
TABEL 3.3	Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA 2022	16
TABEL 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja I.1.....	20
TABEL 3.5	Perbandingan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2020-2022.....	20
TABEL 3.6	Perbandingan capaian indikator kinerja I.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024.....	21
TABEL 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja II.1	26
TABEL 3.8	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dari TA 2018-2022.	26
TABEL 3.9	Perbandingan capaian indikator kinerja II.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024.....	27
TABEL 3.10	Hasil Performansi Industri dari Kegiatan DAPATI TA 2022	29
TABEL 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.1.....	31
TABEL 3.12	Peningkatan Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dari TA 2021-2022	31
TABEL 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	32
TABEL 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.2	33
TABEL 3.15	Data Capaian Meningkatnya Utilisasi Layanan Jasa Industri di Dalam negeri dari TA 2017-2021.....	34
TABEL 3.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	34
TABEL 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.3	39
TABEL 3.18	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri dari TA 2021-2022.	40

TABEL 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.3 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	40
TABEL 3.20 Perhitungan Capaian Persentase Penggunaan PDN BSPJI Banjarbaru TA 2022	42
TABEL 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.4	42
TABEL 3.22 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dari TA 2021-2022.....	42
TABEL 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.4 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	43
TABEL 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja IV.1	44
TABEL 3.25 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dari TA 2021-2022.....	45
TABEL 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	45
TABEL 3.27 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Pelayanan TA 2022 Untuk Semua Layanan Jasa	47
TABEL 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja V.1.....	47
TABEL 3.29 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Tahun 2018-2022	48
TABEL 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	48
TABEL 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VI.1	52
TABEL 3.32 Perbandingan Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022	53
TABEL 3.33 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	53
TABEL 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VI.2	56
TABEL 3.35 Perbandingan Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2022	57
TABEL 3.36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	57
TABEL 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VII.1.....	59
TABEL 3.38 Ringkasan Hasil <i>Self Assessment</i> Indeks Layanan Publik	59
TABEL 3.39 Perbandingan Capaian Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Pegawai Tahun 2021-2022	60
TABEL 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	60
TABEL 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.1	62
TABEL 3.42 Perbandingan Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018-2022.....	63

TABEL 3.43 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	63
TABEL 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.2	65
TABEL 3.45 Perbandingan Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2019-2022	65
TABEL 3.46 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024	66
TABEL 3.47 Capaian Kinerja Renstra Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	67
TABEL 3.48 Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru TA 2021-2024.....	74
TABEL 3.49 Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2022	75
TABEL 3.50 Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan TA 2022	76
TABEL 3.51 Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2022	77
TABEL 3.52 Efisiensi Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	78
TABEL 3.53 Nilai Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJA	79
TABEL 3.54 Pencapaian Target Kinerja Satker TA 2022	79
TABEL 3.55 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2018-2022	80
TABEL 3.56 Pagu Dan Realisasi Keuangan PNBp Tahun 2022.....	81
TABEL 3.57 Realisasi PNBp Layanan Jasa Tahun 2018-2022	82
TABEL 3.58 Tabel Penerimaan PNBp Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2018-2022	83
TABEL 3.59 Jumlah Pelanggan Tahun 2018-2022	83
TABEL 3.60 Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Konsultasi Tahun 2018-2022	84
TABEL 3.61 Data Bimbingan Teknis (Pendampingan Industri) SDM Industri TA 2022	85
TABEL 3.62 Data Kegiatan Layanan Sertifikasi TA 2022	86

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Naskah Kerjasama BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar	19
GAMBAR 3.2	Penandatanganan Kerjasama antara BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar	19
GAMBAR 3.3	Foto Alat Pengering Menggunakan Kontrol Suhu.....	20
GAMBAR 3.4	Nota Kesepahaman BSPJI Banjarbaru dan IKM BYHAF.....	23
GAMBAR 3.5	Alat Hasil Optimalisasi Penerapan Teknologi Produk Jahe	24
GAMBAR 3.6	Kunjungan Tim ke IKM BYHAF.....	24
GAMBAR 3.7	Nota Kesepahaman BSPJI Banjarbaru dengan IKM RABITA	25
GAMBAR 3.8	Inovasi Alat <i>Hot Press</i>	25
GAMBAR 3.9	Kunjungan Tim BSPJI Banjarbaru ke IKM Rabita.....	26
GAMBAR 3.10	Surat Keputusan Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BSPJI Banjarbaru.....	44
GAMBAR 3.11	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BSPJI Banjarbaru dan BSKJI TA 2022.	52
GAMBAR 3.12	Pemberian <i>Reward</i> kepada Pegawai yang terpilih	54
GAMBAR 3.13	Rata-rata Nilai Disiplin Pegawai BSPJI Banjarbaru TA 2022	56
GAMBAR 3.14	<i>Reminder</i> Absensi Pegawai dari Tim Agen Perubahan dan Bagian Kpegawaian	57
GAMBAR 3.15	Bukti Pembinaan kepada Pegawai terkait Disiplin Pegawai.....	58
GAMBAR 3.16	Penghargaan Nilai SAKIP TA 2021 BSPJI Banjarbaru	62
GAMBAR 3.17	Nilai Laporan Keuangan Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.*

Sedangkan fungsi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diatas adalah:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

1. VISI

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya dinamika masyarakat yang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan, dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sektor industri. Perubahan-perubahan ini memerlukan sikap arif dalam menghadapinya, sehingga

memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri khususnya di Kalimantan Selatan sebagai daerah dimana BSPJI Banjarbaru berdomisili. Untuk itu diperlukan kajian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang berpengaruh bagi organisasi baik pengaruh internal maupun eksternal.

Dalam menghadapi dinamika perubahan ini BSPJI Banjarbaru harus mampu menciptakan nilai atau produk yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensi BSPJI Banjarbaru tidak memiliki arti lagi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

BSPJI Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada Kepala BSKJI, maka wajib mendukung tercapainya Visi BSKJI yaitu menjadi **Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing**".

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSPJI Banjarbaru memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSPJI Banjarbaru yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSPJI Banjarbaru harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSPJI Banjarbaru dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

Selain itu, Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

1. MISI

Dengan memperhatikan misi BSKJI, sehingga BSPJI Banjarbaru sebagai UPT dibawah BSKJI mendukung tercapainya misi BSKJI sebagai berikut:

Misi BSPJI Banjarbaru:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau.”

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.

- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSPJI Banjarbaru tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Banjarbaru.

2. TUJUAN

Sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah “**Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional**”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Pertumbuhan industri pengolahan non migas
- Peningkatan kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB
- Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri
- Peningkatan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas

Berdasarkan Permenperin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut :

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan layanan publik penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

BSPJI Banjarbaru sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala BSKJI mempunyai peran pada:

1. Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standardisasi industri
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri
5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Industri Hijau
6. Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan

C. STRUKTUR ORGANISASI



Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Tabel 1.1 REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PERIODE: Desember 2022 (Jabatan PNS dan CPNS)

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Industri	Pembina Industri Ahli Muda	4
2.	Pembina Industri	Pembina Industri Ahli Pertama	5
3.	Pedal	Pedal Ahli Muda	4
4.	PMB	PMB Ahli Pertama	11
5.	PMB	PMB Terampil	3
6.	PMB	PMB Terampil (CPNS)	5
7.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Madya	2
8.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Muda	1
9.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Pertama (CPNS)	2
10.	AMMI	AMMI Ahli Muda	1
11.	AMMI	AMMI Ahli Pertama	2
12.	AMMI	AMMI Ahli Pertama (CPNS)	1
13.	Arsiparis	Arsiparis Ahli Pertama	1
14.	Arsiparis	Arsiparis Penyelia	1
15.	PK APBN	PK APBN Penyelia	2
16.	PK APBN	PK APBN Terampil (CPNS)	2
17.	Penata Laksana Barang	Penata Laksana Barang Terampil	1
18.	APK APBN	APK APBN Ahli Muda	1

Tabel 1.2 REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PERIODE: Desember 2022 (PNS)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S3	2
2.	S2	6
3.	S1	40
4.	D3	17
5.	D1	1
6.	SLTA	4

Berdasarkan data diatas maka jumlah total pegawai PNS di BSPJI Banjarbaru adalah sebanyak 70 dengan rincian 49 pegawai dengan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), 19 pegawai yang masih JFU (Jabatan Fungsional Umum), 2 Pejabat Struktural (Kepala Balai dan Kasubbag TU). Jika dibandingkan dengan Jumlah JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) pada TA 2021 sebanyak 43 Pegawai, maka pada TA 2022 ini mengalami peningkatan sebanyak 6 Pegawai. Pada TA 2022 ini, BSPJI Banjarbaru mendapatkan tambahan pegawai yaitu 15 (Lima belas) CPNS baru yang terdiri dari 13 pegawai pengadaan CPNS 2021 dan 3 pegawai dari lulusan STAN.

Tabel 1.3 REKAPITULASI FORMASI PENGADAAN CPNS 2021 BSPJI BANJARBARU

NO	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1.	Analisis Pengembangan Kompetensi	S1	1
2.	Analisis Kerjasama Industri	S1	2
3.	Analisis Standardisasi Industri	S1	1
4.	Terampil – Penguji Mutu Barang	D3	5
5.	Ahli Pertama Perakayasa	S1	2
6.	Ahli Pertama – Asesor Manajemen Mutu Industri	S1	1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSPJI Banjarbaru yang merupakan tujuan dari BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Banjarbaru adalah indikator kinerja Sasaran Kegiatan pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan *customer*. BSPJI Banjarbaru akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab II sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama Baristand Industri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Utama BSPJI Banjarbaru 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama		Target			
			2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
SS1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas						
1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1
Customer Perspective						
SS2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	2	3
SS3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri						
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	40	40	45	45
2.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	1	1	1
3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industry di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	38	N/A	21
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44	45	46	47

2.2 RENCANA KINERJA

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dan selaras dengan unit organisasi K/L setingkat di atasnya.

2.3 RENCANA ANGGARAN

Anggaran untuk menunjang kegiatan BSPJI Banjarbaru tahun 2022 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset dan Standardisasi Industri Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan DIPA Nomor 019-07.2.247232/2022 tanggal 17 November 2021, sebesar **Rp13.784.031.000,-**. Namun setelah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan nilai pagu anggaran naik, maka pagu anggaran terakhir adalah pada Revisi DIPA ke-9 sesuai DIPA No. : DIPA-019.07.247232/2022R tanggal 22 November 2022 dimana terdapat penambahan pagu menjadi **Rp15.382.687.000,-** (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Kenaikan pagu anggaran tersebut disebabkan karena adanya penambahan belanja pegawai dan penggunaan kelebihan perolehan PNBP. Pagu anggaran untuk membiayai Kegiatan BSPJI Banjarbaru terdiri dari **Rupiah Murni (RM)** sebesar **Rp11.675.954.000,-** dan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** sebesar **Rp3.706.733.000,-**. Rincian anggaran dan output untuk tahun 2022 berdasarkan data dari **revisi DIPA terakhir** pada bulan Desember 2022 seperti yang tertera pada table sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran BSPJI Banjarbaru Tahun 2022

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen			Pagu Anggaran
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		2,286,141,000
EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		2,286,141,000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		265,240,000
AEF.002	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri		265,240,000
051	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis		265,240,000
051.0A	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri		135,811,000
051.0B	Lembaga Teknologi Industri		129,429,000
BAD	Pelayanan Publik kepada industri		1,752,901,000
BAD.012	Jasa pelayanan teknis pengujian Baristand Industri		1,604,771,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		1,552,899,000
051.0A	Layanan Pengujian		1,552,899,000
056	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001 - pnbp		51,872,000
056.0A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian		51,872,000
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Baristand Industri		61,960,000
052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi		61,960,000
052.0A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi		61,960,000
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Baristand Industri		70,960,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		30,400,000
051.0A	Layanan Sertifikasi		30,400,000
052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk		40,560,000
052.0A	Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		40,560,000
BAD.058	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Baristand Industri		15,210,000
051	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis		15,210,000
051.0A	Layanan Pelatihan Teknis		15,210,000
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		268,000,000
CAH.002	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Baristand Industri		268,000,000
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		268,000,000
051.0A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium		268,000,000

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen			Pagu Anggaran
WA	Program Dukungan Manajemen		13,096,546,000
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri		13,096,546,000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,973,398,000
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	93,760,000
	051	Pengelolaan Data dan Informasi	60,200,000
	051.0A	Pengembangan Sistem Informasi	60,200,000
	054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	33,560,000
	054.0A	Penerbitan Majalah/Jurnal	33,560,000
	EBA.994	Layanan Perkantoran	11,879,638,000
	001	Gaji dan Tunjangan	8,583,000,000
	001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8,583,000,000
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,296,638,000
	002.0A	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	112,200,000
	002.0B	Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter)	56,560,000
	002.0C	Perbaikan Peralatan Kantor	331,296,000
	002.0D	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	84,110,000
	002.0E	Perawatan Sarana Gedung	492,392,000
	002.0F	Langganan Daya dan Jasa	289,380,000
	002.0G	Jasa Administrasi/Layanan	301,500,000
	002.0H	Keselamatan Kerja	27,350,000
	002.0I	Jasa Pos dan Informasi	95,488,000
	002.0J	Kegiatan untuk Penanganan COVID-19	34,908,000
	002.0K	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	962,394,000
	002.0L	Jasa Keamanan	284,124,000
	002.0M	Jasa Kebersihan	224,936,000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	607,000,000
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	482,000,000
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	295,675,000
	052.0A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	295,675,000
	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	186,325,000
	053.0A	Pengadaan Alat Perkantoran	186,325,000
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	125,000,000
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	125,000,000
	051.0A	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	125,000,000
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	220,182,000
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	29,710,000
	051	Pengelolaan/Manajemen SDM	29,710,000
	051.0A	Pengelolaan SDM	29,710,000
	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	190,472,000
	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	190,472,000
	051.0A	Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	119,192,000
	051.0B	Diklat Motivasi Pegawai	71,280,000
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	295,966,000
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,174,000
	051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	7,174,000
	051.0A	Penyusunan Program Baristand Industri Banjarbaru	7,174,000
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56,550,000
	051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	56,550,000
	051.0A	Evaluasi Program/Kegiatan BRSBB	56,550,000
	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	124,946,000
	051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	124,946,000
	051.0A	Pembangunan Zona Integritas	61,166,000
	051.0B	SPIP	21,450,000
	051.0C	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	42,330,000
	EBD.965	Layanan Audit Internal	97,296,000
	051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan	97,296,000
	051.0A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	34,900,000
	051.0B	Pengelolaan Limbah	62,396,000
	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	10,000,000
	051	Penyelenggaraan Kearsipan	10,000,000
	051.0A	Penyelenggaraan Kearsipan	10,000,000

2.3 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022					
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU					
No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40	Persen
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1.0	Persen
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38	Ruang Lingkup
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45.0	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92.0	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72	Indeks
		2	Nilai disiplin pegawai	80	Nilai
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	Nilai
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Total Anggaran Tahun 2022 : Rp. 13.784.031.000,00

(Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Tabel 2.4

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022											
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU											
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara (%)	Rencana kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	15	- Survei lapangan ke industri - Penyusunan rencana kerja sama - Penyusunan draft SPK	40	- Penandatanganan SPK - Uji coba penerapan hasil pengembangan - Evaluasi produksi dengan alat hasil pengembangan	75	- Lanjutan uji coba penerapan hasil pengembangan - Evaluasi produksi dengan alat hasil pengembangan - Perbaikan-perbaikan yang diperlukan	100	- Evaluasi pemanfaatan hasil pengembangan - Penyusunan laporan
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	15	- Survei lapangan ke industri - Penyusunan rencana kerja sama - Penyusunan draft SPK	40	- Uji coba alat - Evaluasi kinerja alat - Penandatanganan SPK	75	- Perbaikan alat - Unjuk kerja alat - Proses produksi dengan alat - Evaluasi kinerja alat	100	- Evaluasi kinerja alat - Penyusunan laporan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40 Persen	15	- Survei industri - Penyusunan proposal - Seleksi proposal	40	- Identifikasi permasalahan industri - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama - Desain perbaikan dan pembuatan alat	75	- Pembuatan inception report - Desain layout dan penyusunan prosedur kerja - Instalasi alat dan uji coba	100	- Monitoring dan evaluasi kinerja alat - Penyusunan Laporan Akhir
		2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1 Persen	25	- Tindak lanjut kerjasama dengan pengguna layanan jasa, - perencanaan kegiatan promosi layanan jasa teknis untuk penambahan pengguna layana jasa	50	- Pemantauan data pengguna layanan jasa, - kegiatan promosi layanan jasa teknis	75	- Pemantauan data pengguna layanan jasa, - kegiatan promosi layanan jasa teknis	100	- Pemantauan data pengguna layanan jasa, - kegiatan promosi layanan jasa teknis, - evaluasi kegiatan promosi dan kerjasama pengguna layanan jasa
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	30	- Persiapan data dukung dan pengiriman data ke BSKJI untuk pengajuan Pendirian LPH BSPJI Banjarbaru - Persiapan data dukung untuk Surveil dan penambahan ruang lingkup Lab Kalibrasi	50	- Pemantauan dan koordinasi setelah pengiriman data dukung untuk pendirian LPH - Pelaksanaan Surveil I dan penambahan ruang lingkup Lab Kalibrasi serta pengiriman data tindak lanjut hasil surveilan ke KAN - Persiapan survailen SNI ISO 37001:2016	75	- Pemantauan dan koordinasi setelah pengiriman data dukung untuk pendirian LPH - Pemantauan setelah hasil tindak lanjut surveilan dikirimkan ke KAN - Persiapan data dukung untuk Surveil I LSPPro - Surveil SNI ISO 37001:2016 - Persiapan Surveil SNI ISO 9001:2015	100	- kegiatan promosi layanan jasa teknis,
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	30	- Perencanaan pengadaan TA 2022 - Pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP - Pemantauan pengisian e-monitoring - Pengisian di aplikasi timnas P3DN	50	- Pemantauan pengisian e-monitoring - Pengisian di aplikasi timnas P3DN	75	- Pemantauan pengisian e-monitoring - Pengisian di aplikasi timnas P3DN	100	- evaluasi kegiatan promosi dan kerjasama pengguna layanan jasa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara (%)	Rencana kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	25	- pemeriksaan kelengkapan dokumen dokumen internal yang akan di periksa	50	- Pemenuhan kelengkapan dokumen dokumen - Pelaksanaan pengawasan internal	90	Pelaksanaan tindak lanjut dari pengawasan	100	Penyusunan laporan hasil pengawasan
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	25	- Pelaksanaan penyebaran, pengumpulan, dan identifikasi kuesioner kepuasan pelanggan dan persepsi anti korupsi	50	- Pelaksanaan penyebaran, pengumpulan, dan identifikasi kuesioner kepuasan pelanggan dan persepsi anti korupsi - Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan - Pelaksanaan acara temu pelanggan - Monev selama TW II	75	- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dan persepsi korupsi - Merekap keluhan pelanggan menindaklanjutinya - Pelaksanaan road show promosi layanan jasa dan konsultasi - Monev selama TW III	100	- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dan persepsi korupsi - Merekap keluhan pelanggan menindaklanjutinya - Monev selama TW IV - Penyusunan Laporan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	25	- Perjakin dan SKP Pegawai; - Penyusunan Matriks Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022 Bulanan; - Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan Tahun 2022 Bulanan; - Update data Sipegi Pegawai pada Intranet Kemenperin dan Intranet BRSBB; - Input dan Update data Pelatihan pada SAPK.	50	- Penyusunan Matriks Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022 Bulanan; - Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan Tahun 2022 Bulanan; - Perjakin dan SKP Pegawai; - Update data Sipegi Pegawai pada Intranet Kemenperin dan Intranet BRSBB; - Input dan Update data Pelatihan pada SAPK.	75	- Penyusunan Matriks Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022 Bulanan; - Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan Tahun 2022 Bulanan; - Perjakin dan SKP Pegawai; - Update data Sipegi Pegawai pada Intranet Kemenperin dan Intranet BRSBB; - Input dan Update data Pelatihan pada SAPK.	100	- Penyusunan Matriks Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2022 Bulanan; - Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan Tahun 2022 Bulanan; - Perjakin dan SKP Pegawai; - Update data Sipegi Pegawai pada Intranet Kemenperin dan Intranet BRSBB; - Input dan Update data Pelatihan pada SAPK.
		2 Nilai disiplin pegawai	80	25	- Penyusunan Pakta Integritas Pegawai Tahun 2022; - Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai - Monitoring Absensi dan Produktivitas Pegawai Bulanan Tahun 2022.	50	- Monitoring Absensi dan Produktivitas Pegawai Bulanan Tahun 2022. - Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	75	- Monitoring Absensi dan Produktivitas Pegawai Bulanan Tahun 2022. - Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	100	- Monitoring Absensi dan Produktivitas Pegawai Bulanan Tahun 2022. - Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai.
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	25	- Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik - Penataan internal balai untuk peningkatan pelayanan publik - Sosialisasi Layanan Jasa	50	- Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik - Penataan internal balai untuk peningkatan pelayanan publik - Sosialisasi Layanan Jasa	75	- Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik - Penataan internal balai untuk peningkatan pelayanan publik - Sosialisasi Layanan Jasa	100	- Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik - Penataan internal balai untuk peningkatan pelayanan publik - Sosialisasi Layanan Jasa
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	25	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - Penyusunan Penetapan Kinerja - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Tim Kegiatan - Penyusunan Laporan Kinerja TA 2021 dan PP39 TW IV 2021	50	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - Penyusunan Laporan PP39 TW II 2022 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2022 - Penilaian SAKIP oleh Itjen	75	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - Penyusunan Laporan PP39 TW II 2022 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2022 - Audit Kinerja oleh Itjen	100	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - Penyusunan Laporan PP39 TW III 2022 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2022
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	25	- Pelaksanaan dan Evaluasi Realisasi Anggaran - Penyusunan Laporan Keuangan - Pelaksanaan PIPK - Permintaan Dokumen oleh BPK	50	- Pelaksanaan dan Evakuasi Realisasi Anggaran - Pelaksanaan e-rekonsiliasi	75	- Pelaksanaan dan Evakuasi Realisasi Anggaran - Pelaksanaan e-rekonsiliasi - Permintaan Dokumen oleh BPK - Persiapan dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 TA 2022	100	- Pelaksanaan dan Evakuasi Realisasi Anggaran - Pelaksanaan e-rekonsiliasi - Persiapan dan Penyusunan Laporan Triwulan III TA 2022 - Persiapan Pelaksanaan PIPK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja serta tindakan organisasi pada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas dasar pengertian tersebut BSPJI Banjarbaru sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap berakhirnya tahun anggaran secara tertulis.

Pada Bab III ini akan dijelaskan target dan realisasi dari Penetapan Kinerja TA. 2022 (Perjanjian Kinerja TA. 2022), Capaian Renstra 2021-2024, dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan Sasaran Kegiatan organisasi.

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden, BSPJI Banjarbaru melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI tahun 2021-2024 dan Renstra BSPJI Banjarbaru Tahun 2021-2024 yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BSPJI Banjarbaru. Pada Tahun Anggaran 2022 Perkin BSPJI Banjarbaru meliputi 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan untuk melaksanakan kinerjanya dengan Pemetaan Sasara Kegiatan sesuai Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru	Tujuan BSPJI Banjarbaru
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SK7: Penguatan Layanan Publik	T3
SS9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi, maka dirumuskan 4 (Empat) Tujuan BSPJI Banjarbaru. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan pemetaan arah gerak Balai melalui langkah-langkah strategis Balai yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja ini menjadi salah satu metode dalam pengukuran kinerja.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2022

Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

MATRIKS KETERKAITAN IKU KEMENPERIN SAMPAI DENGAN UNIT KERJA BSKJI							
KEMENPERIN			BSKJI			BSPJI BANJARBARU	
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
							Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
							Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
					Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
							Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
NON IKU			NON IKU				
SS7	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif	Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian	Efektifitas regulasi standardisasi industri		
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
		Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
					Nilai disiplin pegawai		Nilai disiplin pegawai
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Implementasi kerja sama	SK7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi
							Nilai minimal laporan keuangan
							Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, **setiap bulan** dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian tersebut melalui e-monitoring dan ALKI. Selain itu, setiap triwulan dilakukan penyampaian monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39). Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud adalah :

Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi TA 2022

UNIT ORGANISASI : BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU							
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV	
						% Fisik	
						S	R
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100%	100	100
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	100	100
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40 Persen	70,9 Persen	283,6 %	100	100
		2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1 Persen	9,91 Persen	991%	100	100
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	38 Ruang Lingkup	100%	100	100
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	92,21 Persen	204,91 %	100	100
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	100 persen	108,7 %	100	100
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,62 Indeks	103,4 %	100	100
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	83,73 Indeks	116,29 %	100	100
		2 Nilai disiplin pegawai	80	96,34	120,43 %	100	100
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100%	100	100
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83,15	102,7 %	100	100
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	94,40	104,9 %	100	100

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada umumnya, **seluruh indikator kinerja** telah mencapai target yang ditetapkan per Triwulan. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama dari seluruh elemen yang terkait di BSPJI Banjarbaru. Berdasarkan tabel 3.1, maka analisa hasil pengukuran indikator kinerja terhadap tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri

Indikator Kinerja terkait, antara lain :

- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri

3. Meningkatkan layanan public penunjang pertumbuhan industri

- Nilai minimal indeks layanan publik

4. Meningkatkan *good governance*

- Nilai minimal indeks manajemen resiko
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN
- Nilai disiplin pegawai
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja
- Nilai minimal laporan keuangan

Penjelasan yang lebih lengkap tentang semua indikator kegiatan akan diuraikan pada capaian per indikator. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat kembali mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi, dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun, penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

a. Indikator Kinerja : Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain. Dalam indikator ini dihitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan. Sumber Data yang digunakan adalah laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan Kepala Balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.

1) Hasil yang telah dicapai

Kegiatan kolaborasi ini dilaksanakan antara BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel. Berkat Motekar adalah Industri Kecil Menengah yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Produk utama IKM Berkat Motekar adalah manisan terong dan olahan kerupuk dari umbi-umbian. Permasalahan yang ditemukan adalah proses produksi yang masih konvensional yaitu pada proses pengeringan, dimana masih menggunakan sinar matahari. Hal ini menyebabkan proses produksi tidak kontinyu akibat kebergantungan terhadap cuaca, sehingga produk pangan yang dihasilkan pun rentan kontaminasi dan perubahan warna akibat proses pengeringan yang tidak optimal. Pada Tanggal 22 Maret 2022, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi pada IKM Berkat Motekar dengan tujuan untuk pemanfaatan hasil optimalisasi teknologi oleh Tim BSPJI Banjarbaru. Kegiatan yang dilakukan yaitu penandatanganan MoU antara BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar, Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari yang

disaksikan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah laut. Hasil optimalisasi dari Tim BSPJI Banjarbaru berupa alat pengering berbahan *stainless steel* dan alumunium dilengkapi dengan kontrol api pada kompor gas dan timer otomatis sehingga mampu melakukan penahanan suhu di waktu tertentu. Penambahan sistem kontrol suhu ini diharapkan mampu untuk mendukung terselenggaranya transformasi digital. Hasil unjuk kerja alat mampu beroperasi pada kapasitas maksimum alat, yaitu 20-25 Kg bahan. Alat ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi di IKM Berkat Motekar yang awalnya dari 500 pcs menjadi 630 pcs per bulan. Selain itu proses pengeringan yang dihasilkan juga sesuai dengan kebutuhan IKM untuk warna dan kadar air.



Gambar 3.1 Naskah Kerjasama BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar



Gambar 3.2. Penandatanganan Kerjasama antara BSPJI Banjarbaru dengan IKM Berkat Motekar



Gambar 3.3 Foto Alat Pengering Menggunakan Kontrol Suhu

Berdasarkan data diatas, sasaran kegiatan pertama dengan Realisasi fisik dari indikator ini adalah sebesar 100%. Target Indikator sebesar 1 Kegiatan Kolaborasi telah berhasil dicapai.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja I.1

Tujuan (T2)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100

2) Analisa hasil yang telah dicapai

Bila dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 1 Kegiatan Kolaborasi mampu memenuhi target sebesar 1 Kegiatan Kolaborasi. **Indikator ini merupakan inidikator baru sejak Perjakin TA 2021, namun masih relevan dengan indikator kinerja Renstra sebelumnya yaitu Proporsi Riset Berbasis Kerjasama/ Kolaborasi.** Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri selama TA 2020-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2020-2022

Indikator Kinerja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi

Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2021-2022	% Capaian
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	4 Kegiatan Kolaborasi	2 Kegiatan Kolaborasi	50

Bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya, maka capaian tahun ini memberikan hasil yang sama baik. Sementara bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 4 kegiatan kolaborasi, maka target tersebut belum terpenuhi dikarenakan target tersebut dihitung berdasarkan akumulasi. **Terdapat RPJMN 2020-2024** yaitu pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024 dan kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,8% pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB melalui salah satunya peningkatan produktivitas yang bersumber dari peningkatan efisiensi.

Kegiatan Lembaga Teknologi Industri, Pembentukan SAHABAT IKM, dan peningkatan kompetensi SDM merupakan beberapa faktor dalam menentukan hasil capaian indikator ini. Dalam pelaksanaannya Tim BSPJI Banjarbaru harus melakukan observasi dan koordinasi terkait inovasi teknologi yang direncanakan untuk dilakukan sesuai dengan Visi Misi BSPJI Banjarbaru dan kondisi lapangan pelaku industri. Jumlah SDM yang dimiliki dengan berbagai keahlian sangat membantu dalam mendukung tercapainya target indikator ini. Selain itu, secara berkala tim juga melakukan rapat monitoring dan evaluasi untuk memantau capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Perjakin BSPJI Banjarbaru.

3) Kendala

Tidak ada kendala berarti pada saat melaksanakan kegiatan kolaborasi selama TA 2022. Rekomendasi TA 2021 yaitu meningkatkan kegiatan dan/atau sosialisasi kepada akademisi, Lembaga penelitian, dan/ataupun instansi lainnya dalam hal melakukan observasi pada kebutuhan industri dan dapat mewujudkan harapan

dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga mampu meningkatkan perkembangan industri tersebut dan perlunya adanya pengembangan alat lebih lanjut telah ditindaklanjuti.

4) Rekomendasi

Rencana di tahun anggaran selanjutnya untuk mencapai target indikator kinerja ini antara lain :

- Dalam kegiatan Kolaborasi Tim fungsi OTIPK pada akhir tahun 2022 telah memetakan dan melakukan kegiatan survey IKM berdasarkan surat permintaan Daftar industri/ IKM yang telah dikirimkan ke beberapa Dinas Daerah untuk melihat potensi dan permasalahan industri
- Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TIM OTIPK akan dilakukan pembahasan dari aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit teknologi untuk dapat diambil di kegiatan kolaborasi . Selain itu, tim melakukan penelaahan terkait program yang dijalankan di tahun 2022 (DAPATI) untuk bisa di tingkatkan dan dikerjasamakan untuk kegiatan Kolaborasi Tahun 2023.

2. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.

Sasaran Kegiatan ini merupakan Sasaran Kegiatan pada perspektif customer yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) indikator kinerja, yaitu :

a. Indikator Kinerja II.1 : Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.

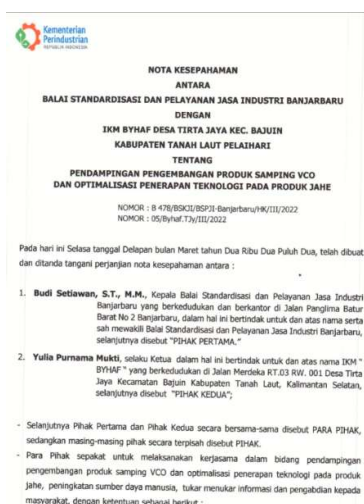
Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultansi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0. Cara Perhitungan indikator ini adalah menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan (**tanpa pendanaan DAPATI**).

1) Hasil yang telah dicapai

Target TA 2022 dari Indikator Kinerja II.1 ini adalah **2 perusahaan**. Realisasi dari target tersebut yaitu :

a. Pendampingan Pengembangan Produk Samping VCO Dan Optimalisasi Penerapan Teknologi Pada Produk Jahe (IKM BYHAF)

IKM BYHAF merupakan industri pengolah kelapa dengan produk utama Virgin Coconut Oil (VCO) dan serbuk minuman rempah yang berlokasi di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. VCO merupakan minyak kelapa murni dengan nilai tambah tinggi yang diperoleh lewat pemanasan minimal dan tanpa proses pemurnian kimiawi. IKM BYHAF masih memproduksi VCO dan minuman rempah dengan metode konvensional. IKM BYHAF lalu diberikan pendampingan berupa teknologi proses pengolahan, perbaikan layout produksi dan diversifikasi produk. Pada tanggal 31 Maret 2022, tim BSPJI Banjarbaru melaksanakan pendampingan pengembangan produk olahan VCO menjadi nata de coco serta optimalisasi penerapan teknologi produk jahe di IKM Byhaf. Agenda utama yaitu penandatanganan MoU antara BSPJI Banjarbaru dan IKM BYHAF. Bantuan yang diberikan berupa hasil optimalisasi teknologi proses pemerasan jahe yaitu berupa alat spinner. Selain itu juga pada kegiatan ini Tim BSPJI Banjarbaru memberikan pendampingan kepada para peserta di IKM BYHAF tentang bagaimana proses pembuatan nata de coco. Hasil pendampingan melalui peran balai di IKM Byhaf berhasil meningkatkan rendemen VCO 10-20%, mempercepat waktu filtrasi dari 10 jam menjadi 1 jam 20 menit, dan produksi dari 200 botol menjadi 300 botol per bulan.



Gambar 3.4 Nota Kesepahaman BSPJI Banjarbaru dan IKM BYHAF



Gambar 3.5 Alat Hasil Optimalisasi Penerapan Teknologi Produk Jahe

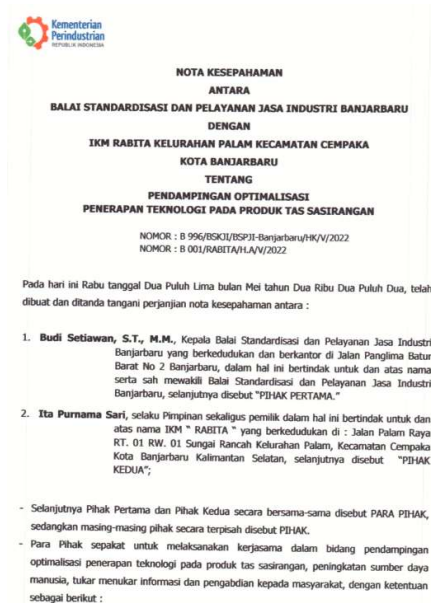


Gambar 3.6 Kunjungan Tim ke IKM BYHAF

b. Pendampingan Optimalisasi Penerapan Teknologi Pada Produk Tas Sasirangan (IKM RABITA)

Rabita adalah IKM yang memproduksi tas sasirangan sebagai produk utama serta produk sampingan antara lain masker, pouch, tisu, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya. Berlokasi di Kelurahan Palem, Kota Banjarbaru, Rabita berinovasi dengan memproduksi tas kekinian yang stylish, unik, dan modern. Jenis tas yang diproduksi antara lain tas tangan, sling bag, tas pinggang, dan ransel. Permasalahan yang ditemukan di IKM Rabita adalah pada proses produksi khususnya pada proses penempelan kain dasar dengan kain sasirangan untuk pemberian motif pada tas sasirangan. Proses ini masih menggunakan metode konvensional dengan cara disetrika yang menyebabkan panas yang dihasilkan tidak merata menyebabkan motif menggelembung dan kurang menempel pada produk. Penggunaan setrika

juga menyebabkan harga produksi lebih tinggi karena sering mengalami kerusakan. Pada tanggal 25 Mei 2022, tim BSPJI Banjarbaru melaksanakan kegiatan pendampingan dan optimalisasi teknologi di IKM Rabita. Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan MoU antara BSPJI Banjarbaru dengan IKM Rabita sebagai bentuk komitmen BSPJI Banjarbaru dalam hal peningkatan peran Balai pada industri/IKM. Selain itu, dilakukan pendampingan hasil optimalisasi teknologi yang di aplikasikan pada kain sasirangan untuk bahan baku pembuatan tas menggunakan alat *hot press* yang dilengkapi dengan kontrol suhu dan timer otomatis. Teknologi ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi sebesar 100% serta menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten dan merataa.



Gambar 3.7 Nota Kesepahaman BSPJI Banjarbaru dengan IKM RABITA



Gambar 3.8 Inovasi Alat *Hot Press*



Gambar 3.9 Kunjungan Tim BSJI Banjarbaru ke IKM Rabita

Berdasarkan hasil tersebut, maka realisasi indikator kinerja Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri telah tercapai.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja II.1

Tujuan (T1)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100

2) Analisa hasil yang telah dicapai

Bila dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 2 Perusahaan mampu memenuhi target sebesar 2 Perusahaan. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sejak Perjakin TA 2021, namun masih relevan dengan Indikator tahun sebelumnya yaitu Perusahaan industry/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervise/ konsultasi. Apabila dibandingkan, maka capaian peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dari TA 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dari TA 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1	1	1	1	2

Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2021-2022	% Capaian
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	8 Kegiatan Kolaborasi	3 Kegiatan Kolaborasi	37,5

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun ini memberikan hasil yang lebih baik. Capaian pada tahun sebelumnya adalah tentang Pengembangan Alat Pemotong Dan Pengering Umbi Maya yang merupakan hasil Kerjasama dengan Kelompok Tani Murung Jurai, Desa Jungkal, Kec. Lampihong, Kabupaten Balangan. Sementara itu, bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 8 maka target tersebut belum terpenuhi, dikarenakan target tersebut merupakan target yang dihitung secara akumulasi. Terdapat **RPJMN 2020-2024** yaitu pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024 dan kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,8% pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, tujuan indikator ini dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB, dapat berupa peningkatan produktivitas yang bersumber dari peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, secara realisasi dengan adanya pemanfaatan hasil inovasi ini mampu membantu mewujudkan hal tersebut.

Kegiatan Lembaga Teknologi Industri, SAHABAT IKM, dan peningkatan kompetensi SDM merupakan salah satu faktor dalam menentukan hasil capaian indikator ini. Dalam pelaksanaannya Tim BSPJI Banjarbaru harus melakukan observasi dan koordinasi terkait inovasi teknologi yang direncanakan untuk dilakukan sesuai dengan Visi Misi BSPJI Banjarbaru dan kondisi lapangan pelaku industri. Jumlah SDM yang dimiliki dengan berbagai keahlian sangat membantu dalam mendukung tercapainya target indikator ini. Selain itu, secara berkala tim juga melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Perjakin BSPJI Banjarbaru.

3) Kendala

Kendala yang pernah dihadapi oleh tim selama pelaksanaan kegiatan adalah adanya kerusakan alat yang disebabkan oleh penghubung antara alat dan aliran

listrik utama mengalami putus, namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Tim.

Rekomendasi berdasarkan TA 2021 yang telah ditindaklanjuti adalah melakukan observasi pada kebutuhan industri dan berkoordinasi dengan para pelaku industri sehingga produk inovasi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri serta meningkatkan kinerja industri.

4) Rekomendasi

Rencana di tahun anggaran selanjutnya antara lain :

- Dalam kegiatan Peran Balai Tim fungsi OTIPK pada akhir tahun 2022 telah memetakan dan melakukan kegiatan survey IKM berdasarkan surat permintaan Daftar industri/ IKM yang telah dikirimkan ke beberapa Dinas Daerah untuk melihat potensi dan permasalahan industri.
- Selanjutnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh TIM OTIPK akan dilakukan pembahasan dari aspek yang mencakup kegiatan peran balai, yaitu yang terkait asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, bimbingan transformasi industri 4.0, dan pendampingan, konsultasi, bimbingan penerapan standarisasi industri (standar mutu, standar berkelanjutan, standar industri hijau).
- Selain itu Tim fungsi OTIPK melakukan penelaahan terkait program yang dijalankan di tahun 2022 (DAPATI) untuk bisa di tingkatkan dan dikerjasamakan untuk kegiatan Peran Balai Tahun 2023.

3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.

a. Indikator Kinerja III.1 : Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ konsultasi

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa

konsultansi (**Pendanaan DAPATI**) diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Cara perhitungan indikator ini adalah Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B).

$$\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

1) Hasil yang telah dicapai

Target indikator ini pada TA 2022 adalah sebesar 45%. Kegiatan DAPATI TA 2022 terdapat 5 judul antara lain:

1. Modifikasi Teknologi Proses dan Peralatan Mesin Penggiling RSS (*Ribbed Smoked Sheet*)
Mitra IKM : Kelompok Tani UPPB Lebah Madu
2. Konsultansi Teknis Pengembangan Desain dan Mutu Produk Rajut di IKM Najwa Banjarbaru
Mitra IKM : Najwa Banjarbaru
3. Konsultansi Peningkatan Manajemen Produksi dan Nilai Jual Produk Bumbu Instan
Mitra IKM : Kantan Sasirangan
4. Konsultansi Peningkatan Manajemen Produksi dan Nilai Jual Produk Bumbu Instan
Mitra IKM : Halal Feast
5. Konsultansi Teknologi Produksi Kulit Lumpia
Mitra IKM : Kulit Lumpia Beruntung

Secara singkat hasil performansi yang diperoleh dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Hasil Performansi Industri dari Kegiatan DAPATI TA 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INDUSTRI	PERFORMANSI YANG DIUKUR	PERFORMANSI SEBELUM PENDAMPINGAN	PERFORMANSI SETELAH PENDAMPINGAN	PENINGKATAN PRODUKSI/ PROGRESS
1	Kelompok Tani UPPB Lebah Madu	Pengolahan RSS	Kapasitas produksi RSS	Banyak sekali produk defek karena menggumpal dan sobek	Menghasilkan peningkatan kapasitas produksi sebanyak 20 lembar per hari	Peningkatan produksi RSS sebesar 100 % dimana yang awalnya UPPB Lebah madu hanya

						menjual dalam bentuk Lum saja
2	IKM Najwa Banjarbaru	Rajut	Waktu Produksi Tali Strap	Tali strap tas yang diproduksi dengan teknik rajut membutuhkan waktu penyelesaian selama 3 hari	Tali strap tas yang diproduksi dengan teknik tenun kartu membutuhkan waktu preparasi selama 1 hari dan waktu penyelesaian selama 1 hari	Peningkatan kecepatan produksi berdasarkan peningkatan kecepatan produksi tali strap sebesar 66,67% Waktu produksi tali strap = ((3hari-1hari)/3hari)*100%=66,67%
3	IKM Kantan Sasirangan	Tekstil (Kain Sasirangan)	Kapasitas produksi dan kualitas produk ecoprint	Kapasitas produksi dalam satu kali produksi kain sasirangan 4 kain, kain ecoprint maksimal 3 kain Kualitas warna ecoprint belum sesuai harapan	Kapasitas produksi dengan Alat pencelup kain sasirangan serbaguna : - kain sasirangan 6 kain - kain ecoprint 10 - 12 kain Kualitas warna ecoprint telah memenuhi harapan (hasil pendampingan pembuatan ecoprint)	Peningkatan kapasitas produksi kain sasirangan sebesar 50% dari sebelumnya. Kualitas produk ecoprint terutama untuk warna telah sesuai harapan karena telah menggunakan metode mordanting yang lebih efektif dan efisien.
4	IKM Halal feast	Pangan	Nilai Penjualan Per Bulan	Rp. 23.385.628,-	Rp. 40.000.000,-	Peningkatan nilai penjualan perbulan sebesar 71 %
5	IKM Kulit Lumpia Beruntung	Pangan	Waktu dalam proses produksi pengadonan bahan baku kulit lumpia	Proses pengadonan masih manual memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk memperoleh adonan menjadi homogen/ kalis	Proses pengadonan menggunakan alat hasil konsultasi memerlukan waktu 15-20 menit untuk kapasitas maksimum produksi IKM	Waktu produksi kulit lumpia mengalami peningkatan produktivitas sebesar 66,67% dimana awal sebelum program konsultasi hanya mampu memproduksi 10.000 lembar dan setelah program ini

						menjadi 30.000 lembar per hari
Jumlah peserta DAPATI						5
Rerata Produktivitas/ Efisiensi						70,9 %

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 70,9%, maka target indikator kinerja Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi telah tercapai.

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.1

Tujuan (T1)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40%	70,9%	283,6

2) Analisa hasil yang telah dicapai

Bila dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 70,9% mampu memenuhi target sebesar 40%. Indikator ini merupakan indikator baru sejak Perjakin TA 2021. Apabila dibandingkan, maka capaian indikator Peningkatan Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dari TA 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Peningkatan Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dari TA 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	47,75%	70,9%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian TA 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2021. Pada TA 2021, BSPJI Banjarbaru memperoleh 4 (Empat) Judul DAPATI. Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	45 %	70,9 %	157,56

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 45% maka target tersebut telah terpenuhi. Terdapat **RPJMN 2020-2024** yaitu pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024 dan kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,8% pada tahun 2024. Selain Terkait hal tersebut, tujuan indikator ini dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB, dapat berupa peningkatan produktivitas yang bersumber dari peningkatan efisiensi maka secara realisasi dengan adanya pemanfaatan hasil inovasi dan pendampingan ini diharapkan mampu membantu mewujudkan hal tersebut.

3) Kendala

Tidak ada kendala berarti selama pelaksanaan kegiatan ini. Pengajuan dan seleksi Proposal DAPATI TA 2022 telah selesai dilaksanakan.

4) Rekomendasi

Rekomendasi untuk selanjutnya antara lain:

- Berdasarkan capaian kegiatan DAPATI Tahun 2022, dari 5 judul kegiatan memiliki rata-rata nilai produktivitas/ efisiensi sebesar **70,9%**. Untuk target tahun 2023 yaitu sebesar 45% Tim OTIPK akan memilih parameter yang akan dijadikan nilai produktivitas/efisiensi agar target tersebut terpenuhi.
- Program DAPATI yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan hasil seleksi sebanyak **2 Judul**, yaitu :
 1. Konsultansi Teknologi Alat Penyimpanan Kopi Bubuk Dengan Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban di IKM Efgeen “Kopi Hirang”
 2. Konsultansi Teknologi Proses Pengaduk Gula Semut Sistem Kontrol Suhu di KM La’Ba.

Jumlah ini menurun dibanding TA 2022 dikarenakan adanya batasan jumlah judul yang bisa lolos untuk masing-masing unit kerja. Hal ini disebabkan karena

adanya program baru lainnya yaitu PINOTI yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

b. Indikator Kinerja III.2 : Meningkatnya Utilisasi Layanan Jasa Industri di Dalam Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri. Cara perhitungan indikator ini adalah Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

1) Hasil yang Telah Dicapai

BSPJI Banjarbaru memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2022 sebesar Rp.4.775.082.360,-. PNBP tersebut diperoleh dari penerimaan layanan jasa yang merupakan hasil dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi (akun 425283); Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan (akun 425421); dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (akun 425692). Sementara jika dibandingkan dengan perolehan PNBP TA 2021 yang sebesar Rp.4.344.636.000,-, maka peningkatan capaian PNBP tersebut adalah sebagai berikut :

$$9,91\% = \frac{4.775.082.360 - 4.344.636.000}{4.344.636.000} \times 100\%$$

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.2

Tujuan (T1)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1%	9,91%	991

2) Analisa Hasil yang telah Dicapai

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja layanan jasa BSPJI Banjarbaru. Bila dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 9,91 Persen memenuhi target sebesar 1 Persen. PNBPN pada TA 2022 juga mampu memenuhi target PNBPN sesuai target tahun berjalan. Sementara itu, berdasarkan APBN 2022, pemerintah mematok target PNBPN sebesar Rp481,6 triliun. Apabila dibandingkan, maka realisasi PNBPN dan peningkatannya TA 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Data Capaian Meningkatnya Utilisasi Layanan Jasa Industri di Dalam negeri dari TA 2017-2021

	Capaian TA. 2017	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Realisasi Penerimaan PNBP Layanan Jasa	3.406.060.000	2.896.130.000	3.167.167.500	3.115.625.000	4.344.636.000	4.775.397.750
Indikator Kinerja						
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industry di dalam negeri	12,38%	-14,97%	7,56%	-1,63%	39,45%	9,91%

Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1%	9,91	991

BSPJI Banjarbaru merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang memberikan pelayanan publik dengan kategori pelayanan jasa. Jasa pelayanan yang diberikan antara lain :

1. Pengujian

Ruang lingkup parameter pengujian terakreditasi bidang kimia/fisika/biologi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-543-IDN, terdiri dari 12

komoditi, yaitu: pupuk NPK, pupuk fosfat alam, pupuk KCl, AMDK, garam konsumsi beriodium, air permukaan, air limbah, udara ambien, emisi tidak bergerak, kebisingan, dan lingkungan kerja, dengan 99 parameter uji.

2. Kalibrasi

Ruang lingkup akreditasi Laboratorium Kalibrasi LK-326-IDN adalah pada kelompok pengukuran suhu dan kelembaban (*enclosure oven/incubator*).

3. Sertifikasi Produk

Ruang lingkup proses sertifikasi pada LSPro BSPJI Banjarbaru LSPR-059-IDN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) antara lain pupuk NPK padat, pupuk fosfat alam, air mineral, air demineral, air minum embun, garam konsumsi beriodium, dan minyak goreng.

4. Konsultasi

Termasuk jasa pendampingan penyusunan dokumen mutu, dan konsultasi teknologi proses dan manajemen.

5. Pelatihan Industri (Pendampingan Industri)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Permenperin Nomor 01 Tahun 2022, maka layanan ini disebut sebagai Layanan Pendampingan Industri.

6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Dikarenakan adanya perubahan tusi sesuai Permenperin Nomor 01 Tahun 2022, maka layanan ini diubah menjadi Layanan Pendampingan Industri.

BSPJI Banjarbaru menerapkan beberapa sistem manajemen, antara lain SNI ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 17065:2012, SNI ISO 37001:2016, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. Pada tahun 2022, BSPJI Banjarbaru menambah 1 (Satu) Ruang Lingkup Layanan yaitu Lembaga Pemeriksa Halal, dengan masa berlaku sertifikat tanggal 5 Oktober 2022 – 5 Oktober 2026. Jumlah Auditor Halal yang teregister oleh BPJPH per tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 3 (Tiga) orang. Berdasarkan sertifikat, BSPJI Banjarbaru hanya boleh melakukan layanan sertifikasi halal di wilayah Kalsel. Penerapan berbagai sistem manajemen ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Sistem manajemen tersebut berhasil dimaintenance melalui survailen atau reakreditasi. Selain itu, salah satu faktor yang berpengaruh pada capaian ini adalah adanya penyesuaian tarif berdasarkan peraturan pemerintah terbaru dan tata cara perhitungan biaya

pengujian serta implementasi ketentuan KAN K-01.10 terkait ketentuan kegiatan sampling lingkungan.

Dari berbagai jasa pelayanan teknis yang diberikan, pengujian menjadi layanan jasa yang paling banyak memberikan kontribusi, data layanan yang diperoleh cenderung naik pada setiap aspek, mulai dari jumlah pelanggan pada pengujian maupun sertifikasi. Berdasarkan jumlah pelanggan pengujian tersebut sekitar 77% pelanggan berasal dari Kalimantan Selatan dan 23% berasal dari Kalimantan Tengah. Pelanggan dari Kalimantan Tengah berasal dari Kab. Murung, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Kobar, Palangkaraya, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotim, Kab. Barito Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas, sedangkan untuk provinsi Kalimantan Selatan seluruh Kabupaten/Kota telah menjadi pelanggan BSPJI Banjarbaru.

3) Kendala

Kendala yang pernah terjadi selama pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah kurangnya anggaran untuk kegiatan pengujian lingkungan karena meningkatnya permintaan pelanggan, namun hal ini dapat diatasi dengan revisi anggaran melalui skema penggunaan kelebihan perolehan PNBK.

4) Rekomendasi

Rencana di tahun anggaran selanjutnya antara lain:

- BSPJI Banjarbaru berkomitmen terus berupaya meningkatkan jenis layanan dalam upaya memberikan dukungan bagi para pelaku industri agar makin produktif dan berdaya saing.
- Layanan-layanan yang akan dikembangkan oleh BSPJI Banjarbaru meliputi:
 1. Pelayanan Jasa Sertifikasi Sistem Manajemen
 2. Pelayanan Jasa Sertifikasi Halal
 3. Pelayanan Jasa Sertifikasi Industri Hijau
 4. Pelayanan Jasa Pemanfaatan Aset (jika ditetapkan menjadi BLU)
 5. Pelayanan Jasa Verifikasi TKDN

Selain menambah jenis layanan jasa, BSPJI Banjarbaru juga memperluas wilayah pemasaran hingga ke Kalimantan Tengah.

c. Indikator Kinerja III.3 : Peningkatan Jumlah Lingkup Layanan Jasa Industri Di Dalam Negeri

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya Lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, Lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri. Indikator kinerja ini menghitung jumlah ruang lingkup/ parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki Balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/ parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indikator} = B - A$$

1) Hasil yang Telah Dicapai

BSPJI Banjarbaru menetapkan, mendokumentasikan, dan menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (selanjutnya disebut “Sistem Manajemen”) dan memperbaiki secara terus-menerus efektifitasnya sesuai dengan persyaratan standar. Terdapat 6 Sistem Mutu,, antara lain :

1. SNI ISO 9001:2015

Ruang lingkup sertifikasi ISO 9001:2015 adalah Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi Produk dan Halal, Bimbingan Teknis, dan Konsultasi.

2. ISO/IEC 17025:2017

Ruang lingkup akreditasi proses pengujian dan kalibrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

3. SNI ISO 17065:2012

Ruang lingkup proses sertifikasi pada LSPro BSPJI Banjarbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) antara lain Pupuk NPK Padat, Pupuk fosfat alam, Air Mineral, Air Demineral, Air Minum Embun, Garam Konsumsi Beriodium, Minyak Goreng Sawit.

4. SNI ISO 37001:2016

Ruang lingkup Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Bimbingan Teknis, dan Konsultasi.

Permen LH No.23 Tahun 2020 Laboratorium Lingkungan. Ruang Lingkup Laboratorium Lingkungan adalah sesuai dengan lampiran sertifikat akreditasi laboratorium uji parameter air dan udara sesuai ISO/IEC 17025:2017 yang dikeluarkan oleh KAN

5. Permen LH No.23 Tahun 2020 Laboratorium Lingkungan. Ruang Lingkup Laboratorium Lingkungan adalah sesuai dengan lampiran sertifikat akreditasi laboratorium uji parameter air dan udara sesuai ISO/IEC 17025:2017 yang dikeluarkan oleh KAN.
6. Lembaga Pemeriksa Halal, yang terakreditasi pada TA 2022 dengan masa berlaku sertifikat tanggal 5 Oktober 2022 – 5 Oktober 2026. Jumlah Auditor Halal yang teregister oleh BPJPH per tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 3 (Tiga) orang.

Sejak diberlakukannya SOTK terbaru sesuai Permenpein 1 Tahun 2022, maka SMM KNAPP 02:2017 secara resmi juga dihapus dari SMM Terintegrasi BSPJI Banjarbaru. Sementara pengajuan PRL untuk Laboratorium Kalibrasi akan diajukan pada tahun berikutnya sesuai hasil kaji ulang manajemen. Pada tahun 2022, peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri dalam negeri sudah terlaksana sesuai target yang diharapkan. Realisasi tahun 2022 terkait sistem manajemen mutu antara lain:

1. Surat Keputusan KAN Nomor 1269/4.b2/LP/04/2022 Tanggal 5 April 2022 Perihal Pemberitahuan Hasil Survailen berdasarkan Hasil Kunjungan **Pengawasan (Survailen ke-1) SNI ISO 17025:2017** tanggal 20-22 September 2021
2. **Survailen SNI ISO 37001:2016** (Tanggal 24-25 Agustus 2022). Berdasarkan Surat Keputusan Audit Pengawasan SRT-159/IX/2022 maka status sertifikasi DAPAT DILANJUTKAN sampai dengan pelaksanaan Resertifikasi
3. **Survailen ISO/IEC 17025:2017 (Lab Kalibrasi)** (Tanggal 25 Maret 2022). Berdasarkan Surat Keputusan 2470/3.b3/LK/06/2022 Tanggal 21 Juni 2022 diputuskan Status Akreditasi dipertahankan dan perubahan nama satker
4. **Survailen SNI ISO 9001:2015** dilaksanakan pada 5 Oktober 2022 oleh B4T-SC dan semua temuan sudah selesai. Sertifikat terbaru dengan nama BSPJI Banjarbaru telah terbit dengan masa berlaku tanggal 8 Desember 2022 – 27 Desember 2024.

5. Terakreditasinya LPH dengan ruang lingkup makanan dan minuman dengan masing-masing 3 tingkat risiko.

Secara ringkas, capaian penambahan ruang lingkup parameter layanan jasa TA 2022 adalah sebagai berikut :

- SNI ISO 17025:2017 LABORATORIUM PENGUJIAN : 31 RUANG LINGKUP
- SERTIFIKASI HALAL : 6 (MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN MASING-MASING 3 TINGKAT RESIKO)
- SNI ISO 9001:2015 : 1 (LAYANAN PENDAMPINGAN)

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.3

Tujuan (T1)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard dan soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	38 Ruang Lingkup	100

2) Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Penambahan ruang lingkup pada LPK umumnya dilakukan secara simultan bersamaan dengan tahapan reakreditasi maupun surveilan atau asesmen. Pada tahun 2021, BSPJI Banjarbaru telah melakukan survailen SNI ISO 17025:2017. Remote assessment dalam surveilan 1, witness udara, dan penambahan ruang lingkup untuk Laboratorium BSPJI Banjarbaru (LP-543-IDN) selama 3 hari pada Tgl. 20 September 2021 (witness sampling udara) dan 21-22 September 2021 (Surveilant 1 dan Penambahan Ruang Lingkup) sudah selesai dilaksanakan. BSPJI Banjarbaru mendapatkan jadwal Verifikasi Lapangan terkait pengajuan PRL pada bulan Desember 2021, sehingga rapat Evaluasi Akhir di KAN baru bisa dilaksanakan dibulan berikutnya yaitu Januari 2022. Hal ini mengakibatkan Surat Keputusan terkait pengajuan PRL baru bisa dikeluarkan di TA 2022.

Apabila dibandingkan, maka capaian peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri TA 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.18 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri dari TA 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	38 Ruang Lingkup

Berdasarkan data diatas, pada TA 2021 target adalah N/A karena memang seperti yang dijelaskan sebelumnya pengajuan PRL ini tergantung pada jadwal survailen dan kapan surat keputusan bisa dikeluarkan. Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.3 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	59	38	64,41

Berdasarkan data diatas, maka realisasi belum memenuhi target jangka menengah renstra dikarenakan target tersebut merupakan hasil akumulasi target tahun 2021-2024. Beberapa kegiatan (Sub Komponen) dalam DIPA TA 2022 yang mendukung tercapainya realisasi indikator kinerja ini, antara lain :

- Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian
- Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi
- Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal
- Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001
- Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001

3) Kendala

Kendala yang dihadapi adalah terdapat 1 parameter yang gagal diakreditasi dari 32 parameter yang diajukan yaitu parameter NO (Komoditi Emisi Sumber Tidak Bergerak). Sementara pengajuan PRL untuk Laboratorium Kalibrasi akan diajukan pada tahun berikutnya sesuai hasil kaji ulang manajemen.

4) Rekomendasi

Rencana tindak lanjut di tahun anggaran berikutnya, antara lain :

- Survailen ISO/IEC 17025:2017 dengan beberapa penambahan Ruang Lingkup.
Namun Surat Keputusan Diperkirakan keluar pada Tahun 2024,
- Survailen SNI ISO 17065:2012

3. Resertifikasi SNI ISO 37001:2016
4. Surveilance SNI ISO 9001:2015
5. **Tahun 2023 BSPJI merencanakan membentuk LSIH dan LSSM**, dengan perencanaan sebagai berikut :
 - a. **LSIH** dengan Ruang Lingkup Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Nomor SIH 10437:2017 dan Standar Industri Hijau untuk Air Mineral Nomor SIH 11050.1:2020
 - b. **LSSM** dengan Ruang Lingkup = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (01); Produk Makanan, Minuman dan Tembakau (03); Karet dan Produk Plastik (14) serta Administrasi Umum (36).

d. Indikator Kinerja III.4 : Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 sesuai Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN). Cara perhitungan indikator ini adalah Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$

Ket:

R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI

RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target indikator ini adalah sebesar 45%. Total pagu berdasarkan akun-akun yang telah ditentukan guna perhitungan PDN adalah sebesar Rp3.579.542.000,00. Realisasi selama TA 2022 dengan menggunakan PDN adalah senilai Rp.3.300.845.436,00 (Rp.2.940.545.336,- + Rp.360.300.100,-) atau setara dengan 92,21% dari total pagu tersebut. Capaian tersebut didasarkan pada hasil pada Aplikasi P3DN sebagai berikut :

Tabel 3.20 Perhitungan Capaian Persentase Penggunaan PDN BSPJI Banjarbaru TA 2022

23.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	3.579.542.000	2.940.545.336	360.300.100	269.680.320	92,21%
24.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	3.638.697.000	2.801.647.204	0	290.000	77,00%
25.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	4.238.456.000	3.866.678.522	158.267.636	201.120.200	94,96%
26.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	2.229.216.000	1.769.268.942	149.552.000	200.000	86,08%
27.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	1.627.679.000	1.540.622.900	0	28.328.400	94,65%
28.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	6.457.226.000	5.682.571.417	274.198.057	3.285.000	92,25%
29.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	2.461.579.000	1.716.991.754	175.200.000	556.460.080	76,87%

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja III.4

Tujuan (T1)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 %	92,21 %	204,91

2. Analisa Hasil yang telah Dicapai

Jika dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 45 Persen memenuhi target sebesar 92,21 Persen. Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Negeri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Apabila dibandingkan, maka capaian indikator kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa TA 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dari TA 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	50,22%	92,21%

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian TA 2022 lebih baik dibandingkan dengan TA 2021. Sementara itu, jika dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh telah memenuhi target, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III.4 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	47%	92,21%	196,19

3. Kendala

Tidak semua pengadaan barang dan/atau jasa bisa menggunakan PDN, hal ini dikarenakan masih adanya keterbatasan kualitas dan/ataupun ketersediaan sesuai spesifikasi yang diperlukan.

4. Rekomendasi

Rencana tindak lanjut di tahun anggaran berikutnya antara lain :

- Melakukan perhitungan penggunaan pdn/tkdn pada aplikasi emon secara detail sehingga data yang disajikan lebih akurat;
- Selalu mengutamakan penggunaan produk yang mempunyai sertifikat tkdn dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Memperbanyak referensi atas produk-produk yang sudah PDN khususnya tkdn agar pemilihan produk barang/jasa pada proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat.

4. Sasaran Kegiatan IV : Tercapaiannya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran Kegiatan ini merupakan Sasaran Kegiatan pada perspektif internal proses yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggara proses internal.

a. Indikator Kinerja IV.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Cara perhitungan indikator ini

adalah Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target indikator ini pada TA 2022 adalah sebesar 92%. Kegiatan Audit Kinerja pada BSPJI Banjarbaru dilaksanakan pada tanggal **20-25 Juni 2022**, hasil pemeriksaan sebanyak 16 temuan dan 27 saran sudah **selesai** ditindaklanjuti sehingga dinyatakan telah selesai sesuai surat dari Inspektur Jenderal No R/139/IJ-IND/PW/XI/2022 tanggal 29 November 2022. Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 16 (Enam Belas) temuan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) saran, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dapat dinyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan anggaran yang telah diaudit.



Gambar 3.10 Surat Keputusan Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BSPJI Banjarbaru

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker telah tercapai.

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja IV.1

Tujuan (T4)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya <i>good governance</i>	SK 4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 %	100 %	108,70

2. Analisa Hasil yang telah Dicapai

Jika dibandingkan dengan target tahun ini, maka hasil capaian yang diperoleh yaitu sebesar 100 Persen memenuhi target sebesar 92 Persen.

Apabila dibandingkan, maka capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker TA 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dari TA 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	100%

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian TA 2022 **sama baiknya** dengan TA 2021. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, maka capaiannya sudah berhasil memenuhi.

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93%	100%	107,53

Indikator ini merupakan kategori indikator baru sejak Perjakin TA 2021. Namun, secara berkala Audit Kinerja Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh APIP Kemenperin. Kegiatan Pengawasan Internal ini guna mendukung cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dari Hasil Audit Kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2022 dapat disimpulkan antara lain :

- Terdapat beberapa laporan kegiatan yang belum menyajikan informasi secara detail terkait kegiatan sehingga perlu adanya perbaikan dan penambahan informasi dalam laporan kegiatan,
- Terdapat temuan terkait administrasi pengelolaan persediaan yang belum lengkap, serta kekeliruan penyusunan program terkait pemilihan akun.

3. Kendala

Semua temuan telah selesai ditindaklanjuti, namun kendala selama pelaksanaannya yaitu Proses tindaklanjut hasil pemeriksaan audit kinerja BSPJI Banjarbaru pada tahun 2022 ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tim penerima hasil tindaklanjut berbeda dengan tim yang melakukan

audit sehingga dalam pemeriksaan hasil tindak lanjut temuan audit diperlukan waktu untuk kordinasi antara penerima hasil tindak lanjut dan auditor.

4. Rekomendasi

Rencana tindaklanjut di tahun berikutnya antara lain :

- Para PJ Kegiatan dalam membuat laporan kegiatan diharapkan memperhatikan temuan pada hasil audit sebelumnya sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya pengulangan kesalahan yang sama dalam penyusunan laporan kegiatan.
- Memberikan tambahan personil untuk pengelolaan persediaan agar dapat membantu petugas persediaan dalam menatausahakan administrasi pengelolaan persedian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi antara bagian program, bagian keuangan PPK, dan/ataupun bagian terkait lainnya dalam penyusunan program dan penganggaran sehingga bisa menentukan perencanaan yang lebih baik lagi.

5. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan ini merupakan Sasaran Kegiatan pada perspektif internal proses yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggara proses internal.

a. Indikator Kinerja V.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Target indikator ini adalah meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan BSPJI Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2022, menjadi 3,5 indeks.

BSPJI Banjarbaru merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang memberikan pelayanan publik dengan kategori pelayanan jasa. Jasa pelayanan yang diberikan antara lain pengujian, sertifikasi LS-Pro, bimbingan teknis, dan konsultansi. Terkait hal ini, BSPJI Banjarbaru wajib melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala, minimal 1 (satu) kali setahun. Apabila dibutuhkan dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. Hal ini sesuai dengan PERMEN PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

1) Hasil yang Telah Dicapai

Survei Kepuasan Masyarakat BSPJI Banjarbaru diawali bulan Januari sampai bulan Desember 2022 untuk semua pelanggan yang mendapat pelayanan baik pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi maupun pendampingan industri melalui **e-survey** dengan cara pelanggan mengakses link <http://surveysibiru.kemenperin.go.id>. Jumlah responden BSPJI Banjarbaru selama TA 2022 adalah sebesar 348 responden dari total pelanggan sebanyak 446. Jika didasarkan pada ketentuan jumlah sampel Morgan dan Krejcie, apabila jumlah populasi (pelanggan) sebanyak 440, diperlukan minimal sampel (responden) sejumlah 205 (46,6%), maka jumlah responden selama TA 2022 telah memenuhi ketentuan tersebut. Hasil pengolahan data tersebut disajikan pada uraian berikut:

Tabel 3.27 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Pelayanan TA 2022 Untuk Semua Layanan Jasa

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rerata IKM Unsur
U1	Persyaratan dengan jenis pelayanan	3,63
U2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,67
U3	Waktu pelayanan	3,48
U4	Biaya/ tarif	3,50
U5	Produk, spesifikasi, dan jenis layanan	3,59
U6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	3,62
U7	Kesopanan dan keramahan	3,70
U8	Kualitas sarana dan prasarana	3,57
U9	Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,79
Rata-rata Nilai Indeks		3,62
Nilai Dasar Mutu Pelayanan		90,5 atau A (Sangat Baik)

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri telah tercapai.

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja V.1

Tujuan (T2)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	SK 5	Terselenggara nya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri	3,50	3,62	103,40

2) Analisa Hasil yang telah Dicapai

Berdasarkan Tabel 3.27, terlihat bahwa kinerja unit pelayanan BSPJI Banjarbaru TA 2022 adalah **sangat baik** dengan **mutu pelayanan A**. Dalam perhitungan terdapat 9 unsur variable pelayanan yang dikaji dan dibuat dalam bentuk kuesioner. Nilai **terendah** ($< 3,5$) terdapat pada penilaian kecepatan waktu penyelesaian ($U3=3,48$), sedangkan nilai **tertinggi** terdapat pada unsur Pnanganan pengaduan, saran, dan masukan ($U9=3,79$). **Penilaian kecepatan waktu penyelesaian dinilai paling rendah**, dikarenakan pelanggan masih banyak yang berharap agar waktu penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat dari SPM yang telah ditetapkan, disisi lain, BSPJI telah melakukan penyelesaian pekerjaan atau pelayanan sesuai dengan SPM. **Penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapat nilai tertinggi** disebabkan karena pengaduan yang diterima petugas telah dilakukan investigasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan target yang telah ditetapkan (maksimal 8 hari kerja).

Bila dibandingkan, maka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,84	3,84	3,70	3,60	3,62

Berdasarkan data diatas, nilai IKM BSPJI Banjarbaru pada TA 2022 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini pada TA 2022 sudah dapat memenuhi target.

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,60	3,62	100,56

Sementara itu, jika berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, terdapat Indikator Kinerja yaitu Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat

Nasional dimana Instansi Pelaksana adalah Kemenpan-RB dengan target TA 2022 adalah 1 indeks.

Sistem informasi BSPJI Banjarbaru yang dikembangkan sejak tahun 2021 juga mendukung peningkatan pelayanan public BSPJI Banjarbaru. Pengembangan sistem ini bertujuan salah satu utamanya guna memenuhi tuntutan pelanggan terhadap lamanya waktu penyelesaian pelayanan agar bisa lebih dipercepat. Selain itu, demi memenuhi kepuasan masyarakat maka dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta kenyamanan dalam satu Gedung layanan terpadu yaitu *Banua Industrial Centre* (BIC). BIC mengintegrasikan semua layanan jasa seperti layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan pendampingan industri (bimbingan teknis).

3) Kendala

Kendala yang dihadapi selama ini adalah lebih kepada pelanggan yang masih banyak yang berharap wajar waktu penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat meskipun pihak BSPJI Banjarbaru telah memenuhi ketentuan SPM dalam mengeluarkan Lembar Hasil Uji (LHU). Selain itu terkait dengan tarif, tidak semua pelanggan mengetahui tentang adanya diskon sesuai peraturan tarif, sehingga bagi pelanggan, khususnya pelanggan industri kecil menengah menganggap tarif pelayanan BSPJI Banjarbaru relative mahal.

Rekomendasi TA 2021 yang telah ditindaklanjuti pada TA 2022 antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi layanan jasa industri BSPJI Banjarbaru
- SIBIRU akan berfokus melakukan penambahan layanan untuk Layanan Sertifikasi dan Layanan Kalibrasi.

4) Rekomendasi

Rencana tindaklanjut di tahun anggaran berikutnya antara lain :

- Tetap melakukan promosi ke berbagai wilayah (industri besar, menengah maupun UMKM);
- BSPJI Banjarbaru melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) survei secara seketika setelah mendapat pelayanan (sesuai dengan PERMEN PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
- Mengakomodir saran dan masukan pelanggan, termasuk mempercepat SPM dan melengkapi sarana dan prasarana.

6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Sasaran Kegiatan ini merupakan Sasaran Kegiatan perspektif *learn & growth* yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) Indikator Kinerja, antara lain :

a. Indikator Kinerja VI.1 : Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100 (Sangat Tinggi); b. 81 — 90 (Tinggi); c. 71 – 80 (Sedang); d. 61 — 70 (Rendah); dan e. 60 ke bawah (Sangat Rendah). Indikator ini adalah Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN. Pembuktian berupa nilai indeks profesionalitas ASN Satker.

1) Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target indikator ini pada tahun berjalan adalah rata-rata Indeks Profesionalitas ASN sebesar 72 Indeks. Perhitungan indeks menggunakan Aplikasi SAPK. Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi yang menjadi Penilaian IP ASN dengan pemenuhan 4 (empat) Dimensi/Indikator, yaitu :

- **Kualifikasi**, Riwayat Pendidikan Terakhir;
- **Kompetensi**, Riwayat Pengembangan Kompetensi;
- **Kinerja**, Hasil Penilaian Kinerja;
- **Disiplin**, Riwayat Hukuman Disiplin.

Capaian pada tahun berjalan adalah **83,73 Indeks atau sebesar 116,29% dari target tahun berjalan**. Nilai IP ASN per pegawai dapat dilihat pada gambar berikut.

REKAPITULASI NILAI IPASN
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Tahun 2022

Tanggal update : 2022-01-25
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455

No.	NP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1.	19800101980031003	APHAMDIYAH	Jabatan Struktural	20	40	30	5	95
2.	198701281986031001	YANUARWANTO	Pelaksana	15	40	15	5	75
3.	198907211980031004	ANDI GUNADI	Jabatan Fungsional	5	40	25	5	75
4.	19720021980032001	SITI FANDAH	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
5.	197312242002121005	MANGATAS SIREGAR	Pelaksana	15	40	25	5	85
6.	197804122002121008	ASLAN PRAYUDI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
7.	197810102002122002	ENDANG GEMBRAYATI	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
8.	197812242002121002	M ISA ANDHARI	Pelaksana	5	40	25	5	75
9.	19840322000112001	PANDI HASANAH	Jabatan Struktural	20	40	25	5	90
10.	198403280009191002	MUNTASHIR RAHMANN	Jabatan Fungsional	20	40	15	5	80
11.	198703082010121002	MUHAMAD RIDWAN	Pelaksana	10	40	25	5	80
12.	198803012014022001	FIKA KURNIAWATI	Pelaksana	15	40	25	5	85
13.	198809122819811001	MUHAMMAD KHARUL QAZAFIN	Pelaksana	15	40	25	5	85
14.	199210182018011002	WAHID ADHI SURYAWAN	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
15.	199812280202121003	MUHAMMAD KHALISH HAFIZH	Pelaksana	15	40	25	5	85
16.	199803082019121001	TALUFK RIYADI	Pelaksana	5	40	25	5	75
17.	198308151985031004	SAIBATUL HAMDI	Jabatan Fungsional	20	40	25	5	90
18.	198310051985021001	MYONO	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
19.	197107022002121002	BUDI TRI CAHYANA	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
20.	197409082003122003	NAZAMU RAHMI	Jabatan Fungsional	25	40	25	5	95
21.	198112032006042004	DESI MUSTIKA AMALIAHY	Jabatan Fungsional	20	40	25	5	90
22.	198512222009012006	NURHIDAYATI	Jabatan Fungsional	20	40	25	5	90
23.	198811302014021001	RAIS SALIM	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
24.	199003180214021001	I DEWA GEDE PUTRA PRABAJA	Pelaksana	15	40	25	5	85
25.	198003032018011001	MUHAMMAD LISTIANTO RAHARJUD	Pelaksana	15	40	30	5	90
26.	198909142014022001	NUMALATINA	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
27.	198811122019011002	RIOLA NOR HADI	Pelaksana	15	40	25	5	85
28.	19701011984032002	RETNO UTAMI PURBANINGTYAS	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
29.	197110171983021003	NURDIH	Pelaksana	15	40	25	5	85
30.	197310271984032002	SANTY DIAH SURYANI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85

No.	NP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
31.	197405141984032001	ROGHAENI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
32.	197811112005022001	SRI HIDAYATI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
33.	197907172005022001	RUPIDA	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
34.	197911102005021006	PALJI SAPUTRA	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
35.	198008212006042003	RINNE NINTASARI	Jabatan Fungsional	15	40	15	5	75
36.	198410022006021002	HANDRIAN SYAHPUTRA SIREGAR	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
37.	198507142006012002	FITRI YULIATI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
38.	198604132018011001	MUSES APRILUS	Pelaksana	15	40	25	5	85
39.	198710132019121001	DIKY SUBHANUDDIN	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
40.	199005252015022001	NADRA KHARUHAH	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
41.	199304202019011001	NOOR IRRAWAN	Jabatan Fungsional	10	40	25	5	80
42.	199404152018011002	AFANDY BAYU NURCAHYO	Pelaksana	15	40	25	5	85
43.	199504212020122003	KARTIKA INDERJANI	Pelaksana	15	40	25	5	85
44.	199505292020121005	MOCHAMAD FATHI RIZQULLAH	Pelaksana	15	40	25	5	85
45.	198708072008111001	ABDUL HARI	Pelaksana	5	40	25	5	75
46.	198907262008111001	SAKAT	Pelaksana	5	40	25	5	75
47.	197802202002121006	ANWAR PIRDAUS	Pelaksana	15	40	25	5	85
48.	199303032006041004	DWI HARSONO	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
49.	198204202005021001	MUHAMMAD SOBIRIN	Pelaksana	10	40	25	5	80
50.	198802202018012001	FAIZA ELISA HASPIANTI	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
51.	198908142018011002	YEMBI DANANG NURYUONO	Pelaksana	10	40	25	5	80
52.	197709022005022002	DEWI SUSILAWATI	Jabatan Fungsional	15	25	30	5	75
53.	198203252005022001	EVY SETIAWATI	Jabatan Fungsional	25	40	25	5	95
54.	198210072006042020	CHATMARTUN NISA	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
55.	198805302015021004	HAMLAN HSIAN	Jabatan Fungsional	15	40	25	5	85
Rata-rata				14.18	39.73	24.73	5.00	83.64

REKAP IP ASN BSKJI TA. 2022

No	Unit Kerja	Nilai (Data 10 Februari 2023)
1	Sekretariat BSKJI	68,11
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	57,30
3	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	59,72
4	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	46,72
5	Pusat Industri Hijau	65,07
6	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan	72,75
7	BBSPJI Agro	63,40
8	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam	75,75
9	BBSPJI Tekstil	74,70
10	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	73,70
11	BBSPJI Selulosa	74,73
12	BBSPJI Logam dan Mesin	72,44
13	BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik	76,32
14	BBSPJI Kerajinan dan Batik	81,79
15	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	77,07
16	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	74,25
17	BSPJI Banda Aceh	56,67
18	BSPJI Medan	73,36
19	BSPJI Padang	73,63
20	BSPJI Palembang	81,51
21	BSPJI Bandar Lampung	70,71
22	BSPJI Surabaya	82,76
23	BSPJI Banjarbaru	83,73
24	BSPJI Pontianak	73,61
25	BSPJI Samarinda	80,43
26	BSPJI Manado	71,98
27	BSPJI Ambon	74,28
28	BSPJI Jakarta	75,50
29	BSPJI Pekanbaru	77,67
	Rata rata BSKJI	72,06

Gambar 3.11 Nilai Indeks Profesionalitas ASN BSPJI Banjarbaru dan BSKJI TA 2022

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja rata-rata indeks profesionalitas ASN telah mencapai target.

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VI.1

Tujuan (T4)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan <i>good governance</i>	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesionalitas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	72	83,73	116,29

2) Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Capaian pada TA 2022 sebesar 83,64 mampu memenuhi target tahun berjalan yaitu 72. Bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 79, maka nilai capaian pada tahun ini meningkat atau setara dengan 105,99% dari capaian sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari REKAP-IP ASN melalui Intranet Kemenperin diperoleh kesimpulan bahwa nilai BSPJI Banjarbaru TA 2022 masih menduduki **peringkat tertinggi di lingkungan BSKJI Kemenperin**. Peringkat tertinggi ini sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada TA 2021 perolehan nilai merupakan yang tertinggi se-BSKJI.

Bila dibandingkan, maka Nilai Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	-	-	74	79	83,73

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini telah memenuhi target tersebut.

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	73	83,73	114,70

Kegiatan Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Evaluasi Jabatan Fungsional menjadi kegiatan yang mampu menunjang pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu, Kebijakan Satker dengan memberikan kesempatan pegawai agar bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga inisiatif dari masing-masing pegawai untuk mengikuti workshop/webinar/bimtek/pelatihan secara mandiri juga membantu tercapainya target tahun ini dan untuk kedepannya.

Selain itu, sejak TA 2019 Baristand Industri mengagendakan kegiatan Diklat Motivasi setiap tahunnya dan dianggarkan secara khusus pada DIPA. Pada tahun 2022 ini, bekerja sama dengan CV Amandit Loksado Lestari melaksanakan kegiatan Diklat Motivasi Pegawai di Loksado, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, Sabtu-Minggu (15-16 Oktober 2022). Kegiatan Diklat motivasi diikuti oleh 77 peserta, dari ASN dan Non ASN, dengan tujuan mempererat kebersamaan, mendorong agar pegawai terus maju, berinovasi, membangun integritas, memperkuat kerja tim sehingga bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Pelaksanaan Diklat Motivasi Pegawai terbagi dalam beberapa rangkaian acara, yaitu Yel-yel BSPJI Banjarbaru Menuju WBBM 2022. Selain itu, terdapat pemberian **reward pegawai** dengan rincian sebagai berikut :

1. ASN Paling Bersahabat
2. ASN Terdisiplin
3. Non ASN Paling Bersahabat
4. Petugas Pelayanan Paling Bersahabat



Gambar 3.12 Pemberian *Reward* kepada Pegawai yang terpilih.

3) Kendala

Belum adanya sosialisasi dari pusat terkait Aplikasi SAPK secara lebih detail sehingga dalam analisa terhadap cara kerja sistem dalam menilai data yang telah input dilakukan balai sesuai pemahaman masing-masing. Selain itu, beberapa pegawai yang telah berstatus JFT belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya.

4) Rekomendasi

Rencana di tahun anggaran selanjutnya, antara lain :

- Keikutsertaan Tim Kepegawaian pada Bimtek/ Workshop aplikasi pendukung penilaian IP ASN;
- Penertiban dokumentasi pelaporan hasil pelatihan oleh pegawai kepada bagian kepegawaian sekaligus monitoring untuk pemenuhan pelatihan 20 JP dan pelatihan penunjang;
- IP ASN menjadi salah satu kegiatan pada SKP Pegawai;
- Pemenuhan Diklat Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)

b. Nilai Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar. Cara perhitungan indikator ini adalah Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Nilai target tahun berjalan pada indikator ini adalah 80 dan capaiannya adalah 96,34 atau sebesar 120,43% dari target.

NILAI DISIPLIN PEGAWAI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) BANJARBARU
TAHUN 2022

No	NAMA	NILAI DISIPLIN												NILAI AKHIR
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Abdul Hair	100	100	99,09	100	100	100	98,10	100	100	100	100	100	99,77
2	Abdul Godir	X	X	X	99,47	100	97,62	98,57	96,82	96,82	97,62	100	98,64	98,40
3	Afandy Bayu Nurcahyo	98,10	96,67	91,82	90,00	90,00	96,19	91,9	97,27	94,55	95,71	97,27	97,73	94,77
4	Andi Gunadi	98,10	100	100	97,37	98,00	100	99,05	99,55	100	99,52	100	99,09	99,22
5	Anhar Firdaus	77,14	100	100	98,42	100	100	100	100	100	100	100	98,64	97,85
6	Arhamsyah	96,19	94,44	92,27	91,05	90,67	98,57	88,1	69,55	98,18	93,81	96,82	96,82	92,21
7	Aslan Prayudi	100	97,22	96,82	96,84	100	100	100	95,68	96,82	100	99,55	99,09	98,50
8	Aurel Widya Wingsih	X	X	100	100	100	100	96,67	93,86	96,82	98,57	99,55	95,45	98,09
9	Bakat	100	100	90,23	95,79	100	97,86	100	100	100	98,1	98,18	98,64	98,23
10	Budi Tri Cahyana	100	98,33	98,18	100	99,33	96,67	95,71	97,27	100	95,71	96,36	98,18	97,98
11	Chatimatun Nisa	100	100	94,55	98,95	98,67	99,05	100	98,64	98,64	100	97,73	97,27	98,63
12	Desi Mustika Amaliyah	97,14	92,78	99,55	96,32	100	94,29	91,9	96,82	94,55	90	95,91	72,27	93,46
13	Devan Surya Adrian	X	X	100	97,89	100	96,19	99,52	100	99,09	97,62	95	97,27	98,26
14	Dewi Susilawati	99,52	100	97,05	97,89	98	100	98,57	100	96,36	95,71	98,64	94,77	98,04
15	Diky Subhanuddin	95,71	99,44	96,36	93,68	91,33	97,62	98,57	85,45	100	97,62	95,91	96,36	95,67
16	Dwi Harsono	100	98,89	96,82	98,95	95,33	99,52	98,57	98,18	98,64	69,52	96,14	98,18	95,73
17	Endang Gembirawati	99,05	100	94,32	99,47	98,67	98,57	97,14	94,55	95,91	100	83,64	97,27	96,55
18	Evy Setiawati	100	50	90	84,21	56	99,05	92,86	89,55	93,18	96,19	94,09	97,27	86,87
19	Faiza Elisa Hasfianti	99,05	100	100	96,84	100	98,1	95,24	98,64	97,73	97,14	80,45	97,27	96,71
20	Farida Hasanah	99,05	99,44	98,18	98,95	94	95,71	94,76	97,73	98,64	73,33	97,27	87,27	94,53
21	Fika Kurniawati	91,67	97,22	94,77	95,79	94	96,67	97,62	85,45	95,45	92,62	95,68	90,45	93,95
22	Fitri Yulianti	100	100	55,45	40	40	76,67	98,57	100	93,64	100	100	95,45	83,32
23	Galang Rohidi	X	X	X	100	98,67	95,24	97,62	100	98,64	94,76	98,64	95,45	97,67
24	Hafiz Atma Sasmita	X	X	X	100	98,67	95,24	95,71	96,82	98,64	94,76	97,73	95,91	97,05
25	Hamian Ihsan	100	100	98,64	96,84	88,67	99,52	99,52	95	84,09	98,57	96,36	97,27	96,21
26	Handrian Syahputra Siregar	100	93,89	94,55	96,32	90,67	96,19	97,14	96,82	96,82	95,71	94,09	97,27	95,79
27	Hanif Iliham Ramadhan Fatriansyah	X	X	X	99,74	94	97,62	96,19	98,64	94,77	99,05	98,64	98,64	97,48
28	Happy Rizky Cindyawati	X	X	X	100	99,33	100	98,57	93,64	100	99,52	99,09	100	98,91
29	Hariaty Tandi Sobon	X	X	X	99,21	99,33	96,67	99,52	99,09	97,27	99,52	99,09	95,45	98,35
30	I Dewa Gede Putra Prabawa	90	90	90	90	90	90	90	90,45	100	100	98,18	88,18	92,23
31	Jojoir Kakanda Purba	X	X	X	100	100	95,95	97,62	100	100	100	98,64	100	99,13
32	Kartika Inderiani	100	100	100	100	100	98,1	100	100	100	98,1	99,09	99,55	99,57
33	Khairul Fauziah Hanisa	X	X	X	100	99,33	99,52	96,19	100	95	100	97,27	99,09	98,49
34	M. Aswar Zulhi	X	X	X	99,47	100	92,86	97,14	94,55	95,45	94,29	95,45	93,64	95,87
35	M. Isa Anshari	99,52	100	99,09	100	98,67	100	99,52	100	100	100	100	97,27	99,51
36	Mangatas Siregar	99,05	99,44	99,09	92,89	95,33	97,14	95,24	95,45	100	94,76	96,82	95,45	96,72
37	Mega Rahmadani	X	X	X	100	97,33	100	100	96,36	97,27	100	100	99,55	98,95
38	Miyono	92,86	100	98,64	100	98	96,67	98,57	93,64	98,64	94,76	97,73	95	97,04
39	Mochamad Fathi Rizqullah	98,1	97,78	94,09	96,32	92	97,62	92,86	94,09	97,73	98,1	93,64	96,36	95,73
40	Mohammad Listanto Baharjo	90	90	90	90	90	90	87,95	95,91	79,05	95,45	98,64	90,58	95,19
41	Muhamad Ridwan	90,48	90,56	94,55	96,84	97,33	95,24	99,52	94,09	91,82	100	95,91	95,91	95,19

No	NAMA	NILAI DISIPLIN												NILAI AKHIR
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
42	Muhammad Kendar Oktansyah	X	X	X	98,16	100	99,05	94,76	97,27	97,27	99,52	97,73	100	98,20
43	Muhammad Khairul Dzakirin	92,38	96,11	95,91	100	89,67	98,57	90,48	97,5	91,36	96,67	98,18	95	95,15
44	Muhammad Khalish Hafiz	98,57	97,78	99,55	97,37	100	96,19	99,52	97,73	88,18	98,64	64,09	94,64	94,64
45	Muhammad Sobirin	93,81	100	100	99,74	90,67	96,67	100	83,64	100	98,1	100	98,18	96,73
46	Muhammad Very Fedriansa	X	X	98,18	95	100	100	99,52	96,82	100	97,62	98,18	99,55	98,49
47	Muntashir Rakhman	92,14	98,89	93,18	88,42	95,33	100	100	100	100	98,1	95,68	98,64	96,70
48	Muses Aprilus	99,52	98,89	92,05	92,11	98	97,62	98,1	91,36	98,64	96,67	97,27	71,82	94,34
49	Nadra Khairiah	99,05	100	98,64	96,32	97,33	96,19	74,29	99,09	99,55	99,52	95,91	59,09	92,92
50	Nazarni Rahmi	99,52	100	99,09	96,32	98,67	96,19	99,52	99,09	96,36	96,19	97,73	96,36	97,92
51	Noor Irawan	98,57	95,56	91,14	91,58	86,67	71,19	93,33	92,73	94,55	92,38	90	96,36	91,17
52	Nurdin	98,1	97,78	95	100	94,67	93,33	95,24	97,27	99,09	96,19	93,64	97,73	96,50
53	Nurhidayati	88,1	86,39	100	99,47	94,67	99,52	93,81	92,73	95	92,86	94,09	96,59	94,44
54	Nurmiatina	99,05	99,44	98,64	98,95	100	95,24	99,52	78,18	95	89,76	96,82	90	95,05
55	Panji Saputra	97,14	98,33	97,73	100	96	98,1	96,67	98,18	99,09	95,71	95,91	95,91	97,40
56	Rais Salim	98,1	100	100	94,47	98,67	98,57	97,62	98,64	98,18	99,52	98,18	98,64	98,38
57	Retno Utami Purbaningtyas	100	100	100	99,47	99,33	95,71	99,05	99,55	87,73	99,05	99,55	98,64	98,17
58	Ridla Nor Hadi	97,14	95,56	100	100	99,33	95,71	96,19	97,27	96,36	97,62	96,36	97,73	97,44
59	Rinne Nintasari	99,52	100	99,55	99,47	72	97,14	97,14	98,64	95,45	99,05	98,18	98,64	96,23
60	Rosnaeni	100	100	100	100	95,33	99,52	99,52	100	98,64	99,52	99,55	99,55	99,30
61	Rufida	100	92,22	98,18	92,11	100	96,19	100	96,82	96,82	80	100	96,82	95,76
62	Saibatul Hamdi	100	100	97,27	99,47	100	95,24	96,67	98,18	98,18	96,19	95,45	99,55	98,02
63	Santy Diah Suryani	40	90	100	100	100	100	100	100	100	99,55	100	99,55	94,09
64	Siti Faridah	100	97,78	97,73	95	100	100	100	99,09	100	100	98,64	99,55	98,98
65	Sri Hidayati	99,52	100	100	100	95,33	99,52	100	99,55	98,64	99,52	95,91	98,64	98,89
66	Taufik Riyadi	100	100	92,27	98,95	98,67	96,67	93,81	93,64	95,45	93,33	90,91	96,82	95,88
67	Vembi Danang Nuryuono	96,67	96,67	94,55	100	100	92,38	98,1	96,82	99,09	100	100	96,82	97,59
68	Wahid Adhi Suryawan	98,1	99,44	96,36	98,95	98,67	99,52	98,57	99,09	99,09	99,52	98,18	99,55	98,75
69	Yanga Perwira	X	X	X	100	96,67	99,52	98,10	95,00	96,82	97,62	94,55	95,45	97,08
70	Yanuarlanto	90,48	97,78	91,59	97,63	85	98,1	97,14	96,36	99,09	100	98,18	94,55	95,49

Banjarbaru, 2 Januari 2023
Kepala BSPJI Banjarbaru

Arhamsyah

Gambar 3.13 Rata-rata Nilai Disiplin Pegawai BSPJI Banjarbaru TA 2022

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja nilai disiplin pegawai dapat memenuhi target tahun berjalan.

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VI.2

Tujuan (T4)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan <i>good governance</i>	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesionalitas	Nilai Disiplin Pegawai	80	96,34	120,43

2. Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Capaian pada TA 2022 mampu memenuhi target tahun berjalan dan juga target jangka menengah pada Renstra Organisasi. Bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 96,17, maka nilai capaian pada tahun ini meningkat atau setara dengan 100,18% dari capaian sebelumnya.

Bila dibandingkan, maka Nilai Disiplin Pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Nilai Disiplin Pegawai	89,18	88,57	90,13	96,17	96,34

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini telah memenuhi target tersebut.

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2021-2022	% Capaian
Nilai Disiplin Pegawai	81	96,34	118,94

Pelaksanaan kegiatan Disiplin Pegawai telah berjalan dengan cukup baik, dengan dibantu Tim Agen Perubahan dalam reminder pegawai agar pegawai tidak lupa login intranet kemenperin dan tercukupi **Jam Kerja Pegawai dalam satu hari (7 ½ jam)**. Sejak pandemi COVID-19, kehadiran pegawai dialihkan dari sidik jari menjadi login pada intranet kemenperin. Akan tetapi memang masih didapati pegawai yang lupa untuk login dan tidak memenuhi jam kerjanya dalam 1 (satu) hari. Perlu diperhatikan bahwa kekurangan jam kerja dalam satu hari akan diakumulasi dalam setahun.



Gambar 3.14 Reminder Absensi Pegawai dari Tim Agen Perubahan dan Bagian Kepegawaian

NOTA DINAS
Nomor : 19 /BSPJI-Banjarbaru/KPII/2023
Tgl. 2 Januari 2023

Berikut Daftar Pegawai BSPJI Banjarbaru dengan keterlambatan login masuk dan tidak login pulang pada bulan Desember 2022.

Keterlambatan Login Masuk			
No.	Pegawai	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Devan Surya Adrian	Pengadministrasi Keuangan	2
2.	Muhamad Ridwan	Pengelola BMN	2
3.	Muntashir Rakhman	Arsiparis	2
4.	Yanuarianto	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2
5.	Fitri Yulianti	Penguji Mutu Barang	1
6.	Khairul Fauziah Hanisa	Perekayasa	1
7.	M. Aswar Zulhi	Penguji Mutu Barang	1
8.	Mangatas Siregar	Analisis Data dan Informasi	1
9.	M. Khairul Dzakirin	Penata Laporan Keuangan	1
10.	Taufik Riyadi	Pengadministrasi Keuangan	1

Tidak Login Pulang			
No.	Pegawai	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Aurel Widya Ningesh	Pranata Keuangan APBN	1
2.	Devan Surya Adrian	Pengadministrasi Keuangan	1
3.	Dewi Susilawati	AMM	1
4.	Fitri Yulianti	Penguji Mutu Barang	1
5.	Hariaty Tandi Sobon	Penguji Mutu Barang	1
6.	M. Aswar Zulhi	Penguji Mutu Barang	1
7.	Mangatas Siregar	Analisis Data dan Informasi	1
8.	Miyono	Perekayasa	1
9.	Muhamad Ridwan	Pengelola BMN	1
10.	Nazarni Rahmi	Pembina Industri	1
11.	Rufida	Penguji Mutu Barang	1
12.	Taufik Riyadi	Pengadministrasi Keuangan	1
13.	Yanuarianto	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1

Kepada atasan langsung masing-masing pegawai agar dilakukan pembinaan. Demikian, harap Nota Dinas ini menjadi perhatian.

Kepala BSPJI Banjarbaru
Arifmasyah

Gambar 3.15 Bukti Pembinaan kepada Pegawai terkait Disiplin Pegawai

3. Kendala

Kendala yang dihadapi selama pencapaian target indikator ini adalah masih terdapat pegawai yang login masuk melebihi batas waktu 07.30 WITA dan tidak login presensi pulang serta jam kerja masing kurang dari 7,5 jam kerja.

4. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil FGD Penyesuaian Indikator Renstra 2021-2022 BSKJI yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2022 di Bekasi, maka diputuskan bahwa **Indikator Nilai Disiplin Pegawai DIHAPUS**. Hal ini dikarenakan, indikator ini dianggap sudah termasuk dalam poin penilaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Akan tetapi walaupun Nilai Disiplin Pegawai sudah tidak menjadi Indikator Renstra, *support system* yang telah BSPJI Banjarbaru terapkan akan dilanjutkan, yaitu reminder kehadiran pegawai.

Menindaklanjuti FGD Biro Organisasi dan SDM dengan seluruh satker pusat dan daerah (18/10), bahwa sedang dibuat Rancangan Keputusan Menteri

Perindustrian tentang ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Lokasi Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) Indikator Kinerja, yaitu :

a. Nilai Minimal Indeks Layanan Publik

Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target indikator kinerja ini pada TA 2022 adalah B. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat BSKJI Nomor 3145/BSKJI.1/LP/XI/2022 Tanggal 1 November 2022 dijelaskan bahwa penilaian dilakukan dengan pengisian *self-assessment*. Adapun format *assessment* pada tahun 2022 telah mengadopsi **PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perubahan dari PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017**. Nilai yang diperoleh BSPJI Banjarbaru berdasarkan hasil *self assessment* yang dilaksanakan oleh Tim Internal diperoleh nilai **4,70 (Kategori A)**. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik dapat memenuhi target pada tahun ini.

Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VII.1

Tujuan (T3)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan layanan publik penunjang pertumbuhan industri	SK 7	Pengutan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	B	A (4,70)	100

Tabel 3.38 Ringkasan Hasil *Self Assessment* Indeks Layanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik	
1	Kebijakan Pelayanan	5.00	24%	1.20	
2	Profesionalisme SDM	4.80	25%	1.20	
3	Sarana dan Prasarana	4.50	18%	0.81	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	4.75	11%	0.52	
5	Konsultasi dan Pengaduan	4.25	10%	0.43	
6	Inovasi	4.50	12%	0.54	
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4.70	
				Kategori	A
				Makna	Pelayanan Prima

2. Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Indikator ini merupakan kategori indikator baru sejak Perjakin TA 2021 dan Renstra 2021-2024 sehingga tidak terdapat nilai pembandingan pada tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan target jangka menengah Renstra yaitu B maka capaian tahun ini dapat memenuhi target tersebut. Sementara itu terdapat Indikator Kinerja berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang dimiliki oleh KEMENPAN-RB yaitu Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik dimana target Tahun 2022 adalah sebanyak 150. Indikator ini merupakan Bagian dari Kegiatan Prioritas (KP) Kemenpan-RB dalam hal Transformasi Pelayanan Publik dan BSPJI Banjarbaru dapat memenuhinya.

Indikator ini merupakan indikator baru sejak Perjakin 2021. Bila dibandingkan, maka Nilai Minimal Indeks Layanan Publik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Pegawai Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	B (3,66)	A (4,70)

Berdasarkan data diatas, maka capaian TA 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini telah memenuhi target tersebut.

Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	B	A	100

Pencapaian target ini tentunya didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi sarana, prasarana, dan SDM yang diselaraskan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik. Selama tahun 2022, BSPJI Banjarbaru telah banyak melakukan pengembangan dan renovasi terhadap sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maupun internal. BSPJI Banjarbaru juga memiliki kontak yaitu nomor telepon

(0511) 4774861 dan nomor Whatsapp 0811 5164 008 sebagai salah satu media komunikasi dengan pelanggan serta beberapa media sosial sebagai berikut :



3. Kendala

Beberapa prioritas untuk menunjang penilaian seperti arena bermain, penitipan helm, mesin antrian, toilet terpisah untuk pelanggan khusus perlu diremajakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Ruang Pelayanan BSPJI Banjarbaru.

4. Rekomendasi

Rencana di tahun anggaran berikutnya adalah melakukan pengembangan terhadap fasilitas penunjang layanan BSPJI Banjarbaru. Selain itu, akan dilakukan rencana Pengembangan SIBIRU 2023 antara lain :

- Menu untuk Surveillance
- Peningkatan Dashboard Layanan
- Perhitungan All SPM By System
- Perform Analisis
- TTE
- Integrasi SIP dan SIBIRU

8. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

a. Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Kegiatan Penilaian SAKIP TA 2021 dilaksanakan pada tanggal 4-8 April 2022 oleh Tim IR III Kemenperin. Kementerian PANRB memodernkan Pedoman Evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PANRB No.88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang efektif digunakan pada tahun 2022. Pembaharuan pedoman ini, dijelaskan oleh Menpan dikarenakan salah satunya adanya upaya penyesuaian perkembangan zaman yang memerlukan adanya automasi. **BSPJI Banjarbaru mendapatkan total nilai 83,15 atau kategori A dan mendapat Peringkat I dari 13 BSPJI di lingkungan BSKJI.**



Gambar 3.16 Penghargaan Nilai SAKIP TA 2021 BSPJI Banjarbaru

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja dapat memenuhi target tahun berjalan.

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.1

Tujuan (T4)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan <i>good governance</i>	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	80	83,15	102,7

2. Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Capaian pada TA 2022 mampu memenuhi target tahun berjalan. Sementara itu, terdapat Indikator Kinerja berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang dimiliki KEMENPAN-RB dimana merupakan koordinator utama penyelenggaraan SAKIP yaitu Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP B ke atas dengan target 98%.

Berdasarkan target RPJMN tersebut, maka capaian BSPJI Banjarbaru mampu mendukung capaian Kementerian Perindustrian dalam memenuhi target tersebut. Bila dibandingkan, maka capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Perbandingan Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	81,14 (A)	78,66 (BB)	82,21 (A)	85,08 (A)	83,15 (A)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini telah memenuhi target tersebut.

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	81	83,15	102,65

Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,08 (A), maka capaian tahun ini menurun. Hal ini salah satunya disebabkan adanya perubahan peraturan dalam penilaian, dimana ketentuan dan kriteria yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa unit kerja dibawah BSKJI mengalami penurunan nilai. Dalam rangka mendukung peningkatan pencapaian akuntabilitas kinerja maka telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan Rapat Monev TERINTEGRASI setiap 1 (Satu) bulan sekali
- INOVASI KINERJA Pengembangan Metode PELAPORAN TERINTEGRASI dengan Tujuan Capaian Kinerja Lebih Termonitoring dan Pengumpulan Data yang Cepat, Periodik, Dan Mudah Diakses
- Pemberian Reward dan Punishment atas dasar kinerja tetap dilakukan dan ditingkatkan
- Nilai Disiplin dan IPA ASN MASUK SKP DAN PERJAKIN INDIVIDU PEGAWAI TA 2022

3. Kendala

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah terjadi perubahan ketentuan peraturan dalam penilaian akuntabilitas kinerja dimana belum ada sosialisasi ataupun bimtek terkait hal ini.

4. Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya antara lain :

- Perlu adanya penyesuaian dokumen perencanaan kinerja, khususnya disesuaikan dengan Dokumen Reviu Renstra 2021-2024
- Perlu adanya penyesuaian Akun Penerimaan PNPB TA 2023 untuk dapat lebih menunjang penggunaan anggaran guna meningkatkan kinerja. Target Akun Penerimaan TA 2023 saat ini hanya berdasarkan Akun 425283 (Layanan Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi).
- Pelaksanaan Pelatihan tentang Pemahaman Evaluasi SAKIP terbaru yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No.88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pembaharuan metode pengumpulan data agar lebih efektif dan efisien lagi serta sesuai dengan permintaan data yang dilakukan oleh BSKJI dan Aplikasi Pelaporan Monitoring lainnya.

b. Nilai Minimal Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

1. Hasil yang Telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

Laporan Keuangan yang menjadi capaian di tahun anggaran 2022

merupakan hasil penilaian Laporan Keuangan TA 2021 yang disusun pada awal tahun 2022. Nilai yang diperoleh BI Banjarbaru adalah 94,40 atau sebesar 104,9% dari target sebesar 90.

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2021 TINGKAT SATUAN KERJA

NO	SATKER	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
1	BARISTAND PALEMBANG	20,00	59,00	3,00	17,00	99,00
2	BARISTAND PONTIANAK	20,00	58,40	3,00	17,00	98,40
3	BBKKP	20,00	58,75	3,00	16,50	98,25
4	BBTPPI	20,00	57,00	3,00	17,00	97,00
5	BARISTAND MANADO	18,00	59,50	3,00	16,00	96,50
6	BDI DENPASAR	20,00	56,25	3,00	17,00	96,25
7	BARISTAND SAMARINDA	20,00	55,50	3,00	17,00	95,50
8	BBKB	20,00	55,50	3,00	17,00	95,50
9	BPPSI PEKANBARU	19,00	56,25	3,00	17,00	95,25
10	BSI	20,00	55,15	3,00	17,00	95,15
11	BBLM	20,00	55,50	3,00	16,50	95,00
12	BBT	20,00	55,00	3,00	17,00	95,00
13	BBIA	20,00	56,90	3,00	15,00	94,90
14	BARISTAND ACEH	20,00	55,50	3,00	16,00	94,50
15	BDI JOGJA	20,00	56,50	3,00	15,00	94,50
16	BARISTAND BANJARBARU	20,00	54,40	3,00	17,00	94,40
17	POLTEK APP	20,00	56,00	3,00	15,00	94,00
18	BARISTAND AMBON	20,00	54,00	3,00	17,00	94,00
19	AKOM SURAKARTA	20,00	55,90	3,00	15,00	93,90
20	BBK	16,00	59,90	3,00	15,00	93,90

Gambar 3.17 Nilai Laporan Keuangan Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator kinerja Nilai Minimal Laporan Keuangan dapat memenuhi target tahun berjalan.

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.2

Tujuan (T4)		Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan <i>good governance</i>	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Minimal Laporan Keuangan	90	94,40	104,89

2. Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Capaian laporan keuangan BSPJI Banjarbaru TA 2021 sebesar 94,40, nilai ini memenuhi target kinerja balai yaitu sebesar 90. Laporan Keuangan TA 2021 BSPJI Banjarbaru sudah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku.

Bila dibandingkan, maka Nilai Minimal Laporan Keuangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	Capaian LK TA. 2018	Capaian LK TA. 2019	Capaian LK TA. 2020	Capaian LK TA. 2021
Nilai Minimal Laporan Keuangan	92,0	95,5	87,03	94,40

Berdasarkan data diatas, maka capaian tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka

menengah renstra maka realisasi dari indikator kinerja ini juga telah memenuhi target tersebut.

Tabel 3.46 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2021-2024

Indikator	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi TA 2022	% Capaian
Nilai Minimal Laporan Keuangan	90	94,40	104,89

Upaya yang telah dilakukan selama tahun berjalan untuk mencapai target, antara lain :

- Pelaksanaan evaluasi dan monitoring realisasi anggaran secara berkala
- Penyusunan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu
- Pelaksanaan PIPK
- Pelaksanaan e-rekonsiliasi sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Kendala

Masih adanya kesalahan dalam penyajian data dalam Penyusunan laporan keuangan sehingga berpengaruh pada pengurangan nilai laporan.

4. Rekomendasi

Rencana tindaklanjut di tahun selanjutnya adalah Menunjuk pegawai yang berbeda dari Pembuat LK untuk membuat telaah LK , dengan harapan proses penelaahan LK dapat dilaksanakan dengan lebih teliti dan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyajian data.

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2021-2024

Berdasarkan Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru TA. 2021-2024, capaian kinerja yang dapat terealisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47

Capaian Kinerja Renstra Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru TA. 2021-2024												
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023	2024	TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2022	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SS1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	100	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	4.00	2.00	50
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1	1	100	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	8.00	3.00	37.5
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri											
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40%	47.75%	119.38	40%	70.9%	283.60	40%	45%	45%	70.90%	157.56
2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1%	39.45%	3945	1%	9.91%	991.00	1%	1%	1%	9.91%	991
3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	N/A	N/A	38	38	100.00	N/A	21	59	38.00	64.41
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	44%	50.22%	114.14	45%	92.21%	204.91	46%	47%	47%	92.21%	196.19
SS4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	3	Dikecualikan dalam Perkin		3	Dikecualikan dalam Perkin		4	4	4	Dikecualikan dalam Perkin	
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5%	100.0%	109.29	92%	100%	108.70	92.5%	93%	93%	100%	107.53
SS5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.50	3.60	102.86	3.50	3.62	103.40	3.60	3.60	3.60	3.62	100.56
SS6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71.0	79.0	111.27	72.0	83.73	116.29	72.0	73.0	73	83.73	114.70
2	Nilai disiplin pegawai	79.0	96.17	121.73	80	96.34	120.43	80	81	81	96.34	118.94
SS7	Penguatan Layanan Publik											
1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	B	100	B	A	100	B	B	B	A	100
SS8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	85.08	105.04	81	83.15	102.7	81	81	81	83.15	102.65
2	Nilai minimal laporan keuangan	90	87.3	97	90	94.40	104.9	90	90	90	94.40	104.89

1. Hasil yang telah dicapai

Pada umumnya target tahun berjalan dapat dicapai. Namun terdapat target yang tidak bisa dicapai pada tahun berjalan antara lain :

a. Nilai minimal indeks manajemen resiko

Selama kurun waktu satu tahun ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada TA 2022 yaitu :

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

- d. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
- e. Rata-rata indeks profesionalitas ASN
- f. Nilai disiplin pegawai
- g. Nilai minimal indeks layanan publik
- h. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
- i. Nilai minimal laporan keuangan

Sedangkan indikator yang tidak mencapai target jangka menengah antara lain :

- a. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri **(target merupakan nilai akumulasi dari tahun 2021 – 2024)**
- b. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri **(target merupakan nilai akumulasi dari tahun 2021 – 2024)**
- c. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri **(target merupakan nilai akumulasi dari tahun 2021 – 2024)**
- d. Nilai minimal indeks manajemen resiko **(dikecualikan pada Perkin TA 2022)**

2. Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Analisa hasil capaian Indikator Kinerja yang masuk dalam Perjanjian Kinerja TA 2022 telah disampaikan pada pembahasan poin sebelumnya. Seluruh indikator kinerja BSPJI Banjarbaru pada Perjanjian TA 2022 telah memenuhi target tahun berjalan. Hal ini berkat adanya dukungan dari SDM, anggaran, manajemen, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penyusunan perencanaan yang baik, penganggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Semua indikator kinerja pada Renstra merupakan Indikator Kinerja pada TA 2022. Namun terdapat 1 (Satu) indikator yang tidak dimasukkan pada Perjanjian Kinerja TA 2022. Terkait indikator kinerja tersebut akan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini :

a. Nilai minimal indeks manajemen resiko

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.

Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Pada tahun sebelumnya, indikator ini selaras dengan Nilai Minimal Tingkat Maturitas SPIP. SPIP telah mendapatkan pengembangan sistem dari BPKP menjadi New SPIP.

Pada tahun 2022, penilaian dan pengumpulan data dukung untuk MRI telah dilaksanakan oleh unit satker secara mandiri namun tidak dikeluarkan nilai secara resmi oleh tim penilai. Meskipun begitu, selama TA 2022 BSPJI Banjarbaru tetap melakukan monitoring dan evaluasi risiko karena telah mengintegrasikan Lembar Kertas Kerja Risiko SPIP dengan Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM). Tata cara penyusunan dan pemantauannya, khususnya 5 (Lima) risiko terbesar telah dimasukkan pada sebuah prosedur di SMM.

3. Kendala

Belum adanya kejelasan terkait penilaian MRI untuk tingkat unit satker meskipun sejak TA 2021 secara rutin sudah melakukan penilaian secara mandiri dan pengumpulan data dukung.

4. Rekomendasi

Rencana tindak lanjut di tahun berikutnya adalah terus berupaya meningkatkan kinerja dengan segala sumber daya yang tersedia agar peluang untuk terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dapat berjalan dengan baik. Hal ini mengingat dari tahun ke tahun target terus meningkat. Selain itu, untuk indikator yang masih belum tercapai agar dilakukan perhatian khusus dan koordinasi lebih lanjut.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 REALISASI ANGGARAN KEUANGAN (RM)

a) Hasil Yang Telah Dicapai

Anggaran untuk menunjang kegiatan BSPJI Banjarbaru tahun 2022 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan DIPA Nomor nomor 019-07.2.247232/2022 tanggal 17 November 2021, sebesar Rp.13.784.031.000,-. Namun setelah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan nilai pagu anggaran naik dan turun, maka pagu anggaran terakhir adalah pada Revisi DIPA ke-12 sesuai DIPA No. : SP DIPA-019.07.2.247232/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan nilai Rp.15.382.687.000,-. Sampai dengan saat ini, telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 12 (Dua Belas) kali. Revisi dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengefisiensikan penggunaan sumber daya anggaran guna mendukung tercapainya indikator kinerja, selain juga karena mengikuti arahan sesuai aturan yang berlaku. Revisi tersebut, antara lain:

2. **Revisi Pertama** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 15 Desember 2021.

Ini merupakan kategori revisi DIPA Kesatu.

Tujuan : Revisi ini dilakukan sesuai arahan Presiden dalam rangka memitigasi dampak belanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19 melalui pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) pada pembayaran Tunjangan Kinerja ke-14.

3. **Revisi Kedua** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 14 Februari 2022. Ini merupakan kategori revisi DIPA Kedua.

Tujuan : Revisi kedua ini merupakan Revisi dalam Rangka Pagu Tetap, di mana hanya terjadi pergeseran pagu anggaran antar Rincian Output (RO) dan optimalisasi pagu anggaran Belanja Modal (53) di mana dengan pagu yang sama, volume belanja 53 bertambah sebanyak 36 Unit untuk Layanan Sarana dan Prasarana Internal (pembelian kursi kerja).

4. **Revisi Ketiga** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 13 April 2022. Ini merupakan kategori revisi DIPA Ketiga. Revisi ketiga ini merupakan Revisi dalam Rangka Pagu Tetap yang mana terjadi pergeseran pagu anggaran antar KRO yang bersumber dari PNPB dan sedikit revisi pada operasional perkantoran.

Tujuan : Adapun fokus revisi ini adalah untuk menambah anggaran sampling yang mulai menipis, dikarenakan perubahan peraturan dari Dinas LHK yang

mensyaratkan bahwa sampel uji harus disampling oleh pihak yang menguji, sehingga terjadi peningkatan signifikan untuk kegiatan pengambilan contoh uji di BSPJI Banjarbaru, yang mengakibatkan anggaran sampling menjadi kurang.

5. **Revisi Keempat** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 13 Mei 2022. Ini merupakan kategori revisi DIPA Keempat.

Tujuan : Revisi keempat ini dilakukan karena adanya perpanjangan untuk penyesuaian Halaman III DIPA.

6. **Revisi Kelima** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 8 Juli 2022 melalui Kanwil DJPb.

Tujuan : Merupakan kategori Revisi DIPA Dalam Rangka Pagu Berubah yang dilakukan karena adanya keperluan pergeseran pagu anggaran, khususnya untuk persiapan menghadapi Semester II tahun 2022. Sehingga, perlu adanya efisiensi dan optimalisasi pada anggaran yang didasarkan oleh hasil evaluasi kinerja di Semester I.

7. **Revisi Keenam** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 13 Oktober 2022 melalui DJA yang mana kategori revisi DIPA Keenam ini merupakan Revisi Dalam Rangka Pagu Berubah.

Tujuan : Karena adanya pengurangan pagu anggaran, yaitu penghapusan anggaran blokir AA pada pagu anggaran BSPJI Banjarbaru sebesar Rp.300.104.000,- dimana pagu anggaran menjadi **Rp13.483.927.000,-**.

8. **Revisi Ketujuh** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 24 Oktober 2022 melalui Kanwil DJPb. Merupakan revisi DIPA Ketujuh.

Tujuan : Revisi ketujuh ini merupakan Revisi dalam Rangka Pagu Berubah, di mana penerimaan PNBSPJI Banjarbaru telah berlebih dari targetnya. Diperoleh tambahan pagu PNBSPJI tahap pertama sebesar Rp. 406.000.000 yang digunakan untuk menambah pagu anggaran sampling dan belanja bahan kimia yang sudah habis, sehingga dari penambahan ini diperhitungkan akan cukup hingga akhir tahun dan layanan pengujian BSPJI Banjarbaru dapat berjalan sesuai target maksimal. Alokasi ini sesuai dengan tujuan dari penggunaan kelebihan PNBSPJI yaitu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pagu anggaran BSPJI Banjarbaru pada revisi ketujuh ini menjadi sebesar **Rp.13.889.927.000,-**.

9. **Revisi Kedelapan** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 2 November 2022 melalui DJA. Merupakan kategori revisi DIPA Kedelapan.

Tujuan : Revisi kedelapan ini merupakan Revisi dalam Rangka Pagu Berubah yaitu penambahan dan pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai di lingkungan

kerja satker BSKJI. Kekurangan ini terjadi karena terjadi penambahan jumlah pegawai baru (CPNS) yang cukup banyak di BSPJI Banjarbaru untuk tahun 2022, yaitu sebanyak 15 CPNS. Di mana pada revisi ini, BSPJI Banjarbaru memperoleh tambahan pagu 51 sebesar Rp. 1.148.704.000. Pagu anggaran BSPJI Banjarbaru pada revisi kedelapan ini menjadi sebesar **Rp.15.038.631.000,-**.

10. **Revisi Kesembilan** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 22 November 2022 melalui Kanwil DJPb.

Tujuan : Revisi ini merupakan kategori revisi DIPA Kesembilan yang merupakan Revisi Dalam Rangka Pagu Berubah yaitu penggunaan kelebihan PNPB dari Target Tahap Kedua. Di mana pada tahap kedua ini kelebihan penerimaan PNPB yang dapat digunakan sebesar Rp.344.056.000, yang dialokasikan untuk menambah belanja operasional perkantoran, penambahan pengadaan sarana dan prasarana internal perkantoran dan penambahan anggaran pelatihan. Alokasi ini sesuai dengan tujuan dari penggunaan kelebihan PNPB yaitu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pagu anggaran BSPJI Banjarbaru pada revisi kesembilan ini menjadi sebesar **Rp.15.382.687.000,-**.

11. **Revisi Kesepuluh** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kanwil DJPb.

Tujuan : Revisi Kesepuluh ini merupakan Revisi DIPA dalam Rangka Pagu Tetap, yang mana tidak ada pergeseran antar KRO maupun perubahan volume, bertujuan untuk efisiensi sisa-sisa anggaran kegiatan yang telah selesai, agar dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dalam mencapai target realisasi. Akan tetapi, karena terdapat perubahan pada Hal III DIPA yang mengakibatkan revisi ini masuk kategori DIPA yaitu Pemutakhiran POK melalui Kanwil DJPb akan tetapi tidak terhitung revisi karena hanya sebatas Revisi Administrasi.

12. **Revisi Kesebelas** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Kanwil DJPb.

Tujuan : Revisi Kesebelas ini merupakan Revisi Pemutakhiran POK, yang mana tidak ada pergeseran antar KRO maupun perubahan volume, pergeseran pada revisi ini hanya antar sub komponen, akan tetapi karena revisi ini mengubah HAL III DIPA, sehingga harus melalui DIPA.

13. **Revisi Keduabelas** : DIPA-019.07.247232/2022R, pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Pemutakhiran KPA.

Tujuan : Revisi Keduabelas ini merupakan Revisi Pemutakhiran KPA, yang mana tidak ada pergeseran antar KRO, perubahan volume, dan tidak ada perubahan

pada HAL III DIPA.

Realisasi hingga 31 Desember 2022 adalah **Rp.15.300.838.329,-** dari total anggaran sebesar **Rp.15.382.687.000** atau setara 99,47 persen yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp.11.675.954.000,-** (realisasi **Rp.11.601.819.151,-** atau setara **99,37** persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp3.706.733.000,-** (realisasi **Rp3.699.019.178,-** atau setara **99,79** persen). Adapun target penerimaan DIPA awal dari Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BSPJI Banjarbaru sebesar **Rp3.110.000.000,-**. Sementara itu, dikarenakan adanya penggunaan kelebihan perolehan PNBP maka target akhir menjadi sebesar **Rp3.900.000.000,-** dengan realisasi penerimaan sesuai akun target sebesar **Rp4.700.997.750,-** atau setara **151,16** persen jika dibandingkan dengan target awal dan **120,54** persen jika dibandingkan dengan target akhir.

Realisasi berdasarkan Renstra BSPJI Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48

Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru TA. 2021-2024														
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023	2024	TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SS1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas														
1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	66.150.000,00	66.150.000,00	66.043.290,00	99,84	129.429.000,00	129.429.000,00	129.421.567,00	99,99	125.110.000,00	125.410.000,00	446.099.000,00	195.579.000,00	195.464.857,00	99,94
SS2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	93.550.000,00	93.550.000,00	90.320.291,00	96,55	Gabung SS1				Gabung SS1	Gabung SS1	93.550.000,00	93.550.000,00	90.320.291,00	96,55
SS3 Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri														
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI
2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1.592.753.000,00	1.841.569.000,00	1.824.940.736,00	99,10	1.660.905.000,00	1.660.905.000,00	1.658.513.243,00	99,86	1.376.257.000,00	1.591.063.000,00	6.220.978.000,00	3.502.474.000,00	3.483.453.979,00	99,84
3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	248.816.000,00	N/A	N/A	N/A	231.622.000,00	231.622.000,00	229.049.427,00	98,89	308.260.000,00	306.290.000,00	1.094.988.000,00	231.622.000,00	229.049.427,00	99,84
4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	1.445.510.000,00	1.445.510.000,00	1.442.853.201,00	99,82	875.000.000,00	875.000.000,00	869.938.350,00	99,42	719.160.000,00	2.890.000.000,00	5.929.670.000,00	2.320.510.000,00	2.312.791.551,00	99,67
SS4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
1 Nilai minimal indeks manajemen resiko	76.580.000,00	76.580.000,00	76.531.300,00	99,94	82.616.000,00	139.166.000,00	139.046.283,00	99,91	14.879.000,00	16.500.000,00	190.575.000,00	215.746.000,00	215.577.583,00	99,92
2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker					56.550.000,00				79.400.000,00	80.000.000,00	215.950.000,00			99,45
SS5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan														
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	379.350.000,00	379.350.000,00	377.260.395,00	99,45	229.571.000,00	229.571.000,00	229.318.049,00	99,89	225.355.000,00	428.045.000,00	1.262.321.000,00	608.921.000,00	606.578.444,00	99,62
SS6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional														
1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	158.630.000,00	158.630.000,00	156.200.590,00	98,47	220.182.000,00	220.182.000,00	219.799.285,00	99,83	197.390.000,00	205.500.000,00	781.702.000,00	378.812.000,00	375.999.875,00	99,26
2 Nilai disiplin pegawai	7.236.039.000,00	7.236.039.000,00	7.216.279.688,00	99,73	8.583.000.000,00	8.583.000.000,00	8.515.553.478,00	99,21	9.411.192.000,00	11.749.910.000,00	36.980.141.000,00	15.819.039.000,00	15.731.833.166,00	99,45
SS7 Penguatan Layanan Publik														
1 Nilai minimal indeks layanan publik	3.364.069.000,00	3.364.069.000,00	3.333.210.077,00	99,08	8.583.000.000,00	8.583.000.000,00	8.515.553.478,00	99,21	3.297.735.000,00	3.989.750.000,00	19.234.554.000,00	11.947.069.000,00	11.848.763.555,00	99,18
SS8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi														
1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.886.000,00	80.886.000,00	80.368.748,00	99,36	17.174.000,00	17.174.000,00	17.149.332,00	99,86	52.760.000,00	55.000.000,00	205.820.000,00	93.550.000,00	2.312.791.551,00	99,84
2 Nilai minimal laporan keuangan														

Sedangkan realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2022 :

Tabel 3.49

REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU TA. 2022									
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Komponen/ Sub Komponen	Anggaran		
							PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100	Lembaga Teknologi Industri	129,429,000	129,421,567	99.99
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100	Lembaga Teknologi Industri			
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40 Persen	70,9 Persen	283,6	DAPATI			
		2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1 Persen	9,91 Persen	991	Layanan Pengujian	1,552,899,000	1,552,702,555	99.99
						Pengelolaan Limbah	62,396,000	62,173,688	99.64
						Layanan Sertifikasi	30,400,000	30,400,000	100.00
						Layanan Pelatihan Teknis	15,210,000	13,237,000	87.03
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	38 Ruang Lingkup	100	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	51,872,000	51,754,861	99.77
						Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	61,960,000	61,915,670	99.93
						Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	40,560,000	38,200,000	94.18
						Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	42,330,000	42,330,000	100.00
						Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	34,900,000	34,848,896	99.85
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	92,21 Persen	204,91	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	268,000,000	267,223,000	99.71
						Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	295,675,000	294,834,200	99.72
						Pengadaan Alat Perkantoran	186,325,000	185,031,150	99.31
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	100 Persen	108,7	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	125,000,000	122,850,000	98.28
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,62 Indeks	103,4	Pembangunan Zona Integritas	61,166,000	61,090,496	99.88
						SPIP	21,450,000	21,450,000	100.00
						Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja	56,550,000	56,505,787	99.92
						Pengembangan Sistem Informasi	60,200,000	60,155,000	99.93
						Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	135,811,000	135,605,282	99.85
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	83,73 Indeks	116,29	Penerbitan Majalah/Jurnal	33,560,000	33,557,767	99.99
						Renovasi Gedung Tidak Bertingkat			
						Pengelolaan SDM	29,710,000	29,661,218	99.84
						Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	119,192,000	118,908,367	99.76
						Diklat Motivasi	71,280,000	71,229,700	99.93
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100	Gaji dan Tunjangan	8,583,000,000	8,515,553,478	99.21
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83,15	102,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,296,638,000	3,293,049,315	99.89
						Penyusunan Rencana Program BSPJI Banjarbaru	7,174,000	7,166,832	99.90
						Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	10,000,000	9,982,500	99.83
						Evaluasi Program/Kegiatan BRSBB			
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	94,40	104,9	Evaluasi Program/Kegiatan BRSBB			
TOTAL							15,382,687,000	15,300,838,329	99.47

Pada awal Tahun Anggaran 2022 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan BSPJI Banjarbaru Per Triwulan, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.50
Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan TA 2022

Kegiatan/ KRO/ Sub Komponen	Anggaran	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Realisasi
		Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
		T	R	T	R	T	R	T	R	
6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri	1,841,569,000									1,824,940,736
A Layanan Pengujian	1,470,393,000	21	21.3	48	45.5	73	72.7	100	99.4	1,462,148,000
B Pengelolaan Limbah	88,680,000	0	0	20	14.9	76	76.4	100	91.7	81,286,000
A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	110,145,000	0	0	31	7.4	27	40.7	100	99.5	109,623,075
B Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	40,783,000	0	0	26	22.5	35	34.7	100	100	40,767,470
A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	23,740,000	0	0	30	24.9	79	78.8	100	99.9	23,710,791
A Layanan Sertifikasi	22,800,000	6	5.6	28	28.4	44	44.5	100	98.6	22,490,000
A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065	74,148,000	0	0	51	47.8	89	70.6	100	100	74,135,400
A Layanan Pelatihan Teknis	10,880,000	0	0	0	0	33	33.3	100	99.1	10,780,000
6077.RAB Sarana Bidang Kesehatan	180,120,000									179,069,000
A Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	180,120,000	0	0	0	0	0	0	100	99.4	179,069,000
6080.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	309,350,000									307,320,395
A Diseminasi Layanan Jasa Industri	148,533,000	0	0	15	0	25	25.3	100	99.7	148,153,550
B Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	149,897,000	0	0	13	8.3	22	21.9	100	98.9	148,252,845
C Kajian Teknologi Industri	10,920,000	0	0	55	55.5	55	55.5	100	99.9	10,914,000
6080.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	50,525,000									50,476,100
A Optimalisasi Teknologi Proses Pengereng Bahan	38,975,000	0	0	97	0	97	97.4	100	99.9	38,949,000
B Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan	11,550,000	0	0	95	0	95	95.5	100	99.8	11,527,100
6080.DDI Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	66,150,000									66,043,290
A Penguatan Sentra HKI Baristand Industri Banjarbaru	20,550,000	0	0	37	37	44	43.6	100	99.5	20,450,000
B Kajian Lembaga Teknologi Industri	45,600,000	0	0	23	15.1	38	37.7	100	100	45,593,290
6042.EAA Layanan Perkantoran	10,307,108,000									10,256,893,765
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7,236,039,000	18	21.3	49	48.3	72	75.1	100	99.7	7,216,279,688
A Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	99,000,000	24	24.5	48	41.7	74	73.9	100	99.7	98,736,000
B Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter)	58,028,000	3	3.4	85	81.3	88	88.2	100	100	58,014,800
C Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	5,551,000	0	0	0	0	100	99.8	100	99.8	5,538,500
D Perbaikan Peralatan Kantor	525,026,000	14	14	84	72.4	70	70.2	100	99.7	523,375,650
E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	65,000,000	3	2.9	7	5.6	21	20.8	100	100	64,988,864
F Perawatan Sarana Gedung	511,356,000	0	0.1	55	38	92	91.8	100	99.9	510,923,140
G Langganan Daya dan Jasa	249,060,000	22	22.4	46	45.6	71	71.2	100	98.9	246,408,484
H Jasa Keamanan/Kebersihan	504,770,000	13	19.2	53	39.3	67	73	100	100	504,770,000
I Keselamatan Kerja	21,100,000	0	0	57	56.9	67	66.8	100	99.9	21,086,000
J Jasa Pos dan Informasi	80,740,000	18	18.1	36	35.8	58	58.4	100	85.2	68,799,260
K Keperluan Perkantoran	222,946,000	15	15	42	34.1	71	70.7	100	99.8	222,571,500
L Operasional Perkantoran dan Pimpinan	404,002,000	13	12.7	41	30.6	63	62.8	100	97.1	392,392,958
M Kegiatan untuk Penanganan COVID-19	94,700,000	43	43	43	40.2	47	46.9	100	99.1	93,668,921
N Jasa Keamanan/Kebersihan Outsourcing	229,790,000	16	15.5	41	37.9	68	68.8	100	99.8	229,340,000
6042.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	270,491,000									266,684,239
A Penyusunan Program Baristand Industri Banjarbaru	8,746,000	0	0	62	0	0	0	100	97.7	8,546,000
A Evaluasi Program/Kegiatan BRSBB	38,890,000	0	0	0	0	0	0	100	99.9	38,859,948
B Evaluasi Jabatan Fungsional	33,250,000	0	0	53	17.2	70	70.2	100	99.1	32,962,800
A Pengembangan Sistem Informasi	70,000,000	0	0	14	10.7	93	92.8	100	99.9	69,940,000
A Pembangunan Zona Integritas dan SPIP	35,880,000	0	0	53	31.2	61	61.2	100	100	35,862,800
B Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	40,700,000	0	0	24	18	68	67.5	100	99.9	40,668,500
A Penerbitan Majalah/Jurnal	43,025,000	10	10.1	20	14.3	24	23.8	100	92.6	39,844,191
6042.EAD Layanan Sarana Internal	1,265,390,000									1,263,784,201
A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	186,090,000	72	72.4	100	99.8	100	99.8	100	99.8	185,653,600
A Pengadaan Alat Laboratorium Udara	764,000,000	0	0	0	9	100	99.9	100	99.9	763,369,090
B Pengadaan Alat Laboratorium	140,500,000	0	0	99	0	100	100	100	99.7	140,101,500
C Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	174,800,000	8	8.4	62	62.2	74	74.2	100	99.9	174,660,011
6042.EAE Layanan Prasarana Internal	293,000,000									292,396,000
A Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Roda 2	99,000,000	6	5.7	95	95.5	100	99.9	100	99.9	98,912,000
B Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	194,000,000	4	4.4	4	4.4	100	95.2	100	99.7	193,484,000
6042.EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	158,630,000									156,200,590
A Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	88,630,000	5	4.9	13	17.9	19	23.7	100	97.4	86,310,190
B Diklat Motivasi Pegawai	70,000,000	0	0	0	0	0	0	100	99.8	69,890,400

Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2022

Kegiatan/ KRO/ Sub Komponen		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
6077.AEF	Sosialisasi Dan Diseminasi	265.240.000	265.026.849	99,92
A	Pelaksanaan Promosi Dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	135.811.000	135.605.282	99,85
B	Lembaga Teknologi Industri	129.429.000	129.421.567	99,99
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	1.752.901.000	1.748.210.086	99,73
A	Layanan Pengujian	1.552.899.000	1.552.702.555	99,99
A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	51.872.000	51.754.861	99,77
A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	61.960.000	61.915.670	99,93
A	Layanan Sertifikasi	30.400.000	30.400.000	100,00
A	Pemeliharaan Dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	40.560.000	38.200.000	94,18
A	Layanan Pelatihan Teknis	15.210.000	13.237.000	87,03
6077.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	268.000.000	267.223.000	99,71
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	268.000.000	267.223.000	99,71
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.973.398.000	11.902.315.560	99,41
A	Pengembangan Sistem Informasi	60.200.000	60.155.000	99,93
A	Penerbitan Majalah/jurnal	33.560.000	33.557.767	99,99
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	8.583.000.000	8.515.553.478	99,21
A	Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	112.200.000	111.909.600	99,74
B	Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honorarium Dokter)	56.560.000	56.555.000	99,99
C	Perbaikan Peralatan Kantor	331.296.000	331.217.907	99,98
D	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	84.110.000	84.099.412	99,99
E	Perawatan Sarana Gedung	492.392.000	492.359.405	99,99
F	Langganan Daya Dan Jasa	289.380.000	287.975.460	99,51
G	Jasa Administrasi/layanan	301.500.000	301.500.000	100,00
H	Keselamatan Kerja	27.350.000	27.312.450	99,86
I	Jasa Pos Dan Informasi	95.488.000	95.177.966	99,68
J	Kegiatan Untuk Penanganan Covid-19	34.908.000	34.844.320	99,82
K	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	962.394.000	961.483.195	99,91
L	Jasa Keamanan	284.124.000	283.678.600	99,84
M	Jasa Kebersihan	224.936.000	224.936.000	100,00
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	607.000.000	602.715.350	99,29
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	295.675.000	294.834.200	99,72
A	Pengadaan Alat Perkantoran	186.325.000	185.031.150	99,31
A	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	125.000.000	122.850.000	98,28
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	220.182.000	219.799.285	99,83
A	Pengelolaan Sdm	29.710.000	29.661.218	99,84
A	Pendidikan/pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Sdm	119.192.000	118.908.367	99,76
B	Diklat Motivasi Pegawai	71.280.000	71.229.700	99,93
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	295.966.000	295.548.199	99,86
A	Penyusunan Program Baristand Industri Banjarbaru	7.174.000	7.166.832	99,90
A	Evaluasi Program/kegiatan Brsbb	56.550.000	56.505.787	99,92
A	Pembangunan Zona Integritas	61.166.000	61.090.496	99,88
B	SPIP	21.450.000	21.450.000	100,00
C	Pemeliharaan Dan Pengembangan Smm Iso 37001	42.330.000	42.330.000	100,00
A	Pemeliharaan Dan Pengembangan Smm Iso 9001	34.900.000	34.848.896	99,85
B	Pengelolaan Limbah	62.396.000	62.173.688	99,64
A	Penyelenggaraan Kearsipan	10.000.000	9.982.500	99,83
TOTAL		15.382.687.000	15.300.838.329	99,47

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada TA 2022 secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Analisis Efisiensi Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan target dan capaian Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) serta pagu dan realisasi anggaran tahun 2022, maka dapat dihitung efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.52 Efisiensi Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No.	KRO	KRO		Anggaran		Rasio Realisasi Anggaran terhadap Realisasi KRO	Rasio Pagu Anggaran terhadap Target KRO	Perbandingan	% Efisiensi	Rata-rata % Efisiensi
		Target	Realisasi	Pagu	Realisasi					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)=(3)/(1)	(7)=(5)/(6)	(8)= 1-(7)*100%	
1	6077.AEF	100	130	265,240,000	265,026,849	2,038,668.07	2,652,400	0.769	23.14%	16.27%
2	6077.BAD	114	481	1,752,901,000	1,748,210,086	3,634,532.40	15,376,325	0.236	76.36%	
3	6077.CAH	4	4	268,000,000	267,223,000	66,805,750.00	67,000,000	0.997	0.29%	
4	6042.EBA	2	2	11,973,398,000	11,902,315,560	5,951,157,780.00	5,986,699,000	0.994	0.59%	
5	6042.EBB	130	130	607,000,000	602,715,350	4,636,271.92	4,669,231	0.993	0.71%	
6	6042.EBC	140	160	220,182,000	219,799,285	1,373,745.53	1,572,729	0.873	12.65%	
7	6042.EBD	6	6	295,966,000	295,548,199	49,258,033.17	49,327,667	0.999	0.14%	

Pada kolom “Efisiensi” terlihat bahwa semua efisiensi KRO bernilai positif yang dapat diartikan bahwa **pagu anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target dapat digunakan secara optimal**, bahkan beberapa realisasi volume melebihi dari target KRO sehingga hal inilah yang memunculkan nilai efisiensi positif. Secara keseluruhan, berdasarkan penggunaan sumber daya anggaran, rata-rata efisiensi yang dilakukan oleh Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru adalah sebesar 16,27%.

2. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 nilai kinerja BSPJI Banjarbaru adalah sebesar 88,04 (Baik). Dari *dashboard* tersebut didapatkan informasi bahwa terdapat efisiensi pada pelaksanaan anggaran Satker TA 2022 dengan nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar 3,35%. Perolehan nilai efisiensi pada aplikasi SMART memiliki nilai yang berbeda dengan nilai efisiensi pada poin 1. Hal ini dikarenakan formulasi perhitungan yang digunakan juga berbeda, namun beberapa poin-poin yang digunakan dalam perhitungan sama seperti target dan realisasi KRO, serta pagu dan realisasi anggaran. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah **nilai efisiensi yang ditunjukkan sama-sama bernilai positif**. Hal ini menunjukkan bahwa pagu anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang ada.

Tabel 3.53 Nilai Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJA

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi
1	539081	BSPJI SAMARINDA	99,7	99,49	98,61	100	20
2	539053	BSPJI PADANG	99,52	97,77	98,57	100	20
3	015118	BSPJI JAKARTA	99,11	96,41	97,04	100	20
4	417912	BSPJI PEKANBARU	97,6	99,64	98,26	100	17,14
5	248920	BSPJI PALEMBANG	97,06	94,23	86,92	100	20
6	247225	BSPJI MEDAN	92,73	88,74	98,42	100	11,75
7	539074	BSPJI PONTIANAK	91,33	90,18	83,94	100	13,3
8	247211	BSPJI SURABAYA	90,45	99,6	99,85	100	6,74
9	247403	BBSPJI HPMM	89,51	99,53	98,78	100	5,7
10	248035	BSKJI	89,25	98,67	99,18	100	5,35
11	247246	BSPJI MANADO	89,11	95,38	96,63	100	6,26
12	247157	BBSPJI KMN	89,1	95,9	98,69	100	5,64
13	247199	BBSPJI KKP	88,5	97,45	99,42	100	4,4
14	247232	BSPJI BANJARBARU	88,04	99,47	99,96	100	3,35
15	247204	BBSPJI KB	87,58	99,04	99,76	100	2,81
16	248042	BBSPJIT	87,37	98,47	99,58	100	2,66
17	248145	BSPJI AMBON	87,19	98,06	97,29	100	3,04
18	247136	BBSPJIA	86,94	97,81	99,38	100	2,19
19	248060	BBSPJILM	86,1	96,73	87,12	100	4,29
20	248056	BBSPJIS	85,49	98,36	87,05	100	3,22
21	248124	BSPJI BANDA ACEH	85,12	99,89	87,03	100	2,5
22	539060	BSPJI LAMPUNG	84,91	90,4	66,68	99,26	9,13
23	247140	BBSPJIBBT	83,88	98,36	67,03	100	6,07
24	412528	BBSPJIKFK	82,73	99,76	99,98	93,99	-0,47
25	247161	BBSPJPPI	74,43	98,08	99,43	85,58	-6,58

3. Analisis Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program

Berdasarkan capaian target Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Realisasi Fisik Kegiatan (Sub Komponen) dari penyerapan anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54 Pencapaian Target Kinerja Satker TA 2022

No	Dokumen Kinerja	Capaian Rata-rata	Jumlah IK	IK Tercapai	IK Tidak Tercapai	Rasio Tingkat Keberhasilan IK 2022
TAHUN ANGGARAN 2022						
1	Perjanjian Kinerja	195.06%	13	13	0	100.00%
2	Rencana Strategis	195.06%	14	13	0	92.86%
3	Indikator Kinerja Utama	296.59%	6	6	0	100.00%
4	Realisasi Fisik	100.00%	-	-	-	100.00%
	Rata-rata	196.68%	33	32	0	96.97%

Berdasarkan tabel diatas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2022 adalah 96,97%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat target Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen TA 2022 yang tidak tercapai, walaupun rata-rata capaian mencapai 196,68%. Terdapat Indikator Kinerja terkait Nilai Minimal Indeks

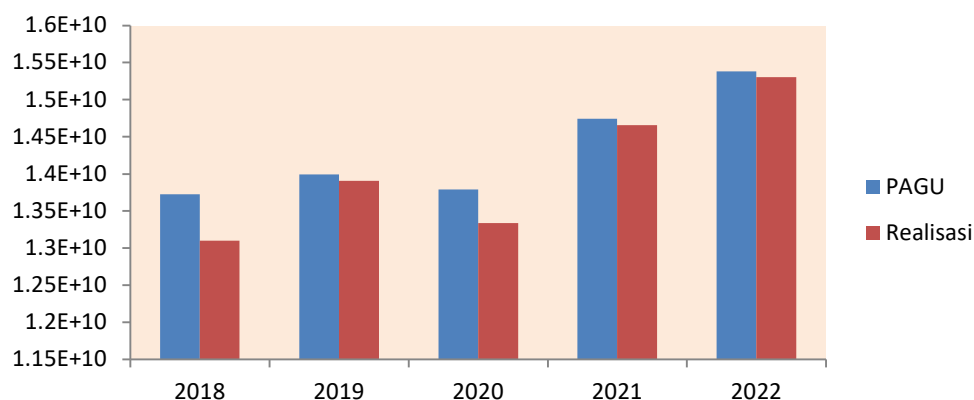
Manajemen Risiko yang dikecualikan pada Perjanjian Kinerja TA 2022, namun masih menjadi indikator kinerja pada Renstra. Penjelasan terkait hal tersebut sudah diuraikan pada poin sebelumnya di poin sebelumnya.

b) Analisa Hasil yang Telah Dicapai

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja 5 (lima) tahun sebelumnya, berikut tabel dan grafiknya:

Tabel 3.55
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2018 - 2022

Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2018 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
PAGU	Rp13,727,360,000	Rp13,992,240,000	Rp13,791,929,000	Rp14,742,333,000	Rp15,382,687,000
Realisasi	Rp13,099,876,166	Rp13,902,686,980	Rp13,334,781,689	Rp14,654,984,345	Rp15,300,838,329
% Realisasi	95.43	99.36	96.69	99.41	99.47



Realisasi keuangan TA 2022 tidak mencapai target 100%, namun masih memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Nomor 3427/BSKJI.1/PR/XII/2022 pada tanggal 26 Desember 2022 dari Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yaitu mampu mencapai realisasi diatas 96,62%. Realisasi keuangan TA 2022 merupakan realisasi keuangan tertinggi selama kurun waktu 5 Tahun Terakhir dengan nilai pagu anggaran tertinggi pula. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki disamping kondisi aktivitas yang berangsur membaik pasca pandemi Covid-19.

c) Kendala

- 1) Besaran pagu pada awal perencanaan dianggarkan berlebih sebagai dana antisipasi. Namun pada akhir tahun realisasi kegiatan dapat terealisasi dengan baik tanpa perlu menggunakan dana antisipasi tersebut. Selain itu juga, pagu anggaran belanja pegawai yang salah satunya tergantung dari peraturan pemerintah dan besaran jumlah pegawai satker serta golongan/pangkat/jabatan pegawai tersebut.

- 2) Adanya peraturan batas akhir realisasi anggaran dan terbatasnya besaran GU Nihil dari KPPN Kementerian Keuangan sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan terbatas pada anggaran tersebut.

d) Rekomendasi

Hasil realisasi anggaran merupakan hasil kerja sama dari seluruh elemen di BSPJI Banjarbaru. Para pihak yang terkait terutama para pejabat yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat melakukan evaluasi dan analisis dari kendala yang dihadapi pada tahun anggaran ini sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di tahun berikutnya. Terutama kegiatan pengadaan dimana persiapan pengadaan diharapkan dapat segera diproses di awal tahun berikutnya agar direalisasikan lebih cepat.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan (PNBP)

a) Hasil yang Telah Dicapai

Anggaran belanja BSPJI Banjarbaru terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan target penerimaan PNBP dari Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yaitu Akun 425283 (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian) dan Akun 425421 (Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan) mengalami perubahan dari target PNBP sesuai DIPA Awal TA 2022 yaitu sebesar Rp3.110.000.000,-. Sementara itu, dikarenakan adanya penggunaan kelebihan perolehan PNBP maka target akhir menjadi sebesar **Rp3.900.000.000,-** dengan realisasi penerimaan sesuai akun target sebesar **Rp4.700.997.750,-** atau setara 151,16 persen jika dibandingkan dengan target awal dan 120,54 persen jika dibandingkan dengan target akhir. Realisasi Anggaran kegiatan BSPJI Banjarbaru, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.56 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP Tahun 2022

Penerimaan		
Target Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.110.000.000,-	4.700.997.750,-	120,54
Target Akhir (Rp)		%
3.900.000.000,-		151,16
Penggunaan		
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.706.733.000.-	3.699.019.178.-	99,79

Target Awal PNBP TA 2022 mengalami kenaikan yang tidak banyak dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penentuan target PNBP 2022 dilakukan pada akhir tahun

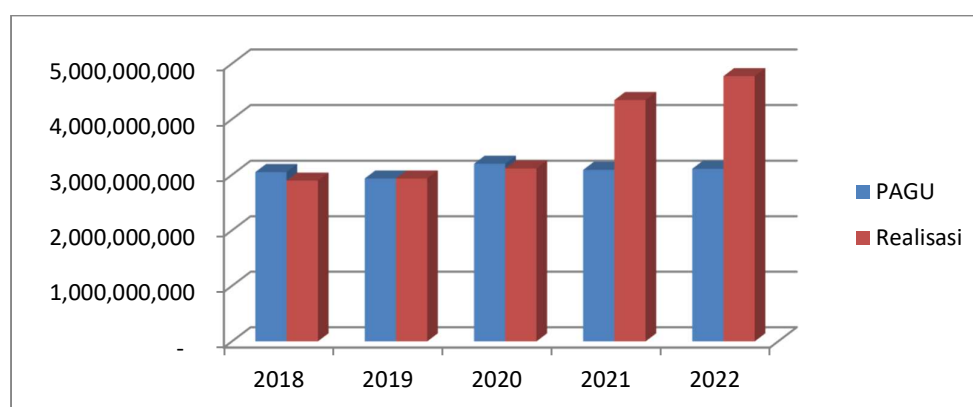
2020 yang pada saat itu kondisi pandemi COVID-19 masih cukup tinggi, sehingga target yang ditentukan pun nampak realistis. Namun, secara umum capaian PNBPA TA 2022 BSPJI Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- **PNBP Semua Layanan Jasa**, termasuk akun 425692 (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi) sebesar **Rp4.775.397.750,-**
- **PNBP secara keseluruhan sesuai dengan OMSPAN**, termasuk akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan); akun 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin); dan akun 425911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu) sebesar **Rp4.905.799.388,-**

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Tabel 3.57 Realisasi PNBPA Layanan Jasa Tahun 2018-2022

Pagu (1)	2018	2019	2020	2021	2022
Target Penerimaan (Rp)	3.050.000.000	2.934.445.000	3.200.000.000	3.090.000.000	3.110.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	2.896.130.000	3.167.167.500	3.115.625.000	4.344.636.000	4.775.397.750
Realisasi Penerimaan (%)	94,95%	107,93%	97,36%	139,45	153,55
Realisasi Penggunaan (Rp)	2.582.660.815	2.765.539.658	2.743.598.345	3.264.768.281	3.699.019.178
Realisasi Penggunaan (%)	89,07	99,13%	94,62%	99,07	99,79
Target Penggunaan (Rp)	2.899.635.000	2.789.775.000	2.899.635.000	3.295.345.000	3.706.733.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	2.753.350.791	3.011.026.142	2.962.024.687	3.295.345.000	3.706.733.000



Perolehan PNBPA TA 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari Rp4.344.636.000,- menjadi Rp4.775.397.750,- atau meningkat sekitar 9,91%. Demikian pula, realisasi penggunaan PNBPA adalah sebesar Rp3.699.019.178,- atau setara 99,79% meningkat Rp434.250.897,- atau sebesar 13,3% dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan dan penggunaan ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 5 Tahun terakhir. Kondisi

aktivitas yang terus berangsur membaik pasca Covid-19 dan perubahan kebijakan terkait pengujian lingkungan cukup berpengaruh pada capaian tahun ini.

Tabel 3.58

Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2018-2022

No	Jenis JPT	PNBP/BLU (Rp. 000)					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Riset	0	Rp 26,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26,500,000
2	Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	Rp 46,000,000	Rp 108,000,000	Rp 35,900,000	Rp 24,800,000	Rp 74,400,000	Rp 289,100,000
3	Pengujian	Rp 2,737,630,000	Rp 2,942,167,500	Rp 2,934,225,000	Rp 4,205,636,000	Rp 4,445,802,250	Rp 17,265,460,750
4	Konsultansi	0	Rp -	Rp 35,000,000	Rp -	Rp 42,000,000	Rp 77,000,000
5	Standardisasi	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Kalibrasi	0	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000	Rp 1,108,000	Rp 3,108,000
7	Sertifikasi	Rp 112,500,000	Rp 90,000,000	Rp 98,500,000	Rp 112,200,000	Rp 212,087,500	Rp 625,287,500
8	RBPI	0	Rp -	Rp 12,000,000	Rp -	Rp -	Rp 12,000,000
9	Lainnya	0	Rp 500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500,000
Total		Rp 2,896,130,000	Rp 3,167,167,500	Rp 3,115,625,000	Rp 4,344,636,000	Rp 4,775,397,750	Rp 18,298,956,250

Realisasi PNBP Semua Layanan Jasa selama 5 tahun sebesar Rp18.298.956.250,- dan paling banyak dihasilkan dari jenis JPT Pengujian Rp17.265.460.750,-. Hal ini sejalan dengan tupoksi BSPJI Banjarbaru dimana salah satunya kegiatan utamanya adalah Layanan Jasa Pengujian.

Tabel 3.59

Jumlah Pelanggan Tahun 2018-2022

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Litbang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	7	3	32	24	241	158	301	266	24	10
3	Pengujian	214	133	252	168	215	196	219	219	214	232
4	Kalibrasi	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2
5	Konsultansi	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
6	Sertifikasi	111	0	16	0	16	0	20	0	25	0
7	RBPI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adapun perkembangan jumlah sampel/ alat/ sertifikat/ pelatihan (Bimbingan Teknis)/ Konsultansi Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.60
Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Konsultasi Tahun 2018-2022

No.	Jenis JPT	Jumlah Smpel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Konsultasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Litbang (Jumlah Litbang PNBPN)	0	1	0	0	0
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	0	0	1	0	0
3	Pelatihan/ Bimbingan Teknis					
	a) Jumlah Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	2	5	7	11	7
	b) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	10	56	399	567	34
4	Pengujian					
	a) Jumlah Pelanggan	347	420	411	438	446
	b) Jumlah Sampel Uji	6847	7843	6792	6269	6380
5	Konsultasi/Supervisi (Jumlah Konsultasi/ Supervisi)	0	0	1	1	3
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a) Jumlah pelanggan	0	0	1	1	2
	b) Jumlah alat	0	0	1	4	7
7	Sertifikasi					
	a) Jumlah pelanggan	9	6	16	20	25
	b) Jumlah Sertifikat	6	5	16	19	20

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang diuji mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan.

Jumlah pelatihan SDM Industri yang diadakan menurun dibanding tahun sebelumnya dimana capaian TA 2021 adalah sebanyak 11 Pelatihan. Pada TA 2022, BSPJI Banjarbaru telah menyelenggarakan 7 (Tujuh) Bimbingan Teknis SDM Industri. Penurunan ini disebabkan karena adanya beberapa pelatihan yang diselenggarakan secara gratis oleh BSKJI yang bekerjasama dengan unit satker. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.61
Data Bimbingan Teknis (Pendampingan Industri) SDM Industri TA 2022

No	Judul Pelatihan	Jadwal Pelaksanaan	Total Peserta	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (DIPA)	7-9 Maret 2022	5	OFFLINE (Berbayar)
2	Bimbingan Teknis Pengujian AMDK Sesuai SNI Uji Mikrobiologi	28-30 Maret 2022	2	OFFLINE (Berbayar)
3	Bimbingan Teknis Analisis Proksimat	6 - 8 September 2022	2	OFFLINE (Berbayar)
4	Bimbingan Teknis Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (DIPA)	14-15 September 2022	2	OFFLINE (Berbayar)
5	Bimbingan Teknis Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (DIPA)	10-11 November	11	OFFLINE (Berbayar)
6	Bimbingan Teknis Pengujian AMDK Sesuai SNI Uji Mikrobiologi	5-6 Desember	2	OFFLINE (Berbayar)
7	Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel Air, Pengujian Laboratorium, serta Verifikasi dan Validasi Metode Uji	12-14 Desember	10	OFFLINE (Berbayar)

Sementara itu kegiatan layanan sertifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Total sebenarnya terdapat 25 pelanggan yang telah dilayani, dimana 6 (enam) merupakan **pelanggan baru**. Tahun 2022 ini, BSPJI Banjarbaru menerbitkan 5 (Lima) SPPT SNI untuk Ruang Lingkup AMDK sehingga total SPPT SNI yang diterbitkan adalah sebanyak 20 dan 10 Surat Keputusan Lanjut Sertifikasi. Keseluruhan klien berasal dari industri di Kalimantan Selatan. Kegiatan layanan sertifikasi selama TA 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.62

Data Kegiatan Layanan Sertifikasi TA 2022

No	Nama Perusahaan	Jenis SNI
1	PT. Air Telaga Surya	Air Mineral
2	PT. Bandangantirta Agung, Kab Banjar	Air demineral
3	PT. Pulau Baru Makmur	Air Mineral
4	PT. Haji Maming Alma Batulicin	Air Mineral
5	CV. Berkat Giat	Garam konsumsi beryodium
6	CV. Amalia Mandiri Utama	Garam konsumsi beryodium
7	CV. Bumi Indah	Garam konsumsi beryodium
8	PT. Varia Inti Tirta	Air Mineral
9	CV. DUA TIGA DUA	Air Mineral
10	PT. Panen Embun Kemakmuran	Air Mineral
11	PT. Mandrapurna Aditama	Air Mineral
12	PT. Tirta Abadi Mas Indah	Air Mineral
13	PT. Sariguna Primatirta Tbk	Air Mineral dan Air Demineral
14	UD Tanjung Garam Raya	Garam konsumsi beryodium
15	CV Berkat Aulia	Air Mineral
16	PT. Bandangantirta Agung	Air demineral
17	PT. Pancuran Kaapit Sendang	Air Mineral
18	PT. Kalimantan Food Industry	Air Mineral
19	BUMDES Sejahtera	Air Mineral
20	PT Gerbang Rahajeng Indah Alami	Air Mineral
21	CV. Hijrah Jaya Abadi	Air Mineral
22	CV Ridho Antasari	Air Mineral
23	YPI Hidayatullah	Air Mineral
24	PT Tri Industri Alami	Air Mineral
25	CV Dwi Jaya Putera	Garam konsumsi beryodium

c) Kendala

Adanya ketentuan dimana perolehan PNBP dari akun diluar target DIPA tidak bisa digunakan sebagai bagian dari pagu anggaran. Selain itu, terdapat 1 (Satu) Pelatihan Mikrobiologi yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan pelanggan belum bisa mengirimkan peserta dari perusahaannya untuk mengikuti pelatihan tersebut

d) Rekomendasi

Rencana di tahun selanjutnya guna mendukung tercapainya PNBP antara lain:

- Meningkatkan partisipasi aktif dari semua pegawai BSPJI Banjarbaru untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran jasa;
- Memperluas promosi tentang kemampuan BSPJI Banjarbaru baik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

- Meningkatkan kemampuan BSPJI Banjarbaru supaya dapat memperluas ruang lingkup layanan jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dokumen Laporan Kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran 2022, yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan selama kurun waktu tahun 2022 dan perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja 2022 ini telah memuat penetapan kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala BSKJI dan Kepala BSPJI Banjarbaru. Secara garis besar, realisasi kinerja BSPJI Banjarbaru adalah baik. BSPJI Banjarbaru dengan total pegawai sebanyak 89 orang baik PNS maupun Non PNS mampu memberikan hasil kinerja yang bisa dibilang lebih baik dari tahun sebelumnya. **Capaian realisasi anggaran dan perolehan PNBPN juga meningkat dan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.**

Perolehan nilai SAKIP TA 2021 yang dilaksanakan penilaiannya di TA 2022 memberikan hasil yang baik yaitu **Peringkat I (Satu)** untuk tingkat Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri di Kemenperin. Pengembangan sarana dan prasarana serta inovasi lainnya khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan selama TA 2022. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,62 atau setara 103,4% dari target 3,5.

2. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Terdapat 1 parameter yang gagal diakreditasi dari 32 parameter pengujian yang diajukan yaitu parameter NO (Komoditi Emisi Sumber Tidak Bergerak);
- b. Tidak semua pengadaan barang dan/atau jasa bisa menggunakan PDN, hal ini dikarenakan masih adanya keterbatasan kualitas dan/ataupun ketersediaan sesuai spesifikasi yang diperlukan;
- c. Proses tindaklanjut hasil pemeriksaan audit kinerja BSPI Banjarbaru pada tahun 2022 ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tim penerima hasil tindaklanjut berbeda dengan tim yang melakukan audit sehingga dalam pemeriksaan hasil tindak lanjut temuan audit diperlukan waktu untuk koordinasi antara penerima hasil tindak lanjut dan auditor;

- d. Belum adanya sosialisasi dari pusat terkait Aplikasi SAPK secara lebih detail sehingga dalam analisa terhadap cara kerja sistem dalam menilai data yang telah input dilakukan balai sesuai pemahaman masing-masing. Selain itu, beberapa pegawai yang telah berstatus JFT belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya;
- e. Beberapa prioritas untuk menunjang penilaian seperti arena bermain, penitipan helm, mesin antrian, toilet terpisah untuk pelanggan khusus belum tersedia di Ruang Pelayanan BSPJI Banjarbaru;
- f. Masih adanya kesalahan dalam penyajian data dalam Penyusunan laporan keuangan sehingga berpengaruh pada pengurangan nilai laporan
- g. Belum adanya kejelasan terkait penilaian MRI untuk tingkat unit satker meskipun sejak TA 2021 secara rutin sudah melakukan penilaian secara mandiri dan pengumpulan data dukung;
- h. Adanya ketentuan dimana perolehan PNPB dari akun diluar target DIPA tidak bisa digunakan sebagai bagian dari pagu anggaran

3. Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi untuk kedepannya antara lain :

- b. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TIM OTIPK akan dilakukan pembahasan dari aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit teknologi untuk dapat diambil di kegiatan kolaborasi, peran balai, dan/ataupun lainnya. Selain itu, tim melakukan penelaahan terkait program yang dijalankan di tahun 2022 (DAPATI) untuk bisa di tingkatkan dan dikerjasamakan untuk kegiatan Tahun 2023;
- c. Memperbanyak referensi atas produk-produk yang sudah PDN khususnya tkdn agar pemilihan produk barang/jasa pada proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat;
- d. Meningkatkan koordinasi antara bagian program, bagian keuangan PPK, dan/ataupun bagian terkait lainnya dalam penyusunan program dan penganggaran sehingga bisa menentukan perencanaan serta pelaporan kinerja yang lebih baik lagi;
- e. Penertiban dokumentasi pelaporan hasil pelatihan oleh pegawai kepada bagian kepegawaian sekaligus monitoring untuk pemenuhan pelatihan 20 JP dan pelatihan penunjang;
- f. Meskipun Nilai Disiplin Pegawai sudah tidak menjadi Indikator Renstra, *support system* yang telah BSPJI Banjarbaru terapkan akan dilanjutkan, yaitu reminder kehadiran pegawai;

- g. BSPJI Banjarbaru berkomitmen terus berupaya meningkatkan jenis layanan dalam upaya memberikan dukungan bagi para pelaku industri agar makin produktif dan berdaya saing;
- h. Meningkatkan partisipasi aktif dari semua pegawai BSPJI Banjarbaru untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran jasa.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arhamsyah

Jabatan: Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Doddy Rahadi

Jabatan: Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

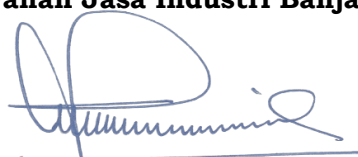
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2022

**Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri**

Doddy Rahadi

**Kepala Balai Standardisasi Dan
Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru**



Arhamsyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40	Persen
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1,0	Persen
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38	Ruang Lingkup
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45,0	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,0	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72	Indeks
		2	Nilai disiplin pegawai	80	Nilai
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	Nilai
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Total Anggaran Tahun 2022 : Rp. 13.784.031.000,00

(Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Doddy Rahadi

Jakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru


Arhamsyah

**REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU TA. 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Komponen/ Sub Komponen	Anggaran		
							PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100	Lembaga Teknologi Industri	129.429.000	129.421.567	99,99
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100	Lembaga Teknologi Industri			
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40 Persen	70,9 Persen	283,6	DAPATI			
		2 Meningkatkan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1 Persen	9,91 Persen	991	Layanan Pengujian	1.552.899.000	1.552.702.555	99,99
						Pengelolaan Limbah	62.396.000	62.173.688	99,64
						Layanan Sertifikasi	30.400.000	30.400.000	100,00
						Layanan Pelatihan Teknis	15.210.000	13.237.000	87,03
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	38 Ruang Lingkup	100	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	51.872.000	51.754.861	99,77
						Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	61.960.000	61.915.670	99,93
						Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	40.560.000	38.200.000	94,18
						Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	42.330.000	42.330.000	100,00
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	92,21 Persen	204,91	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	34.900.000	34.848.896	99,85
						Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	268.000.000	267.223.000	99,71
						Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	298.675.000	294.834.200	99,72
						Pengadaan Alat Perkantoran	186.325.000	185.031.150	99,31
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	100 Persen	108,7	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	125.000.000	122.850.000	98,28
						Renovasi Zona Integritas	61.166.000	61.090.498	99,88
						SPIP	21.450.000	21.450.000	100,00
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,62 Indeks	103,4	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja	56.550.000	56.505.787	99,92
						Pengembangan Sistem Informasi	60.200.000	60.155.000	99,93
						Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	135.811.000	135.605.282	99,85
						Penerbitan Majalah/Jurnal	33.560.000	33.557.767	99,99
6	Terwujudnya ASN BSK.JI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	83,73 Indeks	116,29	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	29.710.000	29.661.218	99,84
						Pengelolaan SDM	119.192.000	118.908.367	99,76
						Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	71.280.000	71.229.700	99,93
						Diklat Motivasi	8.583.000.000	8.515.553.478	99,21
7	Penguatan Layanan Publik	2 Nilai disiplin pegawai	80	96,34	120,43	Gaji dan Tunjangan	3.296.638.000	3.293.049.315	99,89
		1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.174.000	7.166.632	99,90
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83,15	102,7	Penyusunan Rencana Program BSK.JI Banjarbaru	10.000.000	9.982.500	99,83
						Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan			
						Evaluasi Program/Kegiatan BRSEBB			
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	94,40	104,9	Evaluasi Program/Kegiatan BRSEBB			
TOTAL							15.382.687.000	15.300.838.329	99,47

Banjarbaru, 10 Februari 2023
Kepala BSP.JI Banjarbaru,

(Signature)
Arhamsyah

REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2022

UNIT ORGANISASI : BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU							
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV	
						% Fisik	
						S	R
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100%	100	100
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	100	100
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40 Persen	70,9 Persen	283,6 %	100	100
		2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1 Persen	9,91 Persen	991%	100	100
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	38 Ruang Lingkup	38 Ruang Lingkup	100%	100	100
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	92,21 Persen	204,91 %	100	100
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	100 persen	108,7 %	100	100
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,62 Indeks	103,4 %	100	100
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	83,73 Indeks	116,29 %	100	100
		2 Nilai disiplin pegawai	80	96,34	120,43 %	100	100
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100%	100	100
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83,15	102,7 %	100	100
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	94,40	104,9 %	100	100

Banjarbaru, 10 Februari 2023

Kepala BSPJI Banjarbaru,



Arhamsyah

Capaian Kinerja Renstra Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023	2024	TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2022	%
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SS1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	100	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	4.00	2.00	50
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1	1	100	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	8.00	3.00	37.5
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri											
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40%	47.75%	119.38	40%	70.9%	283.60	40%	45%	45%	70.90%	157.56
2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1%	39.45%	3945	1%	9.91%	991.00	1%	1%	1%	9.91%	991
3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	N/A	N/A	38	38	100.00	N/A	21	59	38.00	64.41
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	44%	50.22%	114.14	45%	92.21%	204.91	46%	47%	47%	92.21%	196.19
SS4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	3	Dikecualikan dalam Perkin		3	Dikecualikan dalam Perkin		4	4	4	Dikecualikan dalam Perkin	
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5%	100.0%	109.29	92%	100%	108.70	92.5%	93%	93%	100%	107.53
SS5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.50	3.60	102.86	3.50	3.62	103.40	3.60	3.60	3.60	3.62	100.56
SS6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71.0	79.0	111.27	72.0	83.73	116.29	72.0	73.0	73	83.73	114.70
2	Nilai disiplin pegawai	79.0	96.17	121.73	80	96.34	120.43	80	81	81	96.34	118.94
SS7	Penguatan Layanan Publik											
1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	B	100	B	A	100	B	B	B	A	100
SS8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	85.08	105.04	81	83.15	102.7	81	81	81	83.15	102.65
2	Nilai minimal laporan keuangan	90	87.3	97	90	94.40	104.9	90	90	90	94.40	104.89

Banjarbaru, 10 Februari 2023
Kepala BSPJI Banjarbaru, **3**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANJARBARU
DENGAN
IKM BERKAT MOTEKAR DESA PEMUDA KABUPATEN TANAH LAUT PELAIHARI
TENTANG
PENGEMBANGAN ALAT PENERING MENGGUNAKAN KONTROL SUHU

NOMOR : B 317/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/HK/II/2022
NOMOR : 05/BM-DP/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian nota kesepahaman antara :

1. **Budi Setiawan, S.T., M.M.**, Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panglima Batur Barat No 2 Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA."
 2. **Momo Aris Sumaryana**, selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKM " Berkat Motekar " yang berkedudukan di Jalan Boer Anwar RT.006 RW. 002 Desa Pemuda Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";
- Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK.
 - Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan alat pengering menggunakan kontrol suhu, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Landasan, azas dan Tujuan

1. Perjanjian kedua belah pihak ini berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kesepakatan ini berdasarkan azas kerjasama yang menguntungkan yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling mendukung untuk peningkatan kuantitas dan kualitas.
3. Nota kesepakatan ini dibuat dengan tujuan untuk pemanfaatan hasil optimalisasi teknologi yang dilaksanakan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru. Hasil optimalisasi teknologi ini agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pada IKM yang berkecimpung dalam usaha industri pangan, dalam hal ini penggunaan alat pengering menggunakan kontrol suhu, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

- a. Uji coba dan Evaluasi performa alat
 1. Uji coba alat pengering menggunakan kontrol suhu
 2. Evaluasi hasil
 3. Perbaikan proses sesuai hasil evaluasi
- b. Monitoring performa alat

Pasal 3

Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat nota kesepakatan ini dengan masa berlaku perjanjian selama 12 bulan.

Lain-Lain

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan selalu diupayakan untuk diselesaikan oleh kedua belah Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini memahami dan melaksanakan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) SNI ISO 37001:2016 yang telah diterapkan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru.
4. Surat Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing Pihak memegang 1 (satu) rangkap.

Pasal 5

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Balai Riset Dan Standardisasi Industri
Banjarbaru



Budi Setiawan, ST.MM
NIP. 19800804 200312 1 007

PIHAK KEDUA,
IKM "Berkat Motekar"
Pelaihari



Momo Aris Sumaryana

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kab. Tanah Laut



Masturi S. STP
NIP. 19970705 199612 1 004

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
DENGAN
IKM BYHAF DESA TIRTA JAYA KEC. BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT PELAIHARI
TENTANG
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PRODUK SAMPING VCO
DAN OPTIMALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI PADA PRODUK JAHE

NOMOR : B 478/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/HK/III/2022

NOMOR : 05/Byhaf.TJy/III/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian nota kesepahaman antara :

1. **Budi Setiawan, S.T., M.M.**, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panglima Batur Barat No 2 Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA."
 2. **Yulia Purnama Mukti**, selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKM "BYHAF" yang berkedudukan di Jalan Merdeka RT.03 RW. 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";
- Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK.
 - Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendampingan pengembangan produk samping VCO dan optimalisasi penerapan teknologi pada produk jahe, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Landasan, azas dan Tujuan

1. Perjanjian kedua belah pihak ini berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kesepahaman ini berdasarkan azas kerjasama yang menguntungkan yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling mendukung untuk peningkatan kuantitas dan kualitas.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pemanfaatan hasil optimalisasi teknologi yang dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Untuk masyarakat khususnya pada IKM yang berkecimpung dalam usaha industri pangan, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK setuju untuk meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan hasil produksi dari hasil pengembangan produk VCO dan optimalisasi penerapan teknologi pada produk jahe, tukar menukar informasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3

Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat nota kesepahaman ini dengan masa berlaku perjanjian selama 12 bulan.

Pasal 4

Lain-Lain

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan selalu diupayakan untuk diselesaikan oleh kedua belah Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini memahami dan melaksanakan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) SNI ISO 37001:2016 yang telah diterapkan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.
4. Surat Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing Pihak memegang 1 (satu) rangkap.

Pasal 5

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Industri
Banjarbaru



Budi Setiawan, ST.MM
NIP. 19800804 200312 1 007

PIHAK KEDUA,
IKM BYHAF
Pelaihari



Yulia Purnama Mukti

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
DENGAN
IKM RABITA KELURAHAN PALAM KECAMATAN CEMPAKA
KOTA BANJARBARU
TENTANG
PENDAMPINGAN OPTIMALISASI
PENERAPAN TEKNOLOGI PADA PRODUK TAS SASIRANGAN

NOMOR : B 996/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/HK/V/2022

NOMOR : B 001/RABITA/H.A/V/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian nota kesepahaman antara :

1. **Budi Setiawan, S.T., M.M.**, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panglima Batur Barat No 2 Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA."
 2. **Ita Purnama Sari**, selaku Pimpinan sekaligus pemilik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKM " RABITA " yang berkedudukan di : Jalan Palam Raya RT. 01 RW. 01 Sungai Rancah Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";
- Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK.
 - Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendampingan optimalisasi penerapan teknologi pada produk tas sasisangan, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

L. M:

Pasal 1

Landasan, azas dan Tujuan

1. Perjanjian kedua belah pihak ini berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kesepahaman ini berdasarkan azas kerjasama yang menguntungkan yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling mendukung untuk peningkatan kuantitas dan kualitas.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pemanfaatan hasil optimalisasi teknologi yang dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Untuk masyarakat khususnya pada IKM yang berkecimpung dalam usaha industri kerajinan, peningkatan sumber daya manusia, tukar menukar informasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK setuju untuk meningkatkan sumber daya manusia, efisiensi waktu dan biaya produksi, optimalisasi penerapan teknologi pada produk tas sasingan, tukar menukar informasi dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3

Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat nota kesepahaman ini dengan masa berlaku perjanjian selama 12 bulan.

Pasal 4

Lain-Lain

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan selalu diupayakan untuk diselesaikan oleh kedua belah Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

h.w:

3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini memahami dan melaksanakan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) SNI ISO 37001:2016 yang telah diterapkan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.
4. Surat Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing Pihak memegang 1 (satu) rangkap.

Pasal 5

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri L.
Banjarbaru



Budi Setiawan, ST.MM
NIP. 19800804 200312 1 007

PIHAK KEDUA,
IKM Rabita R.
Banjarbaru



Ita Purnama Sari



LAPORAN AKHIR

KONSULTANSI TEKNOLOGI PRODUKSI KULIT LUMPIA

Untuk Program DAPATI pada
IKM KULIT LUMPIA BERUNTUNG

Oleh :

Ketua : Hamlan Ihsan, S.Si
Anggota : Dr. Nazarni Rahmi, STP, M.Si
: Saibatul Hamdi, S.Hut, MP
: Rais Salim, S.Hut
: Nadra Khairiah, S.Si
: Devan Surya Adrian, A.Md.Ak

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian

2022

Executive Summary

Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang sangat banyak mulai dari makanan berat ringan hingga jajanan pasar, salah satunya adalah lumpia, jika di Semarang terkenal dengan lumpia gorengnya maka di Kalimantan Selatan juga memiliki jajanan seperti pisang karamel, molen, dan olahan2 lainnya yang berbahan dasar dari kulit lumpia. Proses pembuatan kulit lumpia terbilang sederhana dimana bahan utamanya adalah tepung terigu dan beberapa bahan tambahan lain.

Proses produksi kulit lumpia setelah kita lihat langsung di IKM Kulit Lumpia Beruntung Banjarmasin, memiliki titik kritis pada proses pengadonan yang tergantung dari konsistensi adonan, keterampilan SDM dalam hal pencetakan, dan juga suhu plat cetakan yang harus stabil. Kegiatan konsultasi teknologi proses produksi kulit lumpia yang dilaksanakan pada TA. 2022 melalui program DAPATI ini akan memberikan pengembangan dalam bentuk peralatan yang dapat mempermudah, mempercepat, dan menjamin mutu serta konsistensi adonan, kemudian selain itu juga berdasarkan titik kritis yang diamati akan dilakukan juga penambahan teknologi pengatur suhu otomatis pada plat cetakan kulit lumpia tersebut.

Program DAPATI yang telah dilaksanakan pada IKM Kulit Lumpia Beruntung ini selain dsambut baik oleh pemilik IKM juga telah memberikan dampak berupa nilai produktivitas yang meingkat, dimana ditandai dari jumlah produksi yang awalnya hanya 10.000 lembar per hari menjadi 30.000 lembar per hari. Selain itu juga jumlah karyawan yang awalnya hanya 14 orang menjadi 20 orang. Kemudian secara efesiensi IKM Kulit Lumpia Beruntung memberikan data bahwa penggunaan gas LPG mampu dihemat 50% per harinya hasil dari penambahan kontrol suhu otomatis. Dari hasil peningkatan ini IKM Kulit Lumpia Beruntung optimis dapat memenuhi permintaan pasar dan dapat lebih berkembang lagi sebagai pionir usaha kulit lumpia yang ada di Kalimantan Selatan.



LAPORAN AKHIR

KONSULTANSI TEKNIS PENGEMBANGAN DESAIN DAN MUTU PRODUK RAJUT DI IKM NAJWA BANJARBARU

**untuk Program DAPATI pada
IKM Najwa Banjarbaru**

Oleh:

Ketua : Nurhidayati
Anggota : Desi Mustika Amaliyah
Hamlan Ihsan
Dwi Harsono
Faiza Elisa Hasfianti
Khairul Fauziah Hanisa

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Badan Standarisasi Dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian

2 0 2 2

EXECUTIVE SUMMARY

IKM rajut menjadi sektor yang memiliki potensi dan peluang besar untuk semakin berdaya saing di kancah nasional hingga global. IKM Najwa Banjarbaru merupakan produsen tas dan dompet rajut serta pernik souvenir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang memerlukan pendampingan pengembangan desain dan mutu produk. Tujuan program DAPATI di IKM Najwa Banjarbaru adalah mengembangkan desain produk rajut yang bernuansa lokal Indonesia, mengembangkan produk bernilai tambah dengan menggunakan teknik baru yaitu tenun, dan meningkatkan mutu produk rajut melalui proses quality control yang lebih baik. Kegiatan jasa konsultasi yang akan diberikan adalah pelaksanaan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan IKM Najwa Banjarbaru, pendampingan penjaminan mutu produk rajut, bimbingan teknis desain dan tenun menggunakan kartu, pendampingan pengembangan produk, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengujian serta pelaporan. Bimbingan Teknis Desain dan Tenun Menggunakan Kartu telah dilaksanakan di Banjarbaru, 9-11 Agustus 2022 dengan narasumber praktisi desain Mentari WP dan praktisi tenun Anastasia Kartika S. Melalui kegiatan pendampingan DAPATI, IKM Najwa Banjarbaru memiliki 7 ragam motif baru; mengembangkan produk baru yaitu tali tas dengan teknik tenun kartu serta telah mampu mengaplikasikan teknik tenun kartu tersebut di alat tenun boardloom sesuai wawasan yang diberikan selama kegiatan konsultasi; memiliki proses QC yang lebih baik melalui ketersediaan rekaman; meningkatkan kecepatan produksi pada bagian pembuatan tali tas sebesar 66,67%; meningkatkan jumlah produk dari sebelum konsultasi sebesar 53,42%; dan layak investasi berdasarkan perhitungan teknoekonomi yaitu NPV 5 tahun = 115.226.671,31 (NPV>1); IRR = 53,176 (IRR>12, asumsi rate 12%); BCR = 1,465 (BCR>1); ROI NT = 46 % (sebelum pajak); ROI T = 33 % (asumsi pajak 30%). IKM Najwa Banjarbaru diharapkan dapat melaksanakan penjaminan mutu secara kontinu dengan tools yang telah diberikan selama jasa konsultasi berlangsung, terus mengembangkan pola/motif/warna bagi produknya dan terus meningkatkan keahlian dalam bidang tenun dan rajut melalui workshop dan pelatihan.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKHIR
Konsultansi Peningkatan Manajemen Produksi dan Nilai
Jual Produk Bumbu Instan di IKM

untuk Program DAPATI pada
IKM HALAL FEAST

Ketua	: Dr. Nazarni Rahmi, S.TP, M.Si.
Anggota	: Dr. Evy Setiawati, S.Si, MT Nurhidayati, S.Si., M.T. Desi Mustika Amaliyah, ST., MT Nadra Khairiah, S.Si Muhammad Very Fedriansa, A.Md.Ak

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian

2022

Executive Summary

IKM Halal Feast merupakan IKM yang bergerak dibidang kuliner dan tengah berkembang membangun usaha bumbu instant dengan omzet awal dikisaran 20 jt/bulan. Usaha yang baru tumbuh ini membutuhkan pendampingan untuk mengatasi permasalahan pemasaran dan meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Tujuan kegiatan DAPATI kali ini adalah meningkatkan manajemen produksi dan nilai jual produk bumbu instant dari IKM Halal Feast. Kegiatan awal berupa identifikasi dan pengumpulan data terkait kebutuhan dan masalah yang di hadapi oleh IKM Halal Feast. Pemecahan masalah dilakukan dengan pendampingan standardisasi bahan baku dan produk, uji masa simpan, perbaikan layout, perbaikan desain kemasan, pendampingan persiapan sertifikasi halal, pendampingan sistem manajemen halal, GMP dan manajemen pemasaran. Hasilnya IKM Halal Feast telah melakukan kontrol bahan baku dan produk dengan pengukuran kadar air sehingga kualitas sesuai dengan SNI rempah dengan masa simpan berkisar antara 14 – 16 bulan. IKM juga telah melakukan redesain layout ruang produksi sesuai konektivitas proses menggunakan U models, redesain kemasan dengan jenis dan tipe kemasan yang lebih baik, mengikuti pelatihan GMP, jaminan mutu halal dan manajemen-pemasaran serta menyelesaikan dokumen pengajuan halal. Adapun keterlibatan IKM dalam proses pendampingan yang telah dilakukan adalah perbaikan dokumen sertifikasi halal, perbaikan ruang produksi meliputi pembelian meja besi, kompor gas dan pemasangan *cooker hood*, kemudian renovasi dan penambahan bangunan ruang display serta pembelian mesin *mixer* dan *continous band sealer*. Dampak utama dari pendampingan ini adalah meningkatnya omzet IKM Halal Feast dikisaran 30 – 40 juta dan evaluasi tekno ekonomi yang menyatakan uaha ini layak investasi dengan nilai NPV 64.277.113, BCR 2.53, ROI 1,91% dan IRR sebesar 49%.



LAPORAN AKHIR
KONSULTANSI TEKNOLOGI INDUSTRI
SASIRANGAN PEWARNA ALAM DAN ECOPRINT

Untuk Program DAPATI pada

IKM KANTAN SASIRANGAN

Ketua : Faiza Elisa Hasfianti, S.Hut.
Anggota : Budi Tri Cahyana, S.T.
Miyono, SP.
Dr. Evy Setiawati, S.Si., M.T.
Dwi Harsono, S.Hut.
Aurel Widya Ningsih, A.md.Ak.
Suryawati Ristiani, S. Pd.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian

2 0 2 2

Executive Summary

Proses produksi kain sasirangan dan kain ecoprint sangat tergantung dengan peralatan yang digunakan. Peralatan yang memadai dengan kapasitas yang besar dan memiliki sistem keamanan seperti sistem kontrol suhu dan waktu akan mampu memberikan hasil produksi yang baik dan memberikan keamanan bagi pengrajin pada saat produksi. Peralatan yang sederhana, memiliki kapasitas yang terbatas dan tanpa adanya sistem pengamanan yang baik memberikan resiko kecelakaan kerja pada proses produksi kain sasirangan dan kain ecoprint di IKM Kantan Sasirangan.

Kegiatan konsultasi teknologi proses produksi kain sasirangan dan ecoprint menghasilkan alat pencelup kain sasirangan serbaguna yang dapat digunakan oleh IKM Kantan Sasirangan untuk proses pewarnaan pada produksi kain sasirangan dan proses pengukusan pada produksi kain ecoprint. Alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol suhu dan waktu yang terkoneksi pada kompor sehingga dapat mengatur penggunaan bahan bakar serta menjaga kondisi temperatur pada masing-masing proses tersebut. Adanya sistem pengontrol suhu dan waktu untuk proses pewarnaan kain sasirangan dan proses pengukusan kain ecoprint diharapkan dapat meminimalisir segala resiko kecelakaan kerja pada proses produksi kain sasirangan dan kain ecoprint di IKM Kantan Sasirangan.

Alat pencelup serbaguna ini dibuat dengan menggunakan dandang yang berukuran besar dilengkapi dengan tuas yang dihubungkan pada rangsang tempat diletakkannya kain sasirangan, sehingga proses pewarnaan kain dapat dilakukan dengan kapasitas yang lebih besar dan tanpa harus membuat tangan pengrajin bersentuhan langsung dengan zat pewarna. Kapasitas produksi dengan menggunakan alat ini untuk proses pewarnaan kain sasirangan yakni antara 6 – 8 kain, sedangkan untuk proses pengukusan kain ecoprint yakni antara 10 – 12 kain. Hasil uji coba penggunaan alat pencelup kain sasirangan serbaguna memberikan peningkatan kapasitas produksi sebanyak 2 kali lipat untuk kain sasirangan dan 3 kali lipat untuk kain ecoprint. Hal ini diharapkan dapat memenuhi peningkatan produksi kain sasirangan dan kain ecoprint di IKM Kantan Sasirangan secara berkelanjutan.



LAPORAN AKHIR

**MODIFIKASI TEKNOLOGI PROSES DAN PERALATAN
MESIN PENGGIILING RSS (*RIBBED SMOKED SHEET*)**

**Untuk Program DAPATI pada
Kelompok Tani UPPB Lebah Madu Bersama**

Ketua : Budi Tri Cahyana, S.T.

Anggota : Saibatul Hamdi, S.Hut., M.P.

Miyono, S.P.

Ratri Yuli Lestari, S.Hut., M.Env

Rais Salim, S.Hut.

Muhammad Kendar Oktansyah, ST

Endang Gembirawati, A.Md

**Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian**

2 0 2 2

Executive Summary

Penggilingan mesin RSS menjadi salah satu bagian penentu dalam menghasilkan mutu yang baik, oleh karena itu proses penggilingan RSS memerlukan modifikasi penanganan proses yang tepat agar tidak tercetak karet yang robek dan menggumpal. Mesin penggilingan RSS yang digunakan oleh kelompok tani UPPB Lebah Madu Bersama dalam mengatasi terkendala pada mesin penggiling RSS produk yang dihasilkan robek dan menggumpal.

Kegiatan konsultasi modifikasi mesin penggiling RSS yang digunakan oleh kelompok tani UPPB Lebah Madu Bersama dilakukan modifikasi desain mesin penggiling RSS pada pemindahan posisi sistem motor penggerak, penyetelan kerapatan jarak antar rool penggiling, instalasi plat hopper bagian atas di sepanjang roller, rantai penggerak antar roda gigi, rantai roll penggiling sistem penggerak dan memasang stater mesin, sehingga memudahkan proses penggilingan lateks menjadi lembaran RSS sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki kualitas serta mutu dari RSS

Kegiatan konsultasi pada proses pengolahan RSS yang dibuat kelompok tani UPPB Lebah Madu Bersama telah meningkatkan kapasitas produksi 400 lembar/bln dengan menyediakan bahan baku lateks 1.200 liter/bln. Hasil pengolahan lembaran RSS Kelompok Tani UPPB Lebah Madu bersama telah dilakukan pengujian untuk bahan olahan karet RSS dengan komoditi karet konvensional sesuai SNI 06-0001-1987, memenuhi persyaratan mutu RSS 3 dan dapat memperbaiki kualitas RSS untuk meningkatkan kapasitas produksi RSS. Teknoekonomi dari produksi RSS pada kelompok tani UPPB Lebah Madu Bersama dapat dilihat berdasarkan nilai NPV, BCR, ROI, dan IRR setelah konsultasi memenuhi kriteria, maka usaha tersebut layak investasi.

Realisasi Pendapatan Per Akun

 EXCEL  PDF  FILTER

🕒 16-01-2023 10:44:35 WIB 🗑️ TIDAK ADA FILTER CARI DI HALAMAN... 🔍

NO	KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN				POTONGAN SPM	PENGEMBALIAN	REALISASI	
		MPN		BI					
		PAJAK	NON PAJAK	PAJAK	NON PAJAK				
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	
2	425283 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	4,668,383,750	0	0	0	(9,386,000)	4,658,997,750	
3	425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	74,400,000	0	0	0	0	74,400,000	
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,427,258	0	1,427,258	
5	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	112,233,445	0	0	0	0	112,233,445	
6	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	16,740,935	0	16,740,935	
GRAND TOTAL		0	4,897,017,195	0	0	18,168,193	(9,386,000)	4,905,799,388	
GRAND TOTAL		0	4,897,017,195	0	0	18,168,193	(9,386,000)	4,905,799,388	

SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-543-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium Alamat	: Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru : Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4772461 E-mail: baristand.banjarbaru@gmail.com	Masa berlaku: 23 Februari 2022 s/d 15 Maret 2025		
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Pupuk NPK Padat	Merkuri (Hg)	SNI 2803:2012 butir 6.6.1	
		Arsen (As)	SNI 2803:2012 butir 6.7	
	AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	Warna	SNI 3554:2015 butir 3.2.3.2	
		Barium (Ba)	SNI 3554:2015 butir 3.19.1	
		Klor Bebas (Cl ₂)	SNI 3554:2015 butir 3.17	
		Sianida (CN)	SNI 3554:2015 butir 3.14	
		Boron (B)	SNI 3554:2015 butir 3.22.2	
	Air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer	Oksigen terlarut (DO)	SNI 06-6989.14-2004	
		Temperatur	SM APHA 23rd Ed., 2550 B, 2017	
		Timbal (Pb) terlarut	SNI 6989.46:2009	
		Kromium (Cr) terlarut	SNI 6989.65:2009	
		Kadmium (Cd) terlarut	SNI 06-6989.38-2005	
		Nikel (Ni) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Perak (Ag) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Air limbah	Oksigen terlarut (DO)	
	Temperatur		SM APHA 23 rd Ed., 2550 B, 2017	
	Timbal (Pb) total		SNI 6989.84:2019	
	Nikel (Ni) total			
	Perak (Ag) total			
	Udara ambien	Partikel Tersuspensi Total (TSP)	SNI 7119-3:2017	
		Oksidan (O ₃)	SNI 7119-8-2017	
	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Sulfur Dioksida (SO ₂)	IK 8.1.1.LU-ESTB (Elektrokimia)	
		Nitrogen Oksida (NOx)		
		Karbon Dioksida (CO ₂)		
		Karbon Monoksida (CO)		
		Oksigen (O ₂)		
	Kebisingan	Tingkat Kebisingan Lingkungan	SNI 8427:2017	
Lingkungan kerja	Intensitas Kebisingan	SNI 7231:2009		

Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
 (Lampiran Sertifikat LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025)

LANJUTAN SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-543-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4772461 E-mail: baristand.banjarbaru@gmail.com				Masa berlaku: 23 Februari 2022 s/d 15 Maret 2025
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisik/Mekanik	Papan partikel	Kadar air	SNI 03-2105-2006 butir 7.2.2	
		Kekuatan tekuk/ <i>Modulus of Rupture</i>	SNI 03-2105-2006 butir 7.2.4	
		Kekuatan lentur/ <i>Modulus of Elastic</i>		
Catatan: Metode penentuan lokasi pengambilan contoh uji udara ambien : SNI 19-7119.6-2005 Metode pengambilan contoh uji air limbah : SNI 6989.59:2008 Metode pengambilan contoh uji air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, : SNI 6989.57.2008 air waduk dan air akuifer				

PENGAJUAN RUANG LINGKUP PARAMETER LINGKUNGAN TAHUN 2022

Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode Pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Fe terlarut	SNI 6989.4:2009	Data berdasarkan lampiran sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-543-IDN – SNI ISO/IEC 17025:2017 tanggal 16 Maret 2020
		NH ₃ -N	SNI 06.6989.30-2005	
		Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2:2009	
		Mangan (Mn) terlarut	SNI 6989.5:2009	
		pH	SNI 06-6989.11-2004	
		Seng (Zn) terlarut	SNI 6989.7:2009	
		Total Dissolved Solid (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	
		Cu terlarut	SNI 6989.6:2009	
		Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	
		Krom Total (Cr-T)	SNI 6989.17:2009	
		Sulfat	SNI 6989.20:2009	
	Air Limbah	Fe Total	SNI 6989.4:2009	
		NH ₃ -N	SNI 06.6989.30-2005	
		Cd total	SNI 6989.16:2009	
		COD	SNI 6989.2:2009	
		Mn total	SNI 6989.5:2009	
		pH	SNI 06-6989.11-2004	
		Zn total	SNI 6989.7:2009	
		Total Dissolved Solid (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	
		Cu total	SNI 6989.6:2009	
		Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	
		Krom Total (Cr-T)	SNI 6989.17:2009	
	Sulfat	SNI 6989.20:2009		
	Udara Ambien	NO ₂	SNI 19-7119.2-2005	
Catatan :				
Sampling udara Ambien : SNI 19-7119.6-2005; SNI 19-7119.2-2005				
Sampling Air Limbah : SNI 6989.59.2008				
Sampling Air Permukaan : SNI 6989.57.2008				
Sampling Air Tanah : SNI 6989.58.2008				

Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode Pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Cd	IK 7.2.LA-Cd2 (AAS-Flame)	Data berdasarkan Suplemen Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium No. LP-543-IDN – SNI ISO/IEC 17025:2017

Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode Pengujian, teknik yang digunakan (Revisi)	Keterangan Revisi	Keterangan
Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019	Pemutakhiran metode (surat laboratorium nomor B2043/ BSKJI/ Baristand Banjarbaru/ MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)	Data berdasarkan Lampiran 1 Surat KAN Nomor 1269/4.b2/LP/04/2022 tanggal 5 April 2022
	pH	SNI 6989.11:2019		
	Total dissolved solid (TDS)	SNI 6989.27:2019		
	Chemical oxygen demand (COD)	SNI 6989.2:2019		
	Besi (Fe) terlarut	SNI 6989.84:2019		
	Mangan (Mn) terlarut	SNI 6989.84:2019		
	Tembaga (Cu) terlarut	SNI 6989.84:2019		
	Seng (Zn) terlarut	SNI 6989.84:2019		
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019		
	Sulfat (SO_4^{2-})	SNI 6989.20:2019		
	Kadmium (Cd) terlarut	IK 8.1.1 LA-Cd2 (AAS-Flame)		
Air limbah	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019		
	pH	SNI 6989.11:2019		
	Total dissolved solid (TDS)	SNI 6989.27:2019		
	Chemical oxygen demand (COD)	SNI 6989.2:2019		
	Besi (Fe) total	SNI 6989.84:2019		
	Mangan (Mn) total	SNI 6989.84:2019		
	Tembaga (Cu) total	SNI 6989.84:2019		
	Seng (Zn) total	SNI 6989.84:2019		
	Kadmium (Cd) total	SNI 6989.84:2019		
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019		
	Sulfat (SO_4^{2-})	SNI 6989.20:2019		
Udara ambien	NO_2	SNI 7119.2:2017		

Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode Pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer	Oksigen terlarut (DO)	SNI 06-6989.14-2004	Data berdasarkan Suplemen Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium No. LP-543-IDN – SNI ISO/IEC 17025:2017
		Temperatur	SM APHA 23 rd Ed., 2550 B, 2017	
		Timbal (Pb) terlarut	SNI 6989.46:2009	
		Kromium (Cr) terlarut	SNI 6989.65:2009	
		Kadmium (Cd) terlarut	SNI 06-6989.38-2005	
		Nikel (Ni) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Perak (Ag) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Oksigen terlarut (DO)	SNI 06-6989.14-2004	
	Air limbah	Temperatur	SM APHA 23 rd Ed., 2550 B, 2017	
		Timbal (Pb) total	SNI 6989.84:2019	

		Nikel (Ni) total			
		Perak (Ag) total			
	Udara ambien	Partikel Tersuspensi Total (TSP)			SNI 7119-3:2017
		Oksidan (O ₃)			SNI 7119-8-2017
	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Sulfur Dioksida (SO ₂)			IK 8.1.1.LU-ESTB (Elektrokimia)
		Nitrogen Oksida (NO _x)			
		Karbon Dioksida (CO ₂)			
		Karbon Monoksida (CO)			
		Oksigen (O ₂)			
	Kebisingan	Tingkat Kebisingan Lingkungan			SNI 8427:2017
Lingkungan Kerja	Intensitas Kebisingan	SNI 7231:2009			
Catatan :					
Metode penentuan lokasi pengambilan contoh uji udara ambien			: SNI 19-7119.6-2005		
Metode pengambilan contoh uji air limbah			: SNI 6989.59:2008		
Metode pengambilan contoh uji air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, :			SNI 6989.57:2008		
Air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer					

Banjarbaru, 11 April 2022
Pit. Kepala


BUDI SETIAWAN

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2, Banjarbaru Telp. (0511) 4772461 Faks. (0511) 4772115				Masa berlaku: 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025
Lingkup Akreditasi				
Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Kadar P_2O_5 total	SNI 02-3776-2005 butir 6.1.1	
		Kadar P_2O_5 larut dalam asam sitrat 2 %.	SNI 02-3776-2005 butir 6.1.2	
		Kadar air	SNI 02-3776-2005 butir 6.2	
	Pupuk NPK	Nitrogen Total	SNI. 2803-2012 butir 6.2	
		Kadar P_2O_5 total	SNI. 2803-2012 butir 6.3	
		Kalium sebagai K_2O	SNI. 2803-2012 butir 6.4	
		Kadar air	SNI. 2803-2012 butir 6.5.1	
		Cadmium sebagai Cd	SNI. 2803-2012 butir 6.6.2	
		Timbal sebagai Pb	SNI. 2803-2012 butir 8.6.3	
	Pupuk KCl	Kadar kalium sebagai K_2O	AOAC edisi 17th 2000 butir 2.5.04	
		Kadar air	SNI 02-2805-2005 butir 6.2	
	AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	pH	SNI 3554:2015 butir 3.3	
		Kekeruhan	SNI 3554:2015 butir 3.4	
		Padatan terlarut total	SNI 3554:2015 butir 3.5	
		Zat Organik ($KMnO_4$)	SNI 3554:2015 butir 3.6.1	
		Nitrat (NO_3-N)	SNI 3554:2015 butir 3.8	
		Nitrit (NO_2-N)	SNI 3554:2015 butir 3.9	
		Amonium (NH_4)	SNI 3554:2015 butir 3.10	
		Sulfat (SO_4^{2-})	SNI 3554:2015 butir 3.11	
		Klorida (Cl^-)	SNI 3554:2015 butir 3.12	
		Fluorida (F^-)	SNI 3554:2015 butir 3.13	
		Besi (Fe)	SNI 3554:2015 butir 3.15.1	
		Mangan (Mn)	SNI 3554:2015 butir 3.16.1	
		Kromium (Cr)	SNI 3554:2015 butir 3.18.1	
		Timbal (Pb)	SNI 3554:2015 butir 3.26.1.1	
		Tembaga (Cu)	SNI 3554:2015 butir 3.26.2.1	
		Kadmium (Cd)	SNI 3554:2015 butir 3.26.3.1	

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2, Banjarbaru Telp. (0511) 4772461 Faks. (0511) 4772115				Masa berlaku: 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025
Lingkup Akreditasi				
Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	Raksa (Hg)	SNI 3554:2015 butir 3.26.4	
		Perak (Ag)	SNI 3554:2015 butir 3.21.1	
		Kobal (Co)	IK.7.2.LM - LOG (AAS)	
		Arsen (As)	SNI 3554:2015 butir 3.26.5.1	
		Selenium (Se)	SNI 3554:2015 butir 3.20.1	
		Angka Lempeng Total	SNI 3554:2015 butir 3.28.1	
		Coliform	SNI 3554:2015 butir 3.28.2	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	SNI 3554:2015 butir 3.28.3	
		Bau	SNI 3554:2015 butir 3.2.1	
		Rasa	SNI 3554:2015 butir 3.2.1	
	Garam konsumsi beryodium	Kadar air	SNI 3556:2016 butir 6.1 IK 7.2.LM-AIR (pemanasan /oven)	
		Kadar natrium klorida (NaCl)	SNI 3556:2016 butir 6.2 IK 7.2.LM-NaCl (titrasi)	
		Bagian yang tidak larut dalam air	SNI 3556:2016 butir 6.3 IK.7.2.LM-BTL (pemanasan /oven)	
		Kadar iodium sebagai KIO_3	SNI 3556:2016 butir 6.4 IK 7.2.LM-YOD (titrasi)	
		Logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb)	SNI 3556:2016 butir 6.5.1 IK 7.2.LM-Pb&Cd (Graphite Furnace AAS)	
		Raksa (Hg)	SNI 3556:2016 butir 6.5.2 IK 7.2.LM-Hg (Graphite furnace AAS)	
		Cemaran arsen (As)	SNI 3556:2016 butir 6.5.3 IK 7.2.LM-As (Graphite furnace AAS)	
	Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Fe terlarut	SNI 6989.4:2009	
		NH_3 -N	SNI 06.6989.30-2005	
		Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2:2009	
		Mangan (Mn) terlarut	SNI 6989.5:2009	
		pH	SNI 06-6989.11-2004	
		Seng (Zn) terlarut	SNI 6989.7:2009	

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru	Masa berlaku:
Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2, Banjarbaru	16 Maret 2020
Telp. (0511) 4772461 Faks. (0511) 4772115	s/d
	15 Maret 2025

Lingkup Akreditasi

Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Total Dissolved Solid (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	
		Cu terlarut	SNI 6989.6:2009	
		Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	
		Krom Total (Cr-T)	SNI 6989.17-2009	
	Air limbah	Sulfat	SNI 6989.20-2009	
		Fe total	SNI 6989.4-2009	
		NH ₃ -N	SNI 06-6989.30-2005	
		Cd total	SNI 6989.16-2009	
		COD	SNI 6989.2-2009	
		Mn total	SNI 6989.5-2009	
		pH	SNI 06-6989.11-2004	
		Zn total	SNI 6989.7-2009	
		Total Dissolved Solid (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	
		Cu total	SNI 6989.6-2009	
		Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	
		Krom Total (Cr-T)	SNI 6989.17-2009	
		Sulfat	SNI 6989.20-2009	
		NO ₂	SNI 19-7119.2-2005	
	Udara Ambien			

Catatan:

Sampling udara Ambien : SNI 19-7119.6-2005; SNI 19-7119.2-2005

Sampling Air Limbah : SNI 6989.59.2008

Sampling Air Permukaan : SNI 6989.57.2008

Sampling Air Tanah : SNI 6989.58.2008

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional:

Tanggal : 16 Maret 2020



Prof. Dr. Bambang Prasetya

SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-543-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2, Banjarbaru Telp. (0511) 4772461 Faks. (0511) 4772115				Masa berlaku: 22 April 2020 s/d 15 Maret 2020
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika / Kimia	Air permukaan (air sumur, air danau , air sungai , air muara , air rawa,air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer)	Cd	IK 7.2.LA-Cd2 (AAS-Flame)	

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 5 April 2022

Nomor : 1269/4.b2/LP/04/2022
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Survailen

Yth. Kepala Balai Riset dan Standardisasi
Industri Banjarbaru
Jalan Panglima Batur Barat No. 2
Banjarbaru

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survailen ke-1) tanggal 20-22 September 2021, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada LPK:

Nama : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Alamat : Jalan Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru
No. Akreditasi : LP-543-IDN

Terdapat perubahan ruang lingkup akreditasi seperti disebut pada Lampiran 1, terlampir.

Lampiran 1 surat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebelumnya (LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025 dan suplemen lampiran masa berlaku 22 April 2020 s/d 15 Maret 2025).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR E

Donny Purnomo JE
NIP. 19750115 20003 1 001



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Lampiran 1

Surat KAN Nomor 1269/4.b2/LP/04/2022 Tanggal 5 April 2022

Nama LPK : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru (LP-543-IDN) Alamat : Jalan Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru Masa berlaku : 5 April 2022 s.d 15 Maret 2025			
Bahan atau Produk yang Diuji	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat yang Diukur	Metode Pengujian, Teknik yang Digunakan (Revisi)	Keterangan Revisi
Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk, dan air akuifer)	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019	Pemutakhiran metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	pH	SNI 6989.11:2019	
	<i>Total dissolved solid</i> (TDS)	SNI 6989.27:2019	
	<i>Chemical oxygen demand</i> (COD)	SNI 6989.2:2019	
	Besi (Fe) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Mangan (Mn) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Tembaga (Cu) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Seng (Zn) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	SNI 6989.20:2019	
	Kadmium (Cd) terlarut	IK 8.1.1 LA-Cd2 (AAS-Flame)	
Air limbah	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019	Pemutakhiran metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	pH	SNI 6989.11:2019	
	<i>Total dissolved solid</i> (TDS)	SNI 6989.27:2019	
	<i>Chemical oxygen demand</i> (COD)	SNI 6989.2:2019	
	Besi (Fe) total	SNI 6989.84:2019	
	Mangan (Mn) total	SNI 6989.84:2019	
	Tembaga (Cu) total	SNI 6989.84:2019	

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

	Seng (Zn) total	SNI 6989.84:2019	
	Kadmium (Cd) total	SNI 6989.84:2019	
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	SNI 6989.20:2019	
Udara ambien	NO ₂	SNI 7119.2:2017	Pemutakhiran metode Terkait LKS 23/49 dan surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Kadar P ₂ O ₅ total	SNI 02-3776-2005 butir 6.1.1, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.3.01 dan butir 2.3.02	Revisi metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	Kadar air	SNI 02-3776-2005 butir 6.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.2.01	
Pupuk NPK padat	Kalium sebagai K ₂ O	SNI. 2803-2012 butir 6.4.2	Revisi metode terkait LKS 22/49 dan surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	Kadar air	SNI. 2803-2012 butir 6.5.2	
Pupuk KCl	Kadar kalium sebagai K ₂ O	SNI 02-2805-2005 butir 6.1.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.5.06	Revisi metode terkait LKS 22/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
	Kadar air	SNI 02-2805-2005 butir 6.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.2.01	Revisi metode terkait LKS 25/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
Garam konsumsi beryodium	Kadar air	IK 7.2.LM-AIR (pemanasan/oven)	Pengeluaran dari ruang lingkup terkait LKS 1/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
	Kadar natrium klorida (NaCl)	IK 7.2.LM-NaCl (titrasi)	
	Bagian yang tidak larut dalam air	IK 7.2.LM-BTL (pemanasan/oven)	
	Kadar iodium sebagai KIO ₃	IK 7.2.LM-YOD (titrasi)	

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

	Logam kadmium (Cd)	IK 7.2.LM-Pb&Cd (graphit furnace AAS)	
	Logam timbal (Pb)	IK 7.2.LM-Pb&Cd (graphit furnace AAS)	
	Raksa (Hg)	IK 7.2.LM-Hg (graphit furnace AAS)	
	Cemaran arsen (As)	IK 7.2.LM-As (graphit furnace AAS)	
AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	Kobalt (Co)	IK 7.2.LM - LOG (AAS)	Pengeluaran dari ruang lingkup (surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)

Catatan:

1. Lampiran 1 surat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebelumnya (LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025 dan suplemen lampiran masa berlaku 22 April 2020 s/d 15 Maret 2025).
2. LKS : laporan ketidaksesuaian.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Donny Purnomo J. E.
NIP. 19750115 200003 1 001



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-543-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium	: Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru	Masa berlaku:
Alamat	: Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan	23 Februari 2022
	Telp. (0511) 4772461	s/d
	E-mail: baristand.banjarbaru@gmail.com	15 Maret 2025

Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisika/Kimia/Biologi	Pupuk NPK Padat	Merkuri (Hg)	SNI 2803:2012 butir 6.6.1	
		Arsen (As)	SNI 2803:2012 butir 6.7	
	AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	Warna	SNI 3554:2015 butir 3.2.3.2	
		Barium (Ba)	SNI 3554:2015 butir 3.19.1	
		Klor Bebas (Cl ₂)	SNI 3554:2015 butir 3.17	
		Sianida (CN)	SNI 3554:2015 butir 3.14	
		Boron (B)	SNI 3554:2015 butir 3.22.2	
	Air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer	Oksigen terlarut (DO)	SNI 06-6989.14-2004	
		Temperatur	SM APHA 23rd Ed., 2550 B, 2017	
		Timbal (Pb) terlarut	SNI 6989.46:2009	
		Kromium (Cr) terlarut	SNI 6989.65:2009	
		Kadmium (Cd) terlarut	SNI 06-6989.38-2005	
		Nikel (Ni) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Perak (Ag) terlarut	SNI 6989.84:2019	
		Air limbah	Oksigen terlarut (DO)	
	Temperatur		SM APHA 23 rd Ed., 2550 B, 2017	
	Timbal (Pb) total		SNI 6989.84:2019	
	Nikel (Ni) total			
	Perak (Ag) total			
	Udara ambien	Partikel Tersuspensi Total (TSP)	SNI 7119-3:2017	
		Oksidan (O ₃)	SNI 7119-8-2017	
	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Sulfur Dioksida (SO ₂)	IK 8.1.1.LU-ESTB (Elektrokimia)	
		Nitrogen Oksida (NOx)		
		Karbon Dioksida (CO ₂)		
		Karbon Monoksida (CO)		
		Oksigen (O ₂)		
	Kebisingan	Tingkat Kebisingan Lingkungan	SNI 8427:2017	
Lingkungan kerja	Intensitas Kebisingan	SNI 7231:2009		

Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
 (Lampiran Sertifikat LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025)

LANJUTAN SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-543-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4772461 E-mail: baristand.banjarbaru@gmail.com				Masa berlaku: 23 Februari 2022 s/d 15 Maret 2025
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Fisik/Mekanik	Papan partikel	Kadar air	SNI 03-2105-2006 butir 7.2.2	
		Kekuatan tekuk/ <i>Modulus of Rupture</i>	SNI 03-2105-2006 butir 7.2.4	
		Kekuatan lentur/ <i>Modulus of Elastic</i>		
Catatan: Metode penentuan lokasi pengambilan contoh uji udara ambien : SNI 19-7119.6-2005 Metode pengambilan contoh uji air limbah : SNI 6989.59:2008 Metode pengambilan contoh uji air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk dan air akuifer : SNI 6989.57.2008				

CERTIFICATE

Certify that

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

Jalan Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan - Indonesia

has implemented a quality management system in accordance with

SNI ISO 9001:2015

Scope of certification

**Testing, Calibration, Product and Halal Certification, Industrial Assistance
and Consulting**

The certificate is valid from December 8th, 2022 until December 27th, 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before December 27th, 2024

Certified since : December 8th, 2022

No. : 688/Q - 12/186

Authorised by

Dr. Sri Bimo Pratomo, ST., M. Eng
behalf of
Director of B4T

B4T - SYSTEM CERTIFICATION
Jl. Sangkuriang 14, Bandung - Indonesia
Phone : 022-2504088, 022-2504828
Fax : 022-2502027
E-mail : sc@b4t.go.id





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

SERTIFIKAT AKREDITASI CERTIFICATE OF ACCREDITATION

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
(HALAL INSPECTION AGENCY)

REG RI LH A-1P10000010196322

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia
*In the name and by the authority of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH)
Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia*

Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH
Based on the Recommendation Letter of the Executive Board of LPH Accreditation Team

Nomor: A0019/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.01.01/10/2022 menyatakan bahwa:
Number: A0019/TIM-AK/LPH-LHLN/ RK.01.01/10/2022 be it known that:

LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
Jalan Panglima Batur Barat No.2 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan

Terakreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dengan kualifikasi:
*having fulfilled and passed all the requirements and accredited as a Halal Inspection Agency, and been admitted to
the qualification of:*

PRATAMA

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
Details as in the attachment must constitute as an annex, forming an integral part of this certificate

*In token whereof the BPJPH Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia has authorized
its Common Seal to be hereto affixed.*

Diterbitkan di Jakarta pada 5 Oktober 2022

Issued in Jakarta on

Berlaku sampai dengan 5 Oktober 2026

Valid until

**KEPALA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL**
*HEAD OF HALAL PRODUCT
ASSURANCE ORGANIZING AGENCY*



Muhammad Aqil Irham



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan basah dengan stempel basah



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI
ATTACHMENT OF CERTIFICATE OF ACCREDITATION

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL INSPECTION AGENCY

Nama LPH <i>Halal Inspection Agency</i> : LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru		Memenuhi Standar Akreditasi LPH Sesuai dengan Acuan: <i>Having Fulfilled and Passed LPH Accreditation Standards According to the References:</i> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; <i>Law Number 33 Year 2014 on Halal Product Assurance;</i> 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; <i>Law Number 11 Year 2020 on Job Creation;</i> 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. <i>Government Regulation Number 39 Year 2021 on Implementation of Halal Product Assurance.</i> 4. SNI ISO/IEC 17065:2012
Nomor Registrasi <i>Registration Number</i> : REG RI LH A-1P10000010196322		
Golongan LPH <i>Category</i> : 1		
Koordinator/ Penanggung Jawab <i>Coordinator/PIC</i> : Budi Setiawan		
Telepon/Fax <i>Phone/Fax</i> : (0511) 4774861 / (0511) 4772115		
Surel <i>Email</i> :		
Lingkup Akreditasi <i>Scope of Accreditation</i>		
Ruang Pemeriksaan dan/atau Pengujian <i>Inspection and/or Examination</i>	Cakupan Wilayah Kerja <i>Work Area Coverage</i>	Jumlah Auditor Halal <i>Total of Halal Auditors</i>
Verifikasi/Validasi, Inspeksi Produk dan/atau PPH, Inspeksi, Audit dan Pengujian Laboratorium jika diperlukan bagi produk berupa (1) Makanan dan Minuman <i>Verification/Validation, Inspection Product and/or PPH, Inspection, Audit, and Laboratory Testing if necessary for products (1) Food and Beverages</i>	Provinsi Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan Province</i>	3 (Tiga) orang <i>3 (Three) Halal Auditors</i>

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT
ASSURANCE ORGANIZING AGENCY



Muhammad Aqil Irham



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan basah dengan stempel basah

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 5 April 2022

Nomor : 1269/4.b2/LP/04/2022
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Survailen

Yth. Kepala Balai Riset dan Standardisasi
Industri Banjarbaru
Jalan Panglima Batur Barat No. 2
Banjarbaru

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survailen ke-1) tanggal 20-22 September 2021, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada LPK:

Nama : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Alamat : Jalan Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru
No. Akreditasi : LP-543-IDN

Terdapat perubahan ruang lingkup akreditasi seperti disebut pada Lampiran 1, terlampir.

Lampiran 1 surat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebelumnya (LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025 dan suplemen lampiran masa berlaku 22 April 2020 s/d 15 Maret 2025).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR E

Donny Purnomo JE
NIP. 19750115 20003 1 001



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Lampiran 1

Surat KAN Nomor 1269/4.b2/LP/04/2022 Tanggal 5 April 2022

Nama LPK : Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru (LP-543-IDN) Alamat : Jalan Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru Masa berlaku : 5 April 2022 s.d 15 Maret 2025			
Bahan atau Produk yang Diuji	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat yang Diukur	Metode Pengujian, Teknik yang Digunakan (Revisi)	Keterangan Revisi
Air permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk, dan air akuifer)	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019	Pemutakhiran metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	pH	SNI 6989.11:2019	
	<i>Total dissolved solid</i> (TDS)	SNI 6989.27:2019	
	<i>Chemical oxygen demand</i> (COD)	SNI 6989.2:2019	
	Besi (Fe) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Mangan (Mn) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Tembaga (Cu) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Seng (Zn) terlarut	SNI 6989.84:2019	
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	SNI 6989.20:2019	
	Kadmium (Cd) terlarut	IK 8.1.1 LA-Cd2 (AAS-Flame)	
Air limbah	Padatan tersuspensi (TSS)	SNI 6989.3:2019	Pemutakhiran metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	pH	SNI 6989.11:2019	
	<i>Total dissolved solid</i> (TDS)	SNI 6989.27:2019	
	<i>Chemical oxygen demand</i> (COD)	SNI 6989.2:2019	
	Besi (Fe) total	SNI 6989.84:2019	
	Mangan (Mn) total	SNI 6989.84:2019	
	Tembaga (Cu) total	SNI 6989.84:2019	

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

	Seng (Zn) total	SNI 6989.84:2019	
	Kadmium (Cd) total	SNI 6989.84:2019	
	Krom (Cr) total	SNI 6989.84:2019	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	SNI 6989.20:2019	
Udara ambien	NO ₂	SNI 7119.2:2017	Pemutakhiran metode Terkait LKS 23/49 dan surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Kadar P ₂ O ₅ total	SNI 02-3776-2005 butir 6.1.1, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.3.01 dan butir 2.3.02	Revisi metode (surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	Kadar air	SNI 02-3776-2005 butir 6.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.2.01	
Pupuk NPK padat	Kalium sebagai K ₂ O	SNI. 2803-2012 butir 6.4.2	Revisi metode terkait LKS 22/49 dan surat laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
	Kadar air	SNI. 2803-2012 butir 6.5.2	
Pupuk KCl	Kadar kalium sebagai K ₂ O	SNI 02-2805-2005 butir 6.1.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.5.06	Revisi metode terkait LKS 22/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
	Kadar air	SNI 02-2805-2005 butir 6.2, AOAC, 17 th, 2000, butir 2.2.01	Revisi metode terkait LKS 25/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
Garam konsumsi beriodium	Kadar air	IK 7.2.LM-AIR (pemanasan/oven)	Pengeluaran dari ruang lingkup terkait LKS 1/49 dan surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand- Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021
	Kadar natrium klorida (NaCl)	IK 7.2.LM-NaCl (titrasi)	
	Bagian yang tidak larut dalam air	IK 7.2.LM-BTL (pemanasan/oven)	
	Kadar iodium sebagai KIO ₃	IK 7.2.LM-YOD (titrasi)	

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

	Logam kadmium (Cd)	IK 7.2.LM-Pb&Cd (graphit furnace AAS)	
	Logam timbal (Pb)	IK 7.2.LM-Pb&Cd (graphit furnace AAS)	
	Raksa (Hg)	IK 7.2.LM-Hg (graphit furnace AAS)	
	Cemaran arsen (As)	IK 7.2.LM-As (graphit furnace AAS)	
AMDK (air mineral, demineral, air mineral alami)	Kobalt (Co)	IK 7.2.LM - LOG (AAS)	Pengeluaran dari ruang lingkup (surat dari laboratorium nomor B2043/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/MS/XI/2021 tanggal 17 November 2021)

Catatan:

1. Lampiran 1 surat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sebelumnya (LP-543-IDN, masa berlaku 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025 dan suplemen lampiran masa berlaku 22 April 2020 s/d 15 Maret 2025).
2. LKS : laporan ketidaksesuaian.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Donny Purnomo J. E.
NIP. 19750115 200003 1 001

3420

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 21 Juni 2022

Nomor : 2470/3.b3/LK/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Survailen

Yth.
Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Banjarbaru
Jl. Panglima Batur Barat, No. 2,
Banjarbaru

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survailen) ke-1 tanggal 25 Maret 2022, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi terhadap SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan perubahan nama laboratorium yang sebelumnya Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru sesuai dengan ruang lingkup yang diakreditasi kepada laboratorium kalibrasi:

Nama : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Banjarbaru
Alamat : Jl. Panglima Batur Barat, No. 2, Banjarbaru
No. Akreditasi : LK-326-IDN

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR-E

Donny Purnomo J.E, S.T
NIP. 19750115 200003 1 001 *3420*



CHESNA
CERTIFICATION



FM-SRT-12
Rev.00
Tanggal Terbit : 04-10-2021

info@chesna.co.id

www.chesna.co.id

SURAT KEPUTUSAN AUDIT PENGAWASAN

SRT-159/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manager Sertifikasi PT. CHESNA menyatakan bahwa berdasarkan hasil Audit Pengawasan Tahun II yang dilaksanakan oleh PT CHESNA pada:

Nama Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Alamat Organisasi : Jl. Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Hari/Tanggal Audit : Rabu - Kamis, 24 - 25 Agustus 2022
Lingkup : Sistem Manajemen Anti Penyupaan
Standar : ISO 37001:2016

Bahwa status sertifikasi **DAPAT DILANJUTKAN** sampai dengan pelaksanaan Resertifikasi.

Demikian Surat Keputusan Audit Pengawasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 21 September 2022

Sania Paramita
Manager Sertifikasi

JAKARTA OFFICE

Lippo St. Moritz Office Tower, Unit 0901
Jl. Puri Indah Raya Blok U1
Puri Indah, CBD, Jakarta Barat 11610
 Telp. (021) 30497711

SURABAYA OFFICE

Gedung Papaya Lt. 2
Jl. Raya Margorejo Indah 60-68
Surabaya
 Telp. (031) 8434141

CONTACT

info@chesna.co.id
 0896 7478 3377

Monitoring Pagu dan Realisasi PDN

Home > Dashboard

Hanya untuk Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	13.894.843.000	9.426.234.210	3.628.652.620	732.727.859	93,95%
2.	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	4.153.272.000	3.903.234.167	0	215.880.710	93,98%
3.	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	11.678.013.000	11.486.726.552	0	18.365.058	98,36%
4.	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	2.963.041.000	2.794.719.615	0	100.474.000	94,32%
5.	Pusat Industri Hijau	7.513.802.000	7.406.647.756	0	0	98,57%
6.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	48.764.788.000	47.764.051.501	63.399.199	906.994.871	98,08%
7.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	1.424.828.000	1.330.404.321	53.002.500	10.878.000	97,09%
8.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	6.174.986.000	5.027.527.583	192.895.000	494.370.500	84,54%
9.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	5.474.932.000	4.745.643.828	112.000.000	553.553.303	88,73%

Intranet Kemenperin

☰

Muhammad Khairul Dzakirin

10.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	890.920.000	819.538.035	6.600.000	0	92,73%
11.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	4.412.135.000	4.182.376.752	32.307.000	171.442.571	95,52%
12.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	3.613.474.000	3.261.340.965	19.300.000	3.240.000	90,79%
13.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	3.948.324.000	3.323.500.647	104.475.909	385.656.638	86,82%
14.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	4.389.587.000	4.102.493.797	11.424.790	187.658.575	93,72%
15.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	523.549.000	430.358.637	30.960.650	60.348.235	88,11%
16.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	8.978.731.000	7.326.856.815	676.329.000	955.323.152	89,13%
17.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	3.383.174.000	2.179.649.495	735.479.660	431.651.540	86,17%
18.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	3.931.160.000	2.835.582.753	77.400.000	0	74,10%
19.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	3.858.663.000	3.302.320.647	0	443.461.400	85,58%
20.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	3.417.752.000	2.322.154.775	611.263.994	0	85,83%
21.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	886.323.000	749.006.369	0	2.254.017	84,51%
22.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	10.328.527.000	10.114.137.033	0	193.691.670	97,92%

23.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	3.579.542.000	2.940.545.336	360.300.100	269.680.320	92,21%
24.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	3.638.697.000	2.801.647.204	0	290.000	77,00%
25.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	4.238.456.000	3.866.678.522	158.267.636	201.120.200	94,96%
26.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	2.229.216.000	1.769.268.942	149.552.000	200.000	86,08%
27.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	1.627.679.000	1.540.622.900	0	28.328.400	94,65%
28.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	6.457.226.000	5.682.571.417	274.198.057	3.285.000	92,25%
29.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	2.461.579.000	1.716.991.754	175.200.000	556.460.080	76,87%

Nomor : R/ 139 /IJ-IND/PW/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 29 November 2022

Yth.

Kepala BSPJI Banjarbaru

di -

Banjarbaru

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian No. R/92/IJ-IND/PW/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang telah Saudara laksanakan.

Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 16 (enam belas) temuan dan 27 (dua puluh tujuh) saran, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan kami **dapat menyatakan selesai** sesuai dengan lingkup program, anggaran dan BMN yang telah diaudit (Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL



MASROKHAN

Tembusan :

1. Kepala BSKJI;
2. Inspektur III. 

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PADA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.SPM : R/92/IJ-IND/PW/VI/2022

Tanggal : 30/06/2022

NO.	TEMUAN PENYEBAB / URAIAN RINGKAS	KODE TEMUAN	REKOMENDASI / URAIAN RINGKAS	KODE REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS REKOMENDASI	STATUS TEMUAN	PARAF
1	PROGRAM DAN KEGIATAN Terdapat kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran jasa teknis industri (6080.AEF.002.051.B) yang dalam output laporan hasil kegiatannya hanya menjelaskan pelaksanaan kegiatan secara umum dari Tim pelaksana pelayanan publik, namun belum menjelaskan rincian pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan pemasaran jasa teknis industri. Penyebab : - Kekurangcermatan Plt. Sie PJT (selaku penanggungjawab kegiatan) dalam penyusunan laporan - Lemahnya pengendalian internal oleh PPK	2.01.03	Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi laporan dimaksud. [06]	06	- Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada Plt. Sie PJT (penanggung kegiatan) untuk memperbaiki laporan hasil kegiatan dengan nota dinas sesuai nomor 1596/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 - Laporan kegiatan telah diperbaiki	SR	selesai	
2	PROGRAM DAN KEGIATAN Pada pelaksanaan jasa pelayanan publik di BPSJI Banjarbaru tahun 2021, telah dilakukan evaluasi yang berupa survey menghasilkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan nilai 3,60, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain: a. Berdasarkan laporan kinerja	2.01.02	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan secara tertulis kepada penanggung jawab kegiatan agar: - melengkapi penjelasan dalam laporan kegiatan [06] - Melakukan penyesuaian/pengaturan pada sistem informasi layanan (SIBIRU) dan pengisian survey di website agar pelanggan hanya bisa mendapatkan sertifikat hasil	06 14	- Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan tertulis kepada Plt. Sie Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri dan Penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri agar melengkapi penjelasan laporan serta melakukan penyesuaian pada	SR SR	selesai	

	nilai IKM di tahun 2021 adalah 3,60 (target di perkin 3,50) namun pada website IKM yang dipublish adalah 3,59; b. Rata-rata nilai IKM sudah melebihi target, namun terdapat 2 unsur pelayanan yang secara capaian nilainya masih di bawah target standar IKM yakni 3,5 berupa: - Kepastian lamanya waktu penyelesaian pelayanan (3,45) - Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan (3,40) c. Dalam laporan belum terdapat analisis penyebab rendahnya nilai untuk unsur tersebut; d. Berdasarkan analisis kendala, disebutkan bahwa dari 411 pelanggan, dan dari 200 pelanggan yang disebarkan survey kuesioner, hanya didapatkan data hasil partisipasi survey dari 173 pelanggan. Penyebab : - Kekurangcermatan Plt. Sie PJT selaku penanggungjawab kegiatan dalam penyusunan laporan - Lemahnya pengendalian internal oleh PPK	layanan/ LHU apabila telah mengisi survey kepuasan pelanggan, yang dituangkan dalam rencana anggaran dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi untuk periode yang akan datang. [14]		sistem informasi layanan (SIBIRU) serta mewajibkan pengisian survey sebelum pelanggan mendapatkan LHU dengan surat nota dinas nomor 1597/BSKJI/BPSJI-Banjarbaru/KU/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 - Laporan kegiatan telah dibuat dan diperbaiki			
3	PROGRAM DAN KEGIATAN Terdapat pelaksanaan kegiatan kerjasama yang masih melekat pada anggaran Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekrayaan Produk (6080.DDA.001) berupa: - Optimalisasi Teknologi Penelung Bahan Pangan dengan Naskah Kerjasama antara SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru; - Optimalisasi Teknologi Proses	2.01.02	Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi penjelasan di laporan atas realisasi dan monitoring kegiatan kerjasama optimalisasi teknologi sebagaimana dirinci dalam MoU. [06]	06	- Kepala Baristand Industri Banjarbaru menginstruksikan kepada Plt. Sie Teknologi Industri dan Penanggungjawab kegiatan agar melengkapi penjelasan laporan dengan menyertakan realisasi dan monitoring kegiatan sebagai dirinci dalam MoU. dengan surat nota dinas 1598/BSKJI/BSPJI-	SR	selesai 

Pengering Bahan dengan Kelompok Tani Murung Jurai , Desa Jungkal Kec, Lamphiong Kab Balangan.yang ditemukan kelemahan sebagai berikut:

a. dalam MoU kegiatan dengan SMK Pertanian terdapat 10 kegiatan kerjasama di bidang Pendidikan, pengembangan teknologi industri dan pengabdian masyarakat yang menjadi fokus kerjasama, namun pada laporan laporan kegiatan tidak dijelaskan rincian pelaksanaan seluruh kerjasama dan manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak, hanya dijelaskan teknis pekerjaan dan evaluasi hasil kinerja terkait optimalisasi teknologi alat penepung;

b. Sesuai dengan Mou kegiatan dengan kelompok tani murung Jurai, yang menajadi fokus kerjasama antara lain uji coba dan evaluasi performa alat serta monitoring performa alat, pada laporan kegiatan telah dijelaskan rincian pekerjaan rekayasa alat sampai dengan evaluasi, hanya saja tidak dijelaskan adanya kerjasama dengan pihak kelompok tani murung jurai dimana baristand banjarbaru hanya berperan dalam transfer teknologi dalam optimalisasi prosesnya, dan tidak termasuk pembuatan alat. Serta belum ada laporan untuk monitoring performa alat dalam kurun waktu 12 bulan (sesuai MoU mulai dari 20 Mei 2021 berarti monitoring seharusnya dilakukan sampai bulan April 2022_

Penyebab :

- Kekurangcermatan Plt. Sie PJT (selaku penanggungjawab

Banjarbaru/VII/2022
tanggal 25 Juli 2022

- Laporan kegiatan optimalisasi teknologi proses pengering bahan dan optimalisasi teknologi proses penepung bahan pangan

	kegiatan) dalam penyusunan laporan - Lemahnya pengendalian internal oleh PPK							
4	PROGRAM DAN KEGIATAN Pada pelaksanaan kegiatan layanan jasa teknis pengujian di lingkungan BSPJI Banjarbaru tahun 2021 terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut: a. Pada perencanaan kegiatan, tertulis bahwa di awal tahun dilakukan: - Pendataan kebutuhan untuk pengadaan gas, bahan kimia, bahan pendukung dan alat gelas dibulan januari dan februari; - Penjadwalan dan konfirmasi ke klien rencanan sampling wilayah Kalselteng; namun belum dilampirkan hasil perencanaannya; b. Terkait layanan jasa pengujian, terdapat beberapa SOP yang terkait dengan pengukuran SPM nya namun belum terdapat SOP khusus yang mengatur alur layanan pengujian mulai dari permohonan, pembayaran, pelaksanaan pengujian di lab, samapai dengan penerbitan LHU; c. Berdasarkan rekapitulasi data layanan pengujian pada tahun 2021 dari total 6265 sampel pengujian, terdapat 114 pengujian gratis yang berasal dari internal dan eksternal; d. Sejumlah 98 sampel internal merupakan sampel yang dilakukan pengujian gratis antar laboratorium di Baristand Banjarbaru;	2.02.01	- Kepala BSPJI Banjarbaru menugaskan Plt. Sie PJT, Plt. Sie SS, dan Wakil Manajemen mutu untuk menyusun SOP yang memuat keseluruhan alur layanan pengujian; [09] - Kepala BSPJI Banjarbaru bersama dengan Sie PJT untuk melakukan evaluasi kembali MoU Kerjasama layanan pengujian berkoordinasi dengan BBTCLPP terkait kebijakan penetapan layanan jasa pengujian non tarif PNB; [11] - Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan kepada Plt.Sie PJT untuk melaksanakan layanan jasa pengujian sesuai dengan alur layanan PPNBP baik untuk sampel pengujian eksternal maupun internal [14]	09 11 14	- Kepala BSPJI Banjarbaru menugaskan Plt. Sie PJT, Plt. Sie SS, dan Wakil Manajemen mutu untuk menyusun SOP sesuai surat nomor 1599/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 -terlampir SOP Penerimaan contoh uji sesuai SOP 2.3.2.1/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/4/2022 tanggal 4 mei 2020 dengan reviai 2/18 april 2022 -terlampir SOP penerimaan layanan uji sesuai SOP 2.3.2.2/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/4/2022 tanggal 4 mei 2020 dengan reviai 2/18 april 2022 - terlampir SOP Penerimaan layanan uji sesuai SOP 2.3.4.1/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/4/2022 tanggal 4 mei 2020 dengan reviai 3/18 april 2022 - terlampir surat undangan evaluasi MoU BBTCL dengan BSPJI Banjarbaru sesuai surat no dok FM 7.4.1-UDR edisi B tanggal 9 mei 2022 - terlampir daftar hadir dan notulensi	SR SR SR	selesai	

e. Sejumlah 16 sampel eksternal berasal dari kerjasama dengan nilai Bali Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit (BBTKLPP) tentang kerjasama kegiatan pengelolaan limbah, pengujian laboratorium, pengembangan teknologi industri dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam MoU;

f. Pada MoU dengan BBTKLPP terdapat klausul pembiayaan yang mengatur biaya-biaya yang timbul dan seharusnya dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang disusun lebih lanjut, namun seluruh sampel pengujian terkait kerjasama tersebut dilakukan secara gratis;

g. Berdasarkan data rincian pekerjaan yang dikirimkan untuk dilakukan pengujian ke BBTKLPP ada 6 kali pengujian (bulan mei, juli, agustus, september, oktober) dengan 13 sampel, sedangkan dari rincian permintaan pengujian gratis oleh BBTKLPP ada sejumlah 8 kali pengujian (bulan juni - desember) dengan total 16 sampel yang dilakukan pengujian di BSPJI Banjarbaru, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah pengujiannya tidak sama antara kedua belah pihak dan lebih banyak beban pengujian di BSPJI Banjarbaru;

h. Layanan pengujian gratis ini juga ditemukan pada tahun 2020 dan sesuai MoU dengan BBTKLPP kerjasama pengujian ini dilakukan untuk 2 tahun sehingga masih akan diteruskan pada tahun 2022;

- terlampir surat undangan koordinasi MoU dengan pihak BTKL , terlampir daftar hadir dan notulen

- terlampir
2.2.2.1/SS/BSKJI/BSPJI-
Banjarbaru/4/2022
tanggal 4 mei 2020
revisi 4/18 Juli 2022

		i. Pada sistem informasi layanan (SIBIRU) terdapat fitur khusus untuk layanan jasa pengujian non PNB (gratis), sehingga tidak melewati alur jasa pelayanan standar yang harus melewati tahap pelunasan E-billing; Penyebab : - Kelalaian Plt. Sie PJT dan Plt. Sie SS dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan layanan jasa pengujian; - Lemahnya pengendalian internal dari PPK; - Penetapan kebijakan internal yang tidak tepat oleh pimpinan satker.					
5	PROGRAM DAN KEGIATAN Pada pelaksanaan kegiatan layanan jasa teknis kalibrasi di lingkungan BSPJI Banjarbaru selama tahun 2021 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni: a. Tidak ada output laporan khusus kegiatan layanan kalibrasi di tahun 2021, hasil kalibrasi dijelaskan dalam laporan pengujian. b. tidak ada target spesifik untuk capaian PNB dari layanan jasa kalibrasi. c. Berdasarkan rekapitulasi data layanan pada tahun 2021 hanya terdapat sejumlah 4 pekerjaan layanan yang dilakukan di laboratorium kalibrasi, yang seluruhnya merupakan peralatan dari internal BSPJI Banjarbaru untuk memenuhi persyaratan akreditasi; d. Pada tahun 2021, belum ada penerimaan PNB dari permintaan layanan jasa	2.01.01	Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan kepada Sie.SS untuk: - menyusun laporan kegiatan untuk layanan jasa kalibrasi; - menetapkan target capaian yang jelas untuk layanan jasa kalibrasi. - menyampaikan rencana aksi pengembangan laboratorium kalibrasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan layanan jasa kalibrasi yang sudah berjalan. [06] [14]	06 14	- Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada Sie.SS sesuai surat nomro 1600/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 - terlampir laporan kegiatan layanan pengujian - terlampir roadmap laboratorium BRSBB 2021-2025 dimana telah menetapkan target capaian yang jelas untuk layanan jasa kalibrasi dan rencana aksi pengembangan laboratorium kalibrasi	SR SR	selesai 

kalibrasi dari pihak eksternal karena laboratorium kalibrasi baru terakreditasi di akhir tahun 2020 hanya untuk 1 ruang lingkup yakni suhu;;

Penyebab :

- Kurangnya komitmen pimpinan dan Plt. Sie SS (selaku penanggungjawab layanan kalibrasi) untuk mendorong capaian layanan jasa teknis diluar pengujian;
- Keterbatasan fasilitas pendukung pengembangan ruang lingkup laboratorium kalibrasi.

6

PROGRAM DAN KEGIATAN

2.01.02

Berdasarkan Laporan Kegiatan Layanan Sertifikasi yang dilaksanakan oleh LS-Pro di BSPJI Banjarbaru terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Pada tahun 2021 terdapat 4 perusahaan baru yang mengajukan sertifikasi SPPT SNI, namun hanya 3 perusahaan yang telah diterbitkan sertifikasinya.

Untuk 1 perusahaan yang tidak terbit sertifikasinya adalah BUMDES Sejahtera (AMDK) yang statusnya masih menunggu hasil tindaklanjut dari klien terkait karena hasil uji belum sesuai Syarat mutu SNI AMDK, namun perusahaan dimaksud tidak menindaklanjuti sehingga masuk hitungan keterlambatan layanan sertifikasi; Berdasarkan SOP Layanan LSPro, untuk batas waktu tindaklanjut oleh perusahaan hanya diatur 5 hari kerja, namun dalam kasus keterlambatan sertifikasi untuk

Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi penjelasan dalam laporan dimaksud. [06]

06

Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada penanggungjawab sie SS sesuai nomor 1601/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022

- terlampir dokumen layanan sertifikasi

SR

selesai



	1 klien tersebut dalam analisis pemenuhan SPM nya tiddak terlihat jumlah hari/lama waktu keterlambatan, serta belum ada penjelasan, bagaimana alur serta apa tindakan yang diambil. jika setelah melewati batas waktu tindak lanjut pemenuhan syarat mutu (5hari) tapi perusahaan tidak merespon. b. Terdapat beberapa saran perbaikan yang diusulkan oleh Plt. Sie SS (selaku penanggungjawab kegiatan layanan sertifikasi), namun perlu dijelaskan secara spesifik kegiatan apa yang akan dilakukan terkait saran untuk "mengusahakan penambahan klien sesuai dengan penambahan ruang lingkup baru" Penyebab : Kekurangcermatan Plt. Sie. SS/ LS-Pro (selaku penanggungjawab kegiatan) dalam penyusunan laporan							
7	PROGRAM DAN KEGIATAN Terkait pelaksanaan layanan jasa pelatihan teknis di lingkungan BSPJI Banjarbaru tahun 2021, terdapat beberapa kelemahan yakni: a. Berdasarkan data capaian PNBPN, diketahui bahwa capaian PNBPN yang bersumber dari layanan pelatihan teknis hanya sejumlah Rp.24.800.000 sementara target PNBPNya adalah Rp.60.000.000; b. Pada tahun 2021 hanya dilaksanakan 2 kali pelatihan teknis yakni: pelatihan mikrobiologi dan pelatihan pengambilan sampel air limbah dengan jumlah peserta total	2.02.01	Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk menyusun rencana aksi terkait perencanaan kegiatan pelatihan teknis dan usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah peminat pelatihan dalam rangka memenuhi target PNBPN yang bersumber dari layanan jasa pelatihan teknis. [06] [14]	06 14	Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada penanggungjawab sie Pelatihan Teknis sesuai nomor 1601/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 terlampir rencana aksi	SR SR	selesai	

	adalah 11 orang, yang dalam laporan kegiatan belum dijelaskan bagaimana proses rekrutmennya; c. Laporan masih perlu dilengkapi dengan bukti dokumentasi kegiatan, dan materi dari narasumber; d. Belum ada saran yang spesifik terkait rencana untuk meningkatkan jumlah pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta untuk pelatihan teknis. Penyebab : - Kekurangcermatan penanggung jawab kegiatan dalam perencanaan dan penyusunan laporan kegiatan. - Lemahnya pengendalian internal dari PPK terkait pemenuhan target PNBPN layanan jasa pelatihan							
8	PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan tugas dan fungsi terkait layanan jasa teknis yang dijalankan oleh BSPJI Banjarbaru, salah satunya adalah jasa layanan konsultasi yang pada tahun 2021 terdapat beberapa catatan antara lain: a. Tidak ada penganggaran khusus dan KAK untuk kegiatan layanan jasa konsultasi, namun dalam laporan kajian Lembaga teknologi industri disebutkan bahwa terdapat 4 kegiatan konsultasi (dari target 2 kegiatan) yang dikutip dalam Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi Melalui Dana Kemitraan peningkatan Teknologi Industri (DAPATI), yang belum dijelaskan secara detail bagaimana	2.01.02	Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan kepada Plt. SIE . PJT untuk: - Menyusun KAK dan laporan kegiatan untuk layanan jasa konsultasi; - menetapkan target capaian yang jelas untuk layanan jasa konsultasi. - menyampaikan rencana aksi untuk menambah jumlah klien untuk layanan jasa konsultasi [06] [14]	06 14	- Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada penanggungjawab sie PJT sesuai nomor 1603/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 - laporan KAK dan DAPATI telah disampaikan - rencana aksi dan target capaian sudah disampaikan yang disahkan 21 september 2022	SR SR	selesai	

	pelaksanaannya mulai dari proses pemilihan , pengusulan dan hasil kegiatan nya untuk 4 IKM yang telah terpilih: - IKM Queen Sasirangan , Kota Banjarbaru - KUB Radita Sasirangan Jimpitan Kabupaten Tanah Laut - Kelompok Tani Maju Mandikapau Kabupaten Banjar c. Selain Kegiatan konsultasi yang diikutkan program DAPATI dari BSKJI Pusat, belum terdapat permintaan untuk layanan jasa konsultasi dari industri yang bisa menjadi sumber PNB Penyebab : - Kurangnya perencanaan yang memadai oleh Plt. Sie PJT (selaku penanggungjawab kegiatan) - Kurangnya Komitmen pimpinan dan Plt. Sie SS (selaku penanggung jawab layanan kalibrasi) untuk mendorong capaian layanan jasa teknis di luar pengujian.							
9	PROGRAM DAN KEGIATAN Pada pelaksanaan layanan jasa teknis di lingkungan BSPJI Banjarbaru, telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimum untuk masing-masing layanan. Selama tahun 2021 telah dilakukan analisis pemenuhan layanan terhadap SPM dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni: a. Hanya dilakuakn analisis pemenuhan SPM untuk layanan pengujian; b. Pada laporan layanan pengujian terdapat perbedaan data untuk jumlah sampel layanan di bulan Maret antara	2.01.02	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar memantau menginstruksikan kepada wakil manajemen untuk melakukan evaluasi kesesuaian SPM untuk seluruh layanan (pengujian , kalibrasi, sertifikasi dan kalibrasi) serta melengkapi penjelasan dan informasi terkait evaluasi SPM; [06] - Kepala BSPJI Bnajarbaru menginstruksikan secara tertulis kepada Plt. Sie SS dan PJT untuk memantau kualitas tiap laboratorium terkait pemenuhan SPM layanan khususnya untuk laboratorium mikrobiologi [14]	06 14	- terlampir nota dins 1604/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 - Wakil Manajemen selaku Penanggungjawab Kegiatan telah melakukan evaluasi kesesuaian SPM untuk memantau kualitas - terlampir surat instruksi kepada Plt sie standardisasi dan sertifikasi sesuai surat nomor 1612/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 tgl	SR SR	selesai	

	data rekap sampel layanan (498 sampel) dan data SPM pengujian (493 sampel); c. Disebutkan capaian SPM telah terpenuhi yakni 96,6% dari target sasaran mutu 82%, namun dari posisi trend SPM yang terdiri dari : SPM distribusi, SPM Pengujian (lab), SPM Pengetikan, dan SPM ttd LHU, terdapat beberapa bulan yang capaian SPM nya rendah dibandingkan yang lain namun belum ada penjelasan terkait kondisi tersebut antara lain: 1. Trend SPM : SPM Pengetikan pada bulan mei dengan 82,3 % dan bulan juni 86,2% 2. Trend SPM: SPM ttd LHU bulan Juni 72,7%. d. Dari beberapa layanan pengujian lab , yang paling rendah kesesuaian SPMnya adalah pengujian di lab mikrobiologi, sbb: 1. nama lab : lab lingkungan , tidak sesuai SPM 1,41%; 2. nama lab : lab aneka komoditi , tidak sesuai SPM 5,45%; 3. nama lab : lab mikrobiologi , tidak sesuai SPM 24,91%; 4. nama lab : lab kayu , tidak sesuai SPM 0,00%; Penyebab : - Kekurangcermatan penanggung wakil manajemen (selaku penannggung jawab) dalam evaluasi kesesuaian SPM dan penyusunan laporan. - Lemahnya pengendalian internal Plt. Sie SS dan PJT terkait pemenuhan SPM layanan jasa teknis.				25 juli 2022 - terlampir laporan kualitas tiap laboratorium			
10	PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam pelaksanaan kegiatan	2.01.01	Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan secara tertulis kepada tim pengembangan sistem	14	- Tim pengembangan sistem telah melakukan penyesuaian/perbaikan	SR	selesai	

pelayanan publik di lingkungan BSPJI Bnajarbaru, telah dikembangkan sistem informasi layanan (SIBIRU) untuk mendukung proses pengusulan dan pemantauan layanan jasa terkait secara online. Terkait kegiatan pengembangan sistem yang dilakukan pada tahun 2021, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Tahun 2021 SIBIRU hanya digunakan untuk mendukung layanan pengujian, sedangkan untuk fitur layanan jasa teknis lainnya seperti kalibrasi, sertifikasi, konsultansi sudah ada namun belum aktif dan belum bisa diakses;

b. Dari hasil pengembangan yang dilaksanakan tahun 2021 masih terdapat beberapa fitur/fungsi pada sistem informasi/SIBIRU yang perlu disesuaikan yakni:

- Satuan layanan pengujian pada tampilan dashboard masih berupa jumlah "orang", perlu disesuaikan satuannya menjadi jumlah "order"

- perlu penyesuaian penanggung jawab alur verifikasi layanan sesuai dengan perubahan organisasi (awalnya verifikasi LHU dilakukan oleh Deputi dan Kasie SS);

- Tahapan perhitungan SPM di sistem hanya sampai proses validasi LHU, perlu penyesuaian agar hitungan proses layanan sesuai SPM bisa sampai tahap akhir yakni TTD manul dan upload dokumen LHU.

Penyebab :

- Kekurangcermatan tim

untuk dapat melakukan penyesuaian/perbaikan fitur dan menyusun rencana aksi pengembangan sistem untuk periode yang akan datang [14]

fitur dan menyusun rencana aksi pengembangan sistem sesuai ND Nomor : 1605/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022

- terlampir dokumen rencana aksi dan perbaikan fitur

	pengembangan Sistem dalam melaksanakan tugasnya - Lemahnya pengawasan internal dalam penggunaan sistem informasi							
11	KEUANGAN Terdapat kelemahan pada pelaksanaan Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (akun 521131) berupa pembelian antigen test kit sebesar Rp.15.000.000 antara lain: a. Kesalahan penggunaan akun untuk pembelian swab test rapid antigen, dimana seharusnya menggunakan MAK 521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID -19 karena menghasilkan persediaan, serta intensinya sebagai persediaan (barang tidak langsung habis pakai dan dibeli dalam jumlah banyak) b. Tidak terdapat pencatatan terkait distribusi dan pemakaian swab test rapid antigen oleh pegawai sebanyak 16 paket x 25 pcs = 400 pcs Penyebab : Penyusunan Program dan Penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara memadai.	1.01.09	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar memberikan teguran tertulis kepada penyusun program dan penanggungjawab kegiatan - Kepala BSPJI Banjarbaru agar menginstruksikan penanggungjawab kegiatan untuk kedepannya melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan barang persediaan [05]	05	Teguran tertulis dan instruksi sesuai ND Nomor : 1606/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022	SR	selesai	
12	KEUANGAN Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (MAK 6042.EAA.013.002.E.523121) terdapat kuitansi pembelian	1.01.09	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar memberikan teguran tertulis kepada PPK, Bendahara pengeluaran dan PPSPM - Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan kepada PPK, Bendahara pengeluaran, dan PPSPM agar pendistribusian BBK dan BBM dilengkapi dengan daftar tanda terima serta	05	- Teguran tertulis dan instruksi sesuai ND Nomor : 1607/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022	SR	selesai	

	voucher BBK Pertamina retail/penias maroak dengan kuitansi nomor 117/71.902.77/16092021 tanggal 16 september 2021 sebesar Rp. 10.000.000 dan pembelian voucher BBM untuk mobil dinas di Pertamina retail/penias maroak dengan kuitansi nomor 133/71.902.77/12102021 tanggal 12 oktober 2021 sebesar Rp.5.000.000. Pada pertanggungjawaban keuangannya ditemukan beberapa kelemahan antara lain: a. Tidak dilengkapi dengan nota pembelian BBK dan BBM yang menggunakan voucher sebagai alat pembayarannya b. Tidak terdapat bukti tanda terima voucher diberikan kepada pegawai atas nama siapa saja dan digunakan untuk kendaraan dinas mana saja Penyebab : - Bendahara pengeluaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai - PPSPM tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya - Kurangnya pengendalian internal dari PPK	pertanggungjawabannya dilengkapi dengan nota pembelian dari SPBU [05]						
13	KEUANGAN Dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan lembur pegawai (MAK 6042.EAA.013.001.A.512211), dimana pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.51.648.000 dengan realisasi Rp.51.047.000. Dari hasil pemeriksaan tersebut	3.03.01	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar memberikan arahan tertulis kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan jam kerja secara optimal - Kepala BSPJI Banjarbaru agar memberikan teguran tertulis kepada PPK, Bendahara pengeluaran [05] dan menginstruksikan agar	05	- Teguran Tertulis dan instruksi sesuai ND Nomor : 1608/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 - nota dinas nomor 1595/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/KP/VII/2022 tanggal 22 juli 2022	SR	selesai	
				06		SR		

	terdapat kelemahan pada kegiatannya, antara lain: a. Sistem pengendalian pada kegiatan lembur belum dilakukan secara selektif, karena pemberian uang lembur tidak didasarkan pada pekerjaan yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta masih bersifat rutin (dapat dilakukan di hari dan jam kerja normal). Beberapa contoh diantaranya: a. Sistem pengendalian pada kegiatan lembur belum dilakukan secara selektif , karena pemberian uang lembur tidak didasarkan pada pekerjaan yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta masih bersifat rutin (dapat dilakukan di hari dan jam kerja normal). Beberapa contoh diantaranya: - Penyusunan berkas keuangan , program, kearsipan - inventarisasi BMN - Penyelesaian dokumen arsip, kepegawaian , keuangan , program dan BMN - Penyelesaian kegiatan teknologi industri b. Pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan daftar hadir lembur Penyebab : - Pegawai tidak berkinerja secara maksimal di jam kerja - Bendahara pengeluaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai - kurangnya pengendalian internal dari PPK		selanjutnya melengkapi dokumen pertanggungjawaban lembur dengan daftar hadir lembur [06]		dokumen daftar lembur telah dilampirkan			
14	BMN Terdapat kelemahan terhadap pengelolaan barang persediaan	2.02.07	- Kepala BSPJI Banjarbaru agar memberikan teguran tertulis kepada petugas pengelola persediaan dan petugas klinik	05 09	Teguran tertulis sesuai ND Nomor : 1609/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022	SR SR	selesai	

berupa obat-obatan pada BSPJI Banjarbaru, dimana selama TA 2021 direalisasikan sebesar Rp.959.000 sesuai BAST nomor 42/PPHPBJ/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/XI/2021 tanggal 2 desember 2021 . Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

a. Sudah terdapat kartu kendali untuk barang persediaan obat-obatan, namun tidak diupdate secara rutin. Untuk barang persediaan obat obatan yang pengadaannya dibulan desember 2021 sevesar Rp.2.856.000 tidak dilakukan pencatatn pada kartu kendali

b. Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap petugas pengelola persediaan untuk obat-obatan setelah diterima dari PPK dan dilakukan pencatatan, barang kemudian diserahkan seluruhnya untuk dikelola/simpan ke pihak klinik sehingga menyebabkan stock digudang menjadi kosong demikian juga pada pencatatn persediaannya. Namun setelah dilakukan wawancara terhadap pihak klinik, tidak dilakukan pengelolaan obat-obatan secara memadai dimana petugas klinik tidak melakukan pencatatan terhadap keluar - masuk obat - obatan , serta tidak terdapat kartu kendali / buku pembantu yang digunakan untuk pengelolaan obat-obatan.

Penyebab :

- Petugas Pengelola persediaan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara memadai
- Petugas klinik tidak

[05]

- Kepala BSPJI Banjarbaru menginstruksikan petugas pengelola persediaan secara rutin melakukan pencatatan keluar-masuk barang baik pada aplikasi persediaanmaupun kartu kendali pengelolaan obat-obatan [09]

- terlampir pencatatan keluar masuk barang baik pada aplikasi persediaanmaupun kartu kendali pengelolaan obat-obatan

	melaksanakn tugas dan tanggungjawabnya secara memadai terkait pengelolaan persediaan obat-obatan							
15	BMN Secara umum, Penganggaran barnag persediaan pada BSPJI Banjarbaru telah menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 521811 serta telah dicatat melalui aplikasi persediaan, namun masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan/atau pelaksanaan belanja persediaan, yaitu: a. Belum terdapat SOP persediaan yang secara spesifik mengatur pengelolaan persediaan mulai dari proses penerimaan, pencatatan/penyimpanan dan pengeluaran barnag persediaan. b. Pencatatn barang persediaan pada aplikasi tidak dilaksanakan mengikuti arus barang masuk ke gudang namun masih mengikuti tanggal pertanggungjawaban keuangan, sehingga pencatatn arus keluar masuk barang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. c. Belum seluruh jenis barang persediaan memiliki kartu kendali yang mencatat secara riil arus keluar masuk barang tersebut, khusus untuk persediaan bahan kimia, belum terdapat kartu kendali pembantu yang terletak di masing-masing laboratorium pengguna. c. Belum seluruh jenis barang persediaan memiliki kartu	2.03.01	- Kepala BSPJI Banjarbaru selaku KPA memberikan teguran dan menginstruksikan secara tertulis kepada: - Kepala bagian tata usaha untuk membuat SOP pengelolaan persediaan sesuai dengan bisnis proses yang ada pada BSPJI Banjarbaru - Petugas gudang / pengelola persediaan untuk melakukan validasi atas pengeluaran barnag persediaan -petugas gudang / pengelola persediaan untuk melakukan pencatatan arus keluar masuk barang persediaan pada kartu kendali secara riil sesuai dengan jenis barangnya - PPK, PPSPM dan bendahara pengeluaran gar lebih cermat dalam melaksanakn pengendalian terhadap belanja kegiatan [05] [09]	05	Teguran tertulis dan instruksi sesuai ND Nomor : 1610/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 SOP telah disampaikan terlampir kartu bon permintaan barang/alat keluar terlampir kartu kontrol dan kartu bantu kendali	SR	selesai	

kendali yang mencatat secara riil arus keluar masuk barang tersebut , khusu untuk persediaan bahan kimia, belum terdapat kartu pembantu yang terletak di masing-masing laboratorium pengguna.

d. Pemakaian barang persediaan berdasarkan permintaan dari user yang diusulkan menggunakan bon permintaan barang/alat, namun berdasarkan sampling terhadap form tersebut masih ditemukan bahwa belum dilakukan validasi oleh petugas gudang/ pengelola persediaan serta belum dituliskan jumlah / saldo barang persediaan dan barang yang dikeluarkan dari gudang.

e. Tidak dilakukan pencatatan barang persediaan pada kartu kendali berupa bahan kimia periode September - Desember 2021, antara lain:

- Pekerjaan Pengadaan bahan kimia no SPK 53/SPK/BSKJI/Baristand - Banjarbaru /IX/2021 tanggal 17 september 2021, nilai kontrak Rp.199.387.100 dengan pihak ketiga/rekanan CV. Intan Persada

- Pekerjaan Pengadaan bahan kimia no SPK 59/SPK/BSKJI/Baristand - Banjarbaru /XI/2021 tanggal 8 November 2021, nilai kontrak Rp.85.341.300 dengan pihak ketiga/rekanan CV. Wiratama Surya Pacifik

- Pekerjaan Pengadaan bahan kimia no SPK 65/SPK/BSKJI/Baristand - Banjarbaru /XI/2021 tanggal 26 November 2021, nilai kontrak Rp.199.552.100 dengan pihak ketiga/rekanan

	CV. Trisantoso Sepakat - Pekerjaan Pengadaan bahan kimia no SPK 72/SPK/BSKJI/Baristand - Banjarbaru /XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, nilai kontrak Rp.171.054.400 dengan pihak ketiga/rekanan CV. Wiratama Surya Pacifik Penyebab : Kekurangcermatan petugas gudang/pengelola persediaan dalam melakukan pengendalian pengelolaan barang persediaan.							
16	BMN Terdapat kegiatan pengadaan pemeliharaan yang memenuhi ketentuan sebagai belanja penambahan nilai gedung dan bangunan (533121) dikarenakan pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan serta dari sisi nilai memenuhi persyaratan nilai minimum kapitalisasi, yaitu: a. pekerjaan pemeliharaan gedung berupa perbaikan plapond dan rehabilitasi pahar kawat BI Banjar baru oleh CV bangunan cipta sarana berdasarkan SPK nomor 47/SPK/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021. Pekerjaan tersebut antara lain meliputi pekerjaan pendahuluan serta pemasangan plafon dan aksesorisnya senilai Rp.50.503.259,40; b. Pekerjaan paket pemeliharaan gedung bangunan kantor (tidak	3.03.01	KPA agar memberikan teguran tertulis kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran atas kekurangcermatannya serta [05] memerintahkan kepada petugas BMN untuk melakukan pencatatan masing-masing pekerjaan pada aset terkait sesuai dengan nilai realisasi belanja. [09]	05 09	Teguran tertulis dan instruksi sesuai ND Nomor : 1611/BSKJI/BSPJI-Banjarbaru/VII/2022 terlampir kartu bon permintaan barang/alat keluar terlampir kartu kontrol dan kartu bantu kendali Laporan barang terlampir	SR SR	selesai	

bertingkat) oleh CV. karya utama berdasarkan SPK nomor 40/SPK/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021. Pekerjaan tersebut antara lain meliputi pekerjaan pemasangan keramik, plafon, backdrop, sekat ruangan dan penutupan jendela / lubang angin pada ruang rapat, ruang tunggu dan ruang staf/ lorong 1 (gedung tata usaha) senilai Rp.72.073.780

c. Pekerjaan pemeliharaan rehab ruang pelayanan jasa teknis, teknologi industri dan teras oleh CV. Putera Tri karya berdasarkan SPK nomor 45/SPK/BSKJI/Baristand-banjarbaru/VII/2021 tanggal 13 juli 2021. Pekerjaan tersebut antara lain meliputi pekerjaan pemasangan keramik, plafon dan penutupan jendela/lubang angin pada ruang PJT, TI, Teras dan lorong senilai Rp.125.745.785,-

d. Pekerjaan pemeliharaan gedung bangunan kantor tidak bertingkat (gedung administrasi) oleh CV. Putera Tri karya berdasarkan SPK nomor 23/SPK/BSKJI/Baristand-Banjarbaru/IV/2021 tanggal 13 april 2021, pekerjaan tersebut antara lain meliputi pekerjaan pemasangan keramik , plafon dan penutupan jendela/lubang angin pada ruang staff lorong 2, ruang klinik, ruang staff TU 1 dan 2 , ruang server, ruangan keuangan, ruang kepala tata usaha, ruang perpustakaan serta lorong akses ke ruang perpustakaan dan layanan senilai

Rp.168.473.113

Penyebab :

Kekurangan PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pengendalian terhadap belanja kegiatan

INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat BSPJI Banjarbaru Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan lancar oleh Fungsi Pengembangan Jasa Industri BSPJI Banjarbaru.

Pelaksanaan kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BSPJI Banjarbaru guna menjamin pelaksanaan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat pengguna layanan balai.

Indeks kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi dirancang sedemikian rupa dalam rangka menggali informasi tentang kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikandan juga dalam mendapatkan masukan/saran untuk perbaikan/peningkatan layanan yang diberikan. Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah dengan metode tertentu sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan gambaran dari kinerja layanan yang diberikan oleh balai. Laporan ini memuat hasil Indeks Kepuasan Masyarakat BSPJI Banjarbaru periode Januari - Desember 2022.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak dan Tim Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022. Akhir kata, kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya instansi terkait penyedia layanan publik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Banjarbaru, Desember 2022

Penyusun,



Evy Setlawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Hasil Yang Ingin Dicapai	3
1.6. Manfaat dan Dampak	3
BAB II. METODE SURVEI.....	5
2.1. Pelaksanaan dan Teknis Survei	5
2.1.1. Tahap Persiapan	5
2.1.2. Tahap Proses Pengumpulan Data.....	8
2.1.3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data.....	9
2.1.4. Penyusunan Laporan	10
2.2. Tim Survei Kepuasan Masyarakat.....	10
2.3. Jadwal Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.....	11
BAB III. ANALISIS HASIL SURVEI	12
3.1. Jumlah Pelanggan BSPJI Banjarbaru Tahun 2022.....	12
3.2. Hasil e-survey.....	13
3.2.1. Identitas Responden.....	13
3.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	14
BAB IV. RENCANA AKSI.....	18
BAB V. PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	19
LAMPIRAN 1. SK TIM PELAKSANA SKM	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1. Kuisisioner IKM BSPJI Banjarbaru	7
Tabel 2. 2. Kriteria Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	10
Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.....	11
Tabel 3.1. Jumlah Pelanggan Tahun 2022	12
Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasar Jenis kelamin.....	13
Tabel 3.3. Jumlah Responden Berdasar Pekerjaan	13
Tabel 3.4. Jumlah Responden dan Nilai IKM Berdasar Jenis Pelayanan.....	13
Tabel 3.5. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 BSPJI Banjarbaru Untuk Semua Layanan Jasa.....	14
Tabel 3.6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.....	15
Tabel 3.7. Analisa Hasil yang telah dicapai.....	16
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri Tahun 2018-2022	17
Tabel 4.1. Tindakan Peningkatan Tahun 2022.....	18
Tabel 4.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan IKM Tahun 2023	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Tahapan Survei.....	5
Gambar 2.2. Isian pada Link Survei.....	9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru kembali melakukan Survei kepuasan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tahun 2022. Data hasil survei yang dilakukan selama 1 (satu) tahun telah diolah untuk mendapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Data hasil survei tersebut merupakan salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BSPJI Banjarbaru. Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan BSPJI Banjarbaru dimana Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya; mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; mengetahui kelemahan atau kekurangan pada unit pelayanan BSPJI Banjarbaru sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik; dan sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit pelayanan BSPJI Banjarbaru. Pelaksanaan dan Teknis Survei dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Pelaksanaan *e-survey* IKM dilakukan pada tahun 2022 melalui penyebaran *e-survey* IKM kepada pengguna layanan jasa BSPJI Banjarbaru. Jumlah responden BSPJI Banjarbaru selama tahun 2022 adalah sebesar 348 responden, sehingga jumlah minimal responden telah terpenuhi. Nilai IKM BSPJI Banjarbaru tahun 2022 adaah sebesar 3,62, dengan kinerja unit pelayanan sangat baik dengan mutu pelayanan A. Dalam perhitungan terdapat 9 unsur variabel pelayanan yang dikaji dan dibuat dalam bentuk kuesioner. Nilai terendah ($< 3,5$) terdapat pada penilaian kecepatan waktu penyelesaian ($U3=3,48$), sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan ($U9=3,79$).

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kepengintahan yang baik (*good governance*) adalah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survey dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat/*stakeholder* yang memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru kembali melakukan Survei kepuasan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tahun 2022. Data hasil survei yang dilakukan selama 1 (satu) tahun telah diolah untuk mendapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Data hasil survei tersebut merupakan salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BSPJI Banjarbaru.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/3/ 2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
7. Instruksi Menteri Perindustrian No. 101/M-IND/3/2013 tentang Peningkatan Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan BSPJI Banjarbaru dimana Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pada unit pelayanan BSPJI Banjarbaru sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit pelayanan BSPJI Banjarbaru

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengukuran survei dalam rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup keseluruhan pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh BSPJI Banjarbaru selama tahun 2022. Nilai dari kuesioner yang diberikan kepada pengguna layanan jasa dalam survei ini, merupakan data utama yang digunakan sebagai evaluasi kinerja terhadap kualitas pelayanan jasa di BSPJI Banjarbaru secara komprehensif.

1.5. Hasil Yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit pelayanan BSPJI Banjarbaru melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

1.6. Manfaat dan Dampak

Manfaat hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di BSPJI Banjarbaru adalah :

- a. Mengetahui harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh bSPJI Banjarbaru.
- b. Mendapatkan masukan tentang pengembangan pelayanan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
- c. Sebagai bahan masukan untuk menyusun program peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

BAB II. METODE SURVEI

2.1. Pelaksanaan dan Teknis Survei

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada BSPJI Banjarbaru dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada pengguna jasa layanan (responden). Adapun tahapan Survey adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Tahapan Survei

2.1.1. Tahap Persiapan

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk Survey IKM tahun 2022 sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun jumlah dan materi parameter/pertanyaan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 terdiri dari:
 - a. Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

c. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan

d. Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi pelayanan

f. Kompetensi pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

g. Perilaku pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan

h. Sarana dan prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (Komputer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata Cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Masing-masing unsur penilaian mempunyai rentang nilai dari 1 sampai 4, dengan kategori berturut-turut adalah Tidak Baik, Kurang Baik, Baik dan Sangat Baik.

2. Merancang *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun

Tabel 2. 1. Kuisioner IKM BSPJI Banjarbaru

Nama Responder :.....
Jenis Kelamin :.....
Perusahaan:
Petunjuk Pengisian :
Bagian I : Kritik dan Saran
.....
.....
Bagian II. Berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan yang paling sesuai.
<u>Aspek Penilaian terhadap Pelayanan BSPJI Banjarbaru</u>
TS : Tidak Sesuai
KS : Kurang Sesuai
S : Sesuai
SS : Sangat Sesuai

No.	Uraian	Aspek Penilaian			
		TS	KS	S	SS
1	Penilaian Kesesuaian Persyaratan				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?				
2	Penilaian Kemudahan				
	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?				
3	Penilaian Kecepatan				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?				
4	Penilaian Kewajaran Biaya				

	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ?				
5	Penilaian Kesesuaian Produk Layanan				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?				
6	Penilaian Kompeten				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?				
7	Penilaian Kesopanan dan Keramahan				
	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?				
8	Penilaian Kualitas				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana prasarana ?				
9	Penilaian Penanganan Pengaduan				
	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?				

2.1.2. Tahap Proses Pengumpulan Data

- Pelaksanaan *e-survey* IKM dilakukan pada bulan Januari – Desember 2022.
- Melakukan penyebaran *e-survey* IKM kepada pengguna layanan jasa BSPJI Banjarbaru baik melalui wawancara tatap muka maupun melalui komunikasi secara daring dengan menyertakan kuesioner elektronik melalui website. Form survei kepuasan pelanggan dapat diakses secara online, dimanapun dan kapanpun oleh pelanggan melalui website BSPJI Banjarbaru.
- E-survey* dilakukan dengan mengakses pada link berikut ini:
<http://surveysibiru.kemenperin.go.id/>

Untuk meningkatkan kualitas layanan jasa BSPJI Banjarbaru di masa mendatang, kami akan sangat berterima kasih apabila Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini.

Informasi Pelanggan

Nama Responder

Nama Perusahaan/Instansi/IKM/Perorangan

Halaman 1 - 12 [Selanjutnya](#)

Gambar 2.2. Isian pada Link Survei

- d. *Melakukan* pengecekan secara berkala pada sistem *e-survey* untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

2.1.3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Hasil pengolahan data dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11 (N)$$

Setelah diperoleh bobot nilai rata-rata tertimbang pada setiap indikator, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan pada pengukuran indeks adalah nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator pelayanan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, konversi dilakukan pada nilai indeks diantara 25 - 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25. Rumus konversinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Konversi Indeks} = \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \times 25$$

Setelah langkah ke-3 dilakukan, maka hasilnya dapat dikategorikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2. Kriteria Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Internal Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.1.4. Penyusunan Laporan

Kegiatan pengukuran survei dalam rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat oleh BSPJI Banjarbaru selama tahun 2022 didokumentasikan dalam bentuk laporan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BSPJI Banjarbaru.

2.2. Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Tim pelaksanaan survei dilakukan secara mandiri oleh BSPJI Banjarbaru. Tim Pelaksana sebagaimana pada sebagaimana Surat Keputusan No. 290 Tahun 2022 tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 (lampiran 1).

2.3. Jadwal Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat BSPJI Banjarbaru diawali bulan Januari sampai bulan Desember 2022 untuk semua pelanggan yang mendapat pelayanan baik pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi maupun pendampingan industri. Adapun Jadwal kegiatan penilaian survei Indeks Kepuasan Masyarakat BSPJI sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan instrument survei												
2	Edukasi ke pelanggan												
3	Melaksanakan survei (pengumpulan data)												
4	Mengolah hasil survei												
5	Menyajikan dan melaporkan hasil												

BAB III. ANALISIS HASIL SURVEI

3.1. Jumlah Pelanggan BSPJI Banjarbaru Tahun 2022

Data pelanggan yang melakukan transaksi di BSPJI Banjarbaru pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Pelanggan Tahun 2022

Bulan	Total Pelanggan
Januari	93
Februari	19
Maret	54
April	29
Mei	13
Juni	58
Juli	32
Agustus	27
September	34
Oktober	18
November	46
Desember	23
Jumlah	446

Dari jumlah klien yang melakukan transaksi untuk layanan jasa teknis baik pengujian, sertifikasi, kalibrasi, maupun pendampingan industri diperoleh jumlah 446 pelanggan. Sesuai dengan lampiran II Permenpan dan RB No. 14 tahun 2017 maka jumlah responden yang disurvei sebanyak 170 (sampel Morgan dan Krejcie). Berdasarkan ketentuan jumlah sampel Morgan dan Krejcie, apabila jumlah populasi (pelanggan) sebanyak 440, diperlukan minimal sampel (responden) sejumlah 205 (46,6%). Apabila di BSPJI Banjarbaru selama kurun waktu satu tahun terdapat 446 pelanggan, maka minimal responden sebesar 208. Jumlah responden BSPJI Banjarbaru selama tahun 2022 adalah sebesar 348 responden, sehingga jumlah minimal responden telah terpenuhi.

3.2. Hasil e-survey

3.2.1. Identitas Responden

Jumlah responden survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BSPJI Banjarbaru mencapai 348 responden dari total 446 pelanggan, terdiri dari :

Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasar Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	233 responden	66,95%
2	Perempuan	115 responden	33,05%
Total		348 responden	100%

Tabel 3.3. Jumlah Responden Berdasar Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	42 responden	12,07%
2	Dosen/Mahasiswa	93 responden	26,72%
3	Swasta/Wiraswasta	189 responden	54,31%
4	Lainnya (BUMN/Konsultan/perorangan)	24 responden	6,90%
Total		348 responden	100%

Tabel 3.4. Jumlah Responden dan Nilai IKM Berdasar Jenis Pelayanan

Layanan Jasa	Jumlah Responden	% Responden	Nilai IKM
Pengujian	333	95,69	3,61
Sertifikasi	11	3,16	3,55
Pendampingan Industri	2	0,57	3,61
Kalibrasi	2	0,57	3,61
Total	348	100,00	

3.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.5. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 BSPJI Banjarbaru Untuk Semua Layanan Jasa

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur
U1	Persyaratan dengan jenis pelayanan	3,63
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,67
U3	Waktu pelayanan	3,48
U4	Biaya/tarif	3,50
U5	Produk, spesifikasi, dan jenis layanan	3,59
U6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	3,62
U7	Kesopanan dan keramahan	3,70
U8	Kualitas sarana dan prasarana	3,57
U9	Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,79
Nilai Indeks		3,62
Nilai Dasar		90,5
Mutu Pelayanan		A (Sangat Baik)

Berdasarkan Tabel 3.5, terlihat bahwa kinerja unit pelayanan BSPJI Banjarbaru tahun 2022 adalah **sangat baik** dengan **mutu pelayanan A**. Dalam perhitungan terdapat 9 unsur variabel pelayanan yang dikaji dan dibuat dalam bentuk kuesioner. Nilai terendah ($< 3,5$) terdapat pada penilaian kecepatan waktu penyelesaian ($U3=3,48$), sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan ($U9=3,79$). Penilaian ketepatan waktu dinilai paling rendah, dikarenakan pelanggan masih banyak yang berharap agar waktu penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat dari SPM yang telah ditetapkan, di sisi lain, BSPJI Banjarbaru telah melakukan penyelesaian pekerjaan atau pelayanan sesuai dengan SPM. Sebagai bentuk usaha BSPJI Banjarbaru dalam rangka perbaikan hasil survei tersebut diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada pelanggan terkait kebijakan SPM dalam pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap SPM pelayanan yang telah ditetapkan.

Kewajaran biaya/tarif menduduki urutan terendah kedua setelah penilaian kecepatan waktu penyelesaian. Biaya/tarif dalam hal ini merupakan biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara (BSPJI Banjarbaru) yang besarnya telah ditetapkan berdasar ketentuan yang berlaku, yaitu PP Nomor 54 tahun 2021, Permenperin 19 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.02/2022. Tidak semua pelanggan mengetahui tentang adanya diskon sesuai peraturan tarif, sehingga bagi pelanggan, khususnya pelanggan industri kecil menengah menganggap tarif pelayanan BSPJI Banjarbaru relatif mahal. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi diskon tarif, khususnya kepada pelanggan industri kecil menengah.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapat nilai tertinggi disebabkan karena pengaduan yang diterima petugas telah dilakukan investigasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan target yang telah ditetapkan (maksimal 8 hari kerja). Keluhan pelanggan yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) pengaduan dan telah ditindaklanjuti melalui surat penjelasan dan penerbitan amandemen Laporan Hasil Uji (LHU). Sistem Informasi informasi BSPJI Banjarbaru yang dikembangkan sejak tahun 2021 juga mendukung peningkatan pelayanan publik BSPJI Banjarbaru. Pengembangan sistem ini bertujuan salah satu utamanya guna memenuhi tuntutan pelanggan terhadap lamanya waktu penyelesaian pelayanan agar bisa lebih dipercepat.

Kesopanan dan keramahan menduduki urutan tertinggi kedua setelah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hal ini menandakan peningkatan layanan publik juga tidak lepas dari peran SDM, oleh karena itu setiap tahunnya rutin dilakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik internal maupun eksternal. Berbagai jenis pelatihan tidak hanya diberikan kepada ASN, namun juga kepada para PPNPN. Pelatihan diberikan dari petugas yang berada di pintu terdepan sampai dengan bagian administrasi, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima.

Data nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setiap bulan dan selama tahun 2022 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Bulan	Jumlah Responden	Nilai IKM
Januari	20	3,75
Februari	8	3,50
Maret	21	3,73
April	13	3,60
Mei	17	3,83
Juni	15	3,63
Juli	62	3,51
Agustus	46	3,67
September	56	3,53
Oktober	34	3,62
November	31	3,54
Desember	25	3,52
Total	348	3,62

Pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan BSPJI Banjarbaru pada bulan Januari-Desember 2022 terhadap seluruh bidang pelayanan dengan diperolehnya 348 responden dari 446 pelanggan pada unit pelayanan BSPJI Banjarbaru.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama TA 2022 adalah rata-rata sebesar 3,62 Indeks.

Tabel 3.7. Analisa Hasil yang telah dicapai

Indikator Kinerja Perjakin	Target	Capaian	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,5	Indeks 3,62	103,43

Berdasarkan data di atas, maka perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat TA 2022 sebesar 3,62 dapat memenuhi target sebesar 3,5. Jumlah responden yang mengisi adalah sebanyak 77,58% dari total 446 pelanggan. Bila dibandingkan, maka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,84	3,84	3,70	3,60	3,62

Capaian IKM pada tahun 2022 telah memenuhi target Perjakin Balai (sebesar 3,5 indeks), selain itu nilai IKM BSPJI Banjarbaru pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. BSPJI Banjarbaru telah berkomitmen terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, salah satunya dengan melakukan inovasi pelayanan berupa pengembangan sistem informasi baru yaitu Sistem Informasi BSPJI Banjarbaru atau “SIBIRU”. Dengan adanya SIBIRU pelanggan tidak perlu lagi melakukan order dengan mendatangi Balai, namun dapat melakukan permohonan transaksi melalui aplikasi SIBIRU. Demi memenuhi kepuasan masyarakat, selain aplikasi SIBIRU maka dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta kenyamanan dalam satu gedung layanan terpadu yaitu *Banua Industrial Centre* (BIC). BIC mengintegrasikan semua layanan jasa BSPJI Banjarbaru, seperti layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan pendampingan industri (bimbingan teknis).

BAB IV. RENCANA AKSI

Capaian nilai IKM perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Adapun tindakan peningkatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 1.Tindakan Peningkatan Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Tindakan Peningkatan
U1	Persyaratan dengan jenis pelayanan	Update syarat yang harus dipenuhi pada jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif di website dan memperbaharui standar pelayanan dan dikomunikasikan serta disepakati dalam kegiatan temu industri (<i>public hearing</i> standar pelayanan publik)
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melengkapi dan memperbaharui prosedur layanan jasa dan informasi publik, kemudian diupload di website sehingga mudah diakses masyarakat, dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi sistem, mekanisme dan prosedur
U3	Waktu pelayanan	Memantau SPM setiap bulan saat kegiatan monitoring dan evaluasi
U4	Biaya/tarif	Melakukan update data sesuai PP No. 54 tahun 2021 dan Permenperin No. 19 Tahun 2021 serta sosialisasi diskon tarif bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan/persyaratan
U5	Produk, spesifikasi, dan jenis layanan	Memberikan informasi layanan melalui temu industri, media sosial, website dan melakukan komunikasi yang intens terhadap permintaan pelanggan
U6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	Melakukan pelatihan internal dan eksternal, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan kompetensi
U7	Kesopanan dan keramahan	Pelatihan kehumasan, diklat motivasi pegawai dan sosialisasi untuk peningkatan pelayanan prima
U8	Kualitas sarana dan prasarana	Menambah desk information untuk menambah fasilitas di ruang pelayanan, peremajaan komputer, pengembangan aplikasi SIBIRU
U9	Penanganan pengaduan, saran, masukan	Selain dapat mengajukan komplain lewat surat, pengaduan dapat dengan mudah diajukan via website

Tabel 4.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan IKM Tahun 2023

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu	Penanggung-jawab (PJ)
1	Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan	Pemangkasan jumlah hari kerja / Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengujian, sertifikasi, kalibrasi (dibahas saat Tinjauan Manajemen Bulan Januari 2023), sosialisasi SPM	Tahun berjalan	Ketua Tim Fungsi SS, PK, OTIPK, WM
2	Biaya/tarif	Sosialisasi peraturan tentang adanya tarif terhadap pelanggan yang datang dan edukasi terdapat diskon tarif bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan	Tahun berjalan	Ketua Tim PJI
3	Kualitas sarana dan prasarana	Pengembangan SIBIRU terkait: perbaikan dashboard layanan, perhitungan SPM via sistem, perform analis, optional LHU utk amandemen dan suplemen, integrasi SIP & Sibiru, dan notifikasi sibiru via WhatsApp di semua layanan. Tanda tangan LHU menggunakan tanda tangan elektronik Menambah sarana prasarana untuk seperti: fasilitas bermain anak, tempat charger HP, sistem tunggu antrian, kanopi tempat paker pengunjung	Tahun berjalan	KTU, PJ sistem informasi,
4	Produk, spesifikasi dan jenis layanan	Selalu update informasi layanan di berbagai media sosial (website), meningkatkan kerjasama, evaluasi IKM secara berkala; konsisten dalam penyebaran link kuesioner kepuasan pelanggan yaitu dengan cara membuat protect open password LHU	Tahun berjalan	Ketua tim informasi, PJ Sistem Informasi
5	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	Mengikuti pelatihan pelayanan prima / sosialisasi untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan	Tahun berjalan	Ketua Tim PJI

BAB V. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Keberhasilan BSPJI Banjarbaru dalam mencapai target yang diminta merupakan sebuah wujud keberhasilan atas usaha peningkatan pelayanan publik yang dilakukan selama ini. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada BSPJI Banjarbaru sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya dalam mengefektifkan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat.

4.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil e-survey terhadap pelayanan, maka perlu upaya untuk memperbaiki waktu layanan sehingga menjadi cepat sehingga dapat sesuai dengan waktu pelayanan yang dijanjikan dalam standar layanan. Untuk itu yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal BSPJI Banjarbaru
2. Melakukan pembekalan pelayanan prima
3. Meningkatkan kegiatan yang dapat menjadi jembatan antara pihak BSPJI Banjarbaru dengan pihak perusahaan industri/ badan usaha agar lebih mengenalkan layanan jasa/ *problem solving* dan/ataupun penawaran kerjasama.
4. Melakukan analisis dan evaluasi kuesioner kepuasan pelanggan guna meningkatkan layanan jasa kepada industri serta melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan publik terutama dalam merespon pelanggan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mempertahankan serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan
5. Melakukan upaya menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan yaitu dengan cara membuat protect open password pada pengiriman softcopy LHU kepada pelanggan, dan untuk mendapatkan password pada LHU tersebut, pelanggan harus mengisi kuesioner kepuasan pelanggan terlebih dahulu

LAMPIRAN 1. SK TIM PELAKSANA SKM



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU**

Jalan Panglima Batur Barat No.2 Telp. (0511) 4774861- 4772115, 4772461
Facs. (0511) 4772115 E-mail : baristand.banjarbaru@gmail.com
BANJARBARU - KALIMANTAN SELATAN (70711)

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

Nomor 290 Tahun 2022

Tentang

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN PELANGGAN
MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya kelancaran pelaksanaan kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, maka perlu menunjuk/mengangkat tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018, tanggal 7 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Permenperin Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 202 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, Nomor : 02 Tahun 2022, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM DIPA Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Nomor: 203 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, Nomor : 03 Tahun 2022, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Banjarbaru.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-019.07.247232/2022 Tanggal 17 November 2021 dengan petunjuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja T.A. 2022 dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 serta mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai dengan jabatan pada kolom 3 (tiga).
- KEDUA : Menginstruksikan kepada petuga-petugas tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-019.07.247232/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 7 Oktober 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BSPJI BANJARBARU



Ir. ARHAMSYAH, MP.

NIP. 19660310 199203 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BSPJI Banjarbaru
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 290 Tahun 2022
Tanggal : 7 Oktober 2022

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PERSONIL TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU**

NO. 01	NAMA 02	JABATAN 03	URAIAN TUGAS 04
1.	Dr. Evy Setiawati, S.Si, MT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.
2.	Dwi Harsono, S.Hut	Ketua	Mempersiapkan serta melaksanakan kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.
3.	Vembi Danang Nuryuono, A.Md	Anggota	Membantu ketua dalam persiapan administrasi dan tugas lainnya dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru dengan sebaik - baiknya
4.	Abdul Qodir	Anggota	
5.	Ariesta Pristia Anggari	Anggota	
6.	Ahmad Riduwan	Anggota	

Banjarbaru, 7 Oktober 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BSPJI BANJARBARU


Ir. ARHAMSYAH, MP
NIP. 19660310 199203 1 003

REKAP IP ASN BSKJI TA. 2022

No	Unit Kerja	Nilai (Data 10 Februari 2023)
1	Sekretariat BSKJI	68,11
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	57,30
3	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	59,72
4	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	46,72
5	Pusat Industri Hijau	65,07
6	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan	72,75
7	BBSPJI Agro	63,40
8	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam	75,75
9	BBSPJI Tekstil	74,70
10	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	73,70
11	BBSPJI Selulosa	74,73
12	BBSPJI Logam dan Mesin	72,44
13	BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik	76,32
14	BBSPJI Kerajinan dan Batik	81,79
15	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	77,07
16	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	74,25
17	BSPJI Banda Aceh	56,67
18	BSPJI Medan	73,36
19	BSPJI Padang	73,63
20	BSPJI Palembang	81,51
21	BSPJI Bandar Lampung	70,71
22	BSPJI Surabaya	82,76
23	BSPJI Banjarbaru	83,73
24	BSPJI Pontianak	73,61
25	BSPJI Samarinda	80,43
26	BSPJI Manado	71,98
27	BSPJI Ambon	74,28
28	BSPJI Jakarta	75,50
29	BSPJI Pekanbaru	77,67
	Rata rata BSKJI	72,06

NILAI DISIPLIN PEGAWAI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) BANJARBARU
TAHUN 2022

No	NAMA	NILAI DISIPLIN												NILAI AKHIR
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Abdul Hair	100	100	99,09	100	100	100	98,10	100	100	100	100	100	99,77
2	Abdul Qodir	X	X	X	99,47	100	97,62	98,57	96,82	96,82	97,62	100	98,64	98,40
3	Afandy Bayu Nurcahyo	98,10	96,67	91,82	90,00	90,00	96,19	91,9	97,27	94,55	95,71	97,27	97,73	94,77
4	Andi Gunadi	98,10	100	100	97,37	98,00	100	99,05	99,55	100	99,52	100	99,09	99,22
5	Anhar Firdaus	77,14	100	100	98,42	100	100	100	100	100	100	100	98,64	97,85
6	Arhamsyah	96,19	94,44	92,27	91,05	90,67	98,57	88,1	69,55	98,18	93,81	96,82	96,82	92,21
7	Aslan Prayudi	100	97,22	96,82	96,84	100	100	100	95,68	96,82	100	99,55	99,09	98,50
8	Aurel Widya Ningsih	X	X	100	100	100	100	96,67	93,86	96,82	98,57	99,55	95,45	98,09
9	Bakat	100	100	90,23	95,79	100	97,86	100	100	100	98,1	98,18	98,64	98,23
10	Budi Tri Cahyana	100	98,33	98,18	100	99,33	96,67	95,71	97,27	100	95,71	96,36	98,18	97,98
11	Chatimatun Nisa	100	100	94,55	98,95	98,67	99,05	100	98,64	98,64	100	97,73	97,27	98,63
12	Desi Mustika Amaliyah	97,14	92,78	99,55	96,32	100	94,29	91,9	96,82	94,55	90	95,91	72,27	93,46
13	Devan Surya Adrian	X	X	100	97,89	100	96,19	99,52	100	99,09	97,62	95	97,27	98,26
14	Dewi Susilawati	99,52	100	97,05	97,89	98	100	98,57	100	96,36	95,71	98,64	94,77	98,04
15	Diky Subhanuddin	95,71	99,44	96,36	93,68	91,33	97,62	98,57	85,45	100	97,62	95,91	96,36	95,67
16	Dwi Harsono	100	98,89	96,82	98,95	95,33	99,52	98,57	98,18	98,64	69,52	96,14	98,18	95,73
17	Endang Gembirawati	99,05	100	94,32	99,47	98,67	98,57	97,14	94,55	95,91	100	83,64	97,27	96,55
18	Evy Setiawati	100	50	90	84,21	56	99,05	92,86	89,55	93,18	96,19	94,09	97,27	86,87
19	Faiza Elisa Hasfianti	99,05	100	100	96,84	100	98,1	95,24	98,64	97,73	97,14	80,45	97,27	96,71
20	Farida Hasanah	99,05	99,44	98,18	98,95	94	95,71	94,76	97,73	98,64	73,33	97,27	87,27	94,53
21	Fika Kurniawati	91,67	97,22	94,77	95,79	94	96,67	97,62	85,45	95,45	92,62	95,68	90,45	93,95
22	Fitri Yulianti	100	100	55,45	40	40	76,67	98,57	100	93,64	100	100	95,45	83,32
23	Galang Rohidi	X	X	X	100	98,67	95,24	97,62	100	98,64	94,76	98,64	95,45	97,67
24	Hafiz Atma Sasmita	X	X	X	100	98,67	95,24	95,71	96,82	98,64	94,76	97,73	95,91	97,05
25	Hamlan Ihsan	100	100	98,64	96,84	88,67	99,52	99,52	95	84,09	98,57	96,36	97,27	96,21
26	Handrian Syahputra Siregar	100	93,89	94,55	96,32	90,67	96,19	97,14	96,82	96,82	95,71	94,09	97,27	95,79
27	Hanif Ilham Ramadhan Fatriansyah	X	X	X	99,74	94	97,62	96,19	98,64	94,77	99,05	98,64	98,64	97,48
28	Happy Rizky Cindyawati	X	X	X	100	99,33	100	98,57	93,64	100	99,52	99,09	100	98,91
29	Hariaty Tandi Sobon	X	X	X	99,21	99,33	96,67	99,52	99,09	97,27	99,52	99,09	95,45	98,35
30	I Dewa Gede Putra Prabawa	90	90	90	90	90	90	90	90,45	100	100	98,18	88,18	92,23
31	Jojo Kakanda Purba	X	X	X	100	100	95,95	97,62	100	100	100	98,64	100	99,13
32	Kartika Inderiani	100	100	100	100	100	98,1	100	100	100	98,1	99,09	99,55	99,57
33	Khairul Fauziah Hanisa	X	X	X	100	99,33	99,52	96,19	100	95	100	97,27	99,09	98,49
34	M. Aswar Zulhi	X	X	X	99,47	100	92,86	97,14	94,55	95,45	94,29	95,45	93,64	95,87
35	M. Isa Anshari	99,52	100	99,09	100	98,67	100	99,52	100	100	100	100	97,27	99,51
36	Mangatas Siregar	99,05	99,44	99,09	92,89	95,33	97,14	95,24	95,45	100	94,76	96,82	95,45	96,72
37	Mega Rahmadani	X	X	X	100	97,33	100	100	96,36	97,27	100	100	99,55	98,95
38	Miyono	92,86	100	98,64	100	98	96,67	98,57	93,64	98,64	94,76	97,73	95	97,04
39	Mochamad Fathi Rizqullah	98,1	97,78	94,09	96,32	92	97,62	92,86	94,09	97,73	98,1	93,64	96,36	95,72
40	Mohammad Listianto Raharjo	90	90	90	90	90	90	90	87,95	95,91	79,05	95,45	98,64	90,58
41	Muhamad Ridwan	90,48	90,56	94,55	96,84	97,33	95,24	99,52	94,09	91,82	100	95,91	95,91	95,19

No	NAMA	NILAI DISIPLIN												NILAI AKHIR
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
42	Muhammad Kendar Oktansyah	X	X	X	98,16	100	99,05	94,76	97,27	97,27	99,52	97,73	100	98,20
43	Muhammad Khairul Dzakirin	92,38	96,11	95,91	100	89,67	98,57	90,48	97,5	91,36	96,67	98,18	95	95,15
44	Muhammad Khalish Hafizh	98,57	97,78	99,55	97,37	100	96,19	99,52	97,73	88,18	98,1	98,64	64,09	94,64
45	Muhammad Sobirin	93,81	100	100	99,74	90,67	96,67	100	83,64	100	98,1	100	98,18	96,73
46	Muhammad Very Fedriansa	X	X	98,18	95	100	100	99,52	96,82	100	97,62	98,18	99,55	98,49
47	Muntashir Rakhman	92,14	98,89	93,18	88,42	95,33	100	100	100	100	98,1	95,68	98,64	96,70
48	Muses Aprilus	99,52	98,89	92,05	92,11	98	97,62	98,1	91,36	98,64	96,67	97,27	71,82	94,34
49	Nadra Khairiah	99,05	100	98,64	96,32	97,33	96,19	74,29	99,09	99,55	99,52	95,91	59,09	92,92
50	Nazarni Rahmi	99,52	100	99,09	96,32	98,67	96,19	99,52	99,09	96,36	96,19	97,73	96,36	97,92
51	Noor Irawan	98,57	95,56	91,14	91,58	86,67	71,19	93,33	92,73	94,55	92,38	90	96,36	91,17
52	Nurdin	98,1	97,78	95	100	94,67	93,33	95,24	97,27	99,09	96,19	93,64	97,73	96,50
53	Nurhidayati	88,1	86,39	100	99,47	94,67	99,52	93,81	92,73	95	92,86	94,09	96,59	94,44
54	Nurmilatina	99,05	99,44	98,64	98,95	100	95,24	99,52	78,18	95	89,76	96,82	90	95,05
55	Panji Saputra	97,14	98,33	97,73	100	96	98,1	96,67	98,18	99,09	95,71	95,91	95,91	97,40
56	Rais Salim	98,1	100	100	94,47	98,67	98,57	97,62	98,64	98,18	99,52	98,18	98,64	98,38
57	Retno Utami Purbaningtyas	100	100	100	99,47	99,33	95,71	99,05	99,55	87,73	99,05	99,55	98,64	98,17
58	Ridla Nor Hadi	97,14	95,56	100	100	99,33	95,71	96,19	97,27	96,36	97,62	96,36	97,73	97,44
59	Rinne Nintasari	99,52	100	99,55	99,47	72	97,14	97,14	98,64	95,45	99,05	98,18	98,64	96,23
60	Rosnaeni	100	100	100	100	95,33	99,52	99,52	100	98,64	99,52	99,55	99,55	99,30
61	Rufida	100	92,22	98,18	92,11	100	96,19	100	96,82	96,82	80	100	96,82	95,76
62	Saibatul Hamdi	100	100	97,27	99,47	100	95,24	96,67	98,18	98,18	96,19	95,45	99,55	98,02
63	Santy Diah Suryani	40	90	100	100	100	100	100	100	99,55	100	100	99,55	94,09
64	Siti Faridah	100	97,78	97,73	95	100	100	100	99,09	100	100	98,64	99,55	98,98
65	Sri Hidayati	99,52	100	100	100	95,33	99,52	100	99,55	98,64	99,52	95,91	98,64	98,89
66	Taufik Riyadi	100	100	92,27	98,95	98,67	96,67	93,81	93,64	95,45	93,33	90,91	96,82	95,88
67	Vembi Danang Nuryuono	96,67	96,67	94,55	100	100	92,38	98,1	96,82	99,09	100	100	96,82	97,59
68	Wahid Adhi Suryawan	98,1	99,44	96,36	98,95	98,67	99,52	98,57	99,09	99,09	99,52	98,18	99,55	98,75
69	Yanga Perwira	X	X	X	100	96,67	99,52	98,10	95,00	96,82	97,62	94,55	95,45	97,08
70	Yanuario	90,48	97,78	91,59	97,63	85	98,1	97,14	96,36	99,09	100	98,18	94,55	95,49

Banjarbaru, 2 Januari 2023
 Kepala BSPJI Banjarbaru

 Arhamsyah

NOTA DINAS

Nomor : **19** /BSPJI-Banjarbaru/KP/II/2023
Tgl. 2 Januari 2023

Berikut Daftar Pegawai BSPJI Banjarbaru dengan keterlambatan login masuk dan tidak login pulang pada bulan Desember 2022.

Keterlambatan Login Masuk

No.	Pegawai	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Devan Surya Adrian	Pengadministrasi Keuangan	2
2.	Muhamad Ridwan	Pengelola BMN	2
3.	Muntashir Rakhman	Arsiparis	2
4.	Yanuarianto	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2
5.	Fitri Yulianti	Penguji Mutu Barang	1
6.	Khairul Fauziah Hanisa	Perekayasa	1
7.	M. Aswar Zulhi	Penguji Mutu Barang	1
8.	Mangatas Siregar	Analisis Data dan Informasi	1
9.	M. Khairul Dzakirin	Penata Laporan Keuangan	1
10.	Taufik Riyadi	Pengadministrasi Keuangan	1

Tidak Login Pulang

No.	Pegawai	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Aurel Widya Ningsih	Pranata Keuangan APBN	1
2.	Devan Surya Adrian	Pengadministrasi Keuangan	1
3.	Dewi Susilawati	AMMI	1
4.	Fitri Yulianti	Penguji Mutu Barang	1
5.	Hariaty Tandi Sobon	Penguji Mutu Barang	1
6.	M. Aswar Zulhi	Penguji Mutu Barang	1
7.	Mangatas Siregar	Analisis Data dan Informasi	1
8.	Miyono	Perekayasa	1
9.	Muhamad Ridwan	Pengelola BMN	1
10.	Nazarni Rahmi	Pembina Industri	1
11.	Rufida	Penguji Mutu Barang	1
12.	Taufik Riyadi	Pengadministrasi Keuangan	1
13.	Yanuarianto	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1

Kepada atasan langsung masing-masing pegawai agar dilakukan pembinaan. Demikian, harap Nota Dinas ini menjadi perhatian.

Kepala BSPJI Banjarbaru

Anamsyah

I. KEBIJAKAN PELAYANAN

1

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
1.a.Ak	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	5	Tidak tersedia Standar Pelayanan.	☑ Daftar jenis pelayanan yang diselenggarakan ☑ Dokumen Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ☑ Berita Acara
		1		Tersedia SP namun tidak memenuhi 14 komponen.	
		2		Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen.	
		3		Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan penetapan.	
		4		Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dan dilakukan penetapan.	
		5		Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan dan dilakukan movev.	

Penjelasan:

- Setiap Unit Lokus wajib menyusun Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
- Standar Pelayanan setelah disusun dan dibahas dengan masyarakat wajib untuk ditetapkan, agar dapat memiliki kekuatan hukum.
- Penetapan Standar Pelayanan dilakukan minimal oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan.
- Standar Pelayanan terdiri atas 14 komponen, dimana 6 diantaranya merupakan komponen service delivery, dan 8 komponen lainnya merupakan komponen manufacturing. Komponen service delivery wajib dipublikasikan pada media publikasi yang dimiliki Unit Lokus.
- Yang dimaksud penetapan Standar Pelayanan untuk sebagian jenis pelayanan adalah penetapan SP yang belum mencakup seluruh jenis pelayanan yang ada dalam suatu unit pelayanan.
- Penyusunan Standar Pelayanan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014.

2

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
2.a.P	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	0	5	Penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait(stakeholder).	☑ Dokumen pelibatan masyarakat: Berita Acara, Daftar Hadir penyusunan SP, dan Foto Kegiatan.
		1		Penyusunan SP telah melibatkan minimal 1 unsur masyarakat.	
		2		Penyusunan SP telah melibatkan minimal 2 unsur masyarakat.	
		3		Penyusunan SP telah melibatkan minimal 3 unsur masyarakat.	
		4		Penyusunan SP telah melibatkan minimal 4 unsur masyarakat.	
		5		Penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat.	

Penjelasan:

- Penyusunan dan penetapan SP wajib melibatkan warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan SP.
- Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan SP mewakili berbagai unsur dan profesi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/Praktisi/Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.

3

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
3.a.T	Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery .	0	5	Tidak ada publikasi SP.	☑ Foto atau screenshot dari berbagai bentuk/ media publikasi Standar Pelayanan yang dimiliki. ☑ Screenshot publikasi di SIPP.
		1		Tersedia publikasi SP hanya sebagian dari komponen	
		2		Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 atau lebih media publikasi namun belum dipublikasikan pada SIPP Nasional.	
		3		Tersedia publikasi SP seluruh komponen service	
		4		Tersedia publikasi SP seluruh komponen service	
		5		Tersedia publikasi SP seluruh komponen service	

Penjelasan:

SP yang ditetapkan wajib dipublikasikan pada media publikasi yang tersedia, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Media Publikasi tersebut dapat berupa:

1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya.
2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kios-K, link publikasi, dan sejenisnya.
3. Media sosial. Media yang termasuk didalamnya yakni Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan sejenisnya.
4. Website. Media yang termasuk di dalamnya yakni website, dan subsite.
5. Aplikasi yang bisa diunduh, yaitu suatu aplikasi yang dikembangkan UPP yang dapat diunduh oleh pengguna layanan, baik berbasis android, IOS, maupun OS lainnya.
6. SIPP Nasional, yaitu suatu sistem nasional yang disediakan sebagai media publikasi dan informasi terkait pelayanan publik.

4

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
4.a.K	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	0	5	Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala	BA FKP peninjauan SP Laporan yang berisi: Berita Acara Peninjauan Ulang SP, Dokumentasi kegiatan, lain-lain.
		1		Dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih	
		2		Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun sekali terhadap	
		3		Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun sekali terhadap	
		4		Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun sekali atau lebih	
		5		Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun sekali atau lebih	

Penjelasan:

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan wajib ditinjau ulang sesuai ketentuan pasal 33 pada PP 96/2012, dan hasil peninjauan ulang dapat digunakan Unit Lokus untuk sebagai dasar tetap menjalankan SP yang sudah dibuat atau melakukan perubahan SP.

5

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
5.a.K	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	0	5	Tidak tersedia Maklumat Pelayanan.	Dokumen Pengesahan Maklumat Pelayanan Foto atau screenshot dari berbagai bentuk Publikasi Maklumat Pelayanan yang dimiliki.
		1		Tersedia Maklumat Pelayanan namun belum	
		2		Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan	
		3		Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan	
		4		Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan	
		5		Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan	

Penjelasan:

● Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi SP, serta kesiapan menerima sanksi bila melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal- hal yang perlu dimuat dalam maklumat pelayanan adalah:

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

● Maklumat Pelayanan dapat diakses melalui publikasi di:

1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya;
2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kiosK, dan sejenisnya.

6

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
6.a.B	SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017.	0	5	Belum melaksanakan SKM.	Publikasi hasil SKM, Dokumen atau Foto pelaksanaan SKM dan media yang digunakan (misalnya mesin SKM atau kuesioner manual) Laporan hasil pelaksanaan SKM
		1		Sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai	
		2		Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Peraturan	
		3		Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan	
		4		Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan	
		5		Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM.	

Penjelasan:

Cukup jelas.

7

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
7.a.T	Jumlah media publikasi hasil SKM.	0		Tidak dipublikasikan.	Foto atau screenshot

		1		SKM dipublikasikan pada 1 (satu) media publikasi.	
		2		SKM dipublikasikan pada 2 (dua) media publikasi.	
		3	5	SKM dipublikasikan pada 3 (tiga) media publikasi.	
		4		SKM dipublikasikan pada 4 (empat) media publikasi.	
		5		SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 (empat) media publikasi lainnya.	dari berbagai bentuk publikasi hasil SKM yang dimiliki.

Penjelasan:

Publikasi informasi SKM adalah tersedianya informasi terkait metode, proses, dan hasil SKM untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat. Media Publikasi dapat diakses melalui:

1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya.
2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kiosK, dan sejenisnya.
3. Media sosial. Media yang termasuk didalamnya yakni Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan sejenisnya.
4. Website. Media yang termasuk di dalamnya yakni website, dan subsite.
5. Aplikasi yang bisa diunduh.

8

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
8.a.Ak	Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.	0		Tidak ada rencana tindak lanjut SKM.	☒ Laporan SKM tahun n-1 yang memuat rencana tindak lanjut ☒ Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM
		1		Ada rencana tindak lanjut tapi belum dilaksanakan.	
		2	5	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan kurang dari 30%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya.	
		3		Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 30-80%,	
		4		Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan lebih dari 80%,	
		5		Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%,	

Penjelasan:

Tindak lanjut Hasil SKM adalah hasil survei yang diolah, dianalisis yang menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan referensi kebijakan perbaikan layanan. Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.

Ruang lingkup SKM meliputi: persyaratan, prosedur, waktu, produk pelayanan, biaya, kompetensi, perilaku dan maklumat pelayanan serta pengelolaan pengaduan (merujuk pada peraturan Menteri yang berlaku).

Cara mengukur persentase:

$$= \frac{\text{realisasi rencana tindak lanjut}}{\text{jumlah rencana tindak lanjut}} \times 100 \%$$

9

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
9.a.Ak	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam pengisian SKM.	0		Rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti.	☒ Lapor hasil pelaksanaan SKM pada 2 tahun terakhir yang memuat rencana tindak lanjut ☒ Laporan pelaksanaan tindak lanjut dari poin pertama ☒ Laporan hasil SKM
		1		Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1	
		2	5	Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 9	
		3		Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 6	
		4		Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 3	
		5		Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.	

Penjelasan:

Kecepatan tindak lanjut rekomendasi hasil SKM guna melihat keseriusan UPP dalam melaksanakan SKM. Apakah hasil SKM segera ditindaklanjuti atau tidak. Adapun kecepatan tindak lanjut ini dilihat dari laporan pelaksanaan SKM oleh unit pelayanan pada 2 tahun terakhir serta laporan tindak lanjutnya.

	TOTAL SKOR ASPEK 1		5.00		
--	---------------------------	--	-------------	--	--

II. PROFESIONALISME SDM

10

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
10.b.As	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	0		Tidak memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.	☒ Surat perintah lembur (nota dinas/ memo/ d11) ☒ Surat Tugas pemberian pelayanan pada hari libur
		1		Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.	
		2	5	Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 1 unsur	
		3		Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 2 unsur	

		4	Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 3 unsur	☑ Foto kegiatan
		5	Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 atau	

Penjelasan:
Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa :

1. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya.
2. Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat.
3. Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja).
4. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan).
5. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin.
6. Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi.

11

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
11.b.K	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	0	5	Tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku.	☑ Dokumen kode etik dan kode perilaku.
		1		Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana	
		2		Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana	
		3		Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana	
		4		Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana	
		5		Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana	

Penjelasan:
Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai, serta hak dan kewajiban pelaksana layanan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada pengguna layanan. Unsur kode etik meliputi: (1) Hak dan kewajiban, (2) larangan KKN, (3) larangan diskriminasi, (4) sanksi, (5) penghargaan.

12

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
12.b.Ak	Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	0	5	Tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja.	☑ Dokumen mengenai mekanisme motivasi kerja (Pemberian penghargaan, sertifikat diklat, surat rekomendasi beasiswa, jadwal program konseling, foto kegiatan)
		1		Tersedia 1 jenis mekanisme peningkatan motivasi	
		2		Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi	
		3		Tersedia 3 jenis mekanisme peningkatan motivasi	
		4		Tersedia 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi	
		5		Tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan	

Penjelasan:
Motivasi Kerja dapat diartikan sebagai daya pendorong/penggerak yang menciptakan kemauan Pelaksana pelayanan untuk bekerja secara efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya nya untuk menciptakan kepuasan pengguna layanan.
Jenis mekanisme untuk meningkatkan motivasi kerja dapat berupa:

1. pemberian penghargaan;
2. pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat;
3. pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa;
4. program konseling;
5. program tim/capacity building;
6. mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Bukti dukung yang disampaikan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun terakhir.

13

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
13.b.K	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	0	5	Tidak ada pemberian penghargaan.	☑ Lampirkan SK yang mengatur mengenai pemberian penghargaan.
		1		Ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan 1-2	
		2		Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-5 unsur	
		3		Ada pemberian penghargaan berdasarkan 1-2 unsur	
		4		Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-4 unsur	
		5		Ada pemberian penghargaan berdasarkan 5-6 unsur	

Penjelasan:
Dalam melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan, ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan unit layanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kriteria pemberian penghargaan adalah ukuran/indikator yang digunakan oleh UPP dalam menilai/menentukan prestasi petugas pelayanan yang dapat terdiri dari unsur:

1. Kehadiran;
2. Kinerja : kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan;
3. Kerja sama;
4. Inovatif/kreatif : kemampuan mengeluarkan ide;
5. Penampilan : penggunaan atribut, pakaian, dll yang sudah ditetapkan;
5. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.

14

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
14.b.K	Tersedia pelaksana yang menerapkan	0		Tidak menerapkan budaya layanan.	☑ Lampirkan foto bukti

	budaya pelayanan.	1	4	Pelaksana pelayanan menerapkan 1 (satu) unsur	dukong (pegawai menerapkan budaya pelayanan).
		2		Pelaksana pelayanan menerapkan 2 (dua) unsur	
		3		Pelaksana pelayanan menerapkan 3 (tiga) unsur	
		4		Pelaksana pelayanan menerapkan 4 (empat) unsur	
		5		Pelaksana pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur	
Penjelasan:					
● Seragam : pakaian/atribut yang membedakan antara petugas layanan dan masyarakat/pengguna layanan. ● Identitas nama dapat berupa name tag, ID card, dan sejenisnya. ● PIN/atribut/logo unit pelayanan merupakan berbagai atribut khas unit pelayanan yang dikenakan oleh pegawai, misalnya pin petugas pelayanan, selempang dan sebagainya. ● Aturan penerapan 5S yaitu aturan/kebijakan terkait penerapan 5S oleh pegawai/petugas layanan yang berlaku. ● Nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, motto, maskot, dan sebagainya.					
	TOTAL SKOR ASPEK 2		4.80		

3. SARANA dan PRASARANA

15

Kode	Indikator	Skala	Isian Hasil Penilaian		Sumber Data/ Lokasi Data
			Skor	Uraian	
15.c.K	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.	0	5	Tidak tersedia tempat parkir	Foto tempat parkir dan seluruh fasilitas parkir yang ada.
		1		Tersedia tempat parkir dan memiliki 1 fasilitas parkir.	
		2		Tersedia tempat parkir dan memiliki 2 fasilitas parkir.	
		3		Tersedia tempat parkir dan memiliki 3 fasilitas parkir.	
		4		Tersedia tempat parkir dan memiliki 4 fasilitas parkir.	
		5		Tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih	
Penjelasan: Sarana tempat parkir adalah sarana pendukung yang terdiri dari fasilitas dan petugas khusus yang memberikan layanan tempat, keamanan kendaraan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas pendukung sebagai berikut: 1. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka. 2. Petugas parkir: terdapat petugas yang berjaga di area parkir. 3. Pemeriksaan karcis/kartu parkir: setiap pengunjung diberikan kartu/karcis sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang digunakan. 4. CCTV: lokasi parkir dilengkapi dengan CCTV yang aktif dan dipantau melalui monitor. 5. Penitipan jaket/helm. 6. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain).					

16

Kode	Indikator	Skala	Isian Hasil Penilaian		Sumber Data/ Lokasi Data
			Skor	Uraian	
16.c.As	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	0	5	Tidak tersedia fasilitas apapun.	Foto/video ruang tunggu dan seluruh fasilitas ruang tunggu yang ada
		1		Tersedia fasilitas wajib.	
		2		Tersedia fasilitas wajib dan 1 fasilitas pelengkap.	
		3		Tersedia fasilitas wajib dan 2 fasilitas pelengkap.	
		4		Tersedia fasilitas wajib dan 3 fasilitas pelengkap.	
		5		Tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas	
Penjelasan : Fasilitas wajib adalah fasilitas minimal yang harus ada di ruang tunggu, meliputi (harus dipenuhi keduanya): 1. Kursi tunggu; 2. Pendingin/sirkulasi ruangan: terdapat pendingin ruangan yang berupa AC/kipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan fasilitas pelengkap adalah berbagai fasilitas yang diharapkan dapat dilengkapi oleh unit layanan dalam rangka menambah kenyamanan pengguna layanan dalam bertransaksi dengan unit layanan. Fasilitas pelengkap meliputi: 1. Mesin antrian dilengkapi monitor: terdapat monitor/layar atau keterangan yang menjelaskan nomor antrian yang sedang dilayani. 2. Televisi: ruang tunggu dilengkapi televisi yang menyala sebagai bentuk fasilitas bagi pengguna layanan yang sedang menunggu antrian. 3. Bahan bacaan: terdapat bahan bacaan yang dapat digunakan pengguna layanan seperti majalah, koran, buku, dll. 4. Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth: terdapat sumber listrik yang dapat digunakan pengguna layanan untuk melakukan pengisian daya alat komunikasi 5. Hotspot/wifi: terdapat hotspot/wifi yang aktif dan dapat digunakan oleh pengguna layanan.					

17

Kode	Indikator	Skala	Isian Hasil Penilaian		Sumber Data/ Lokasi Data
			Skor	Uraian	
17.c.As	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	0	4	Tidak tersedia toilet pengguna layanan.	Foto/video toilet pengguna layanan dan seluruh fasilitas yang ada.
		1		Toilet pengguna layanan dengan 1 kondisi.	
		2		Toilet pengguna layanan dengan 2 kondisi.	
		3		Toilet pengguna layanan dengan 3 kondisi.	
		4		Toilet pengguna layanan dengan 4 kondisi.	
		5		Toilet pengguna layanan dengan lebih dari 4 kondisi.	

Penjelasan :

Sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai adalah fasilitas toilet yang diperuntukkan khusus bagi pengguna layanan yang senantiasa terjaga kebersihannya, dengan memperhatikan ketersediaan air bersih, toiletries yang cukup memadai, serta memperhatikan *privacy*.

Kondisi pada toilet layak pakai:

1. Ketersediaan toilet pria dan wanita: terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita.
2. Wastafel: terdapat wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik.
3. Toiletries: fasilitas penunjang dalam toilet yang meliputi tissue, sabun, tempat sampah, dll.
4. Air bersih.
5. Monev intensitas petugas membersihkan toilet.
6. Fasilitas lain yang mendukung.

18

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
18.c.K	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	0	3	Tidak tersedia sarana prasarana bagi pengguna	Foto seluruh sarana prasarana kelompok rentan yang ada.
		1		Tersedia 1-3 sarana prasarana bagi pengguna layanan	
		2		Tersedia 4-6 sarana prasarana bagi pengguna layanan	
		3		Tersedia 7-9 sarana prasarana bagi pengguna layanan	
		4		Tersedia 10-12 sarana prasarana bagi pengguna	
		5		Tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi	

Penjelasan :

Sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan adalah fasilitas yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna layanan kelompok rentan dalam menjalani aktifitas pengurusan layanan.

Ketentuan mengenai kelompok rentan disabilitas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Kemudian aturan ini diterjemahkan oleh Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan.

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mengatur lebih lanjut mengenai sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan ini. Sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan meliputi:

1. Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan.
2. Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan.
3. Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6o (6 derajat) dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman.
4. Lift khusus disertai huruf braille.
5. Selasar yang menghubungkan semua ruangan.
6. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan.
7. Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan.
8. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.
9. Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.
10. Parkir khusus yang mudah diakses.
11. Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik.
12. Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.
13. Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.
14. Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).

19

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
19.c.As	Tersedia sarana prasarana penunjang.	0	5	Tidak tersedia fasilitas penunjang.	Foto seluruh sarana prasarana penunjang yang ada.
		1		Tersedia 1 fasilitas penunjang.	
		2		Tersedia 2 fasilitas penunjang.	
		3		Tersedia 3 fasilitas penunjang.	
		4		Tersedia 4 fasilitas penunjang.	
		5		Tersedia 5 atau lebih fasilitas penunjang.	

Penjelasan:

Sarana prasarana penunjang lainnya adalah fasilitas khusus layak pakai bagi pengguna layanan yang tidak langsung terkait pengurusan pelayanan.

Sarana prasarana penunjang:

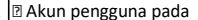
1. Fotocopy/ATK: terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses pengguna layanan.
2. P3K : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang layak pakai.
3. APAR : Alat Pemadam Api Ringan yang berfungsi dan layak pakai.
4. Kantin: terdapat kantin yang menyediakan makanan dan minuman bagi pengguna layanan.
5. Ruang ibadah: terdapat tempat ibadah yang dapat digunakan pengguna layanan.
6. Area merokok: tempat di luar ruang pelayanan yang dipergunakan untuk merokok sesuai kebijakan yang berlaku.
7. Jalur evakuasi/titik kumpul: jalur yang dipersiapkan jika Unit Layanan dalam keadaan bahaya/darurat, beserta tempat untuk berkumpul dalam rangka evakuasi.
8. Tempat Sampah: Tersedia wadah yang memisahkan jenis sampah.
9. CCTV: kamera yang merekam segala aktivitas yang terpantau dalam jangkauan kamera tersebut.

20

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
20.c.B	Sarana <i>Front Office</i> (FO) Informasi di unit layanan.	0	5	Tidak tersedia sarana FO informasi layanan.	Foto <i>front office</i> layanan informasi dan seluruh fasilitas yang ada
		1		Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 1	
		2		Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 2	
		3		Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 3	
		4		Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 4	
		5		Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau	
Penjelasan : Sarana Front Office informasi adalah fasilitas/tempat khusus yang disediakan untuk layanan informasi tatap muka langsung di kantor pelayanan. Dapat berupa ruang khusus atau meja layanan khusus. Sarana Front Office: 1. Petugas khusus: terdapat petugas khusus yang memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna layanan. 2. Meja/kursi: terdapat meja/kursi yang digunakan pengguna layanan dalam proses bertanya terkait kebutuhan layanan. 3. Layar/display informasi yang menampilkan informasi terkait layanan yang tersedia. 4. Bahan cetak informasi layanan. 5. Register tamu (manual/elektronik).					
	TOTAL SKOR ASPEK 3		4.50		

IV. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

21

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
21.d.T	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	0	4	Tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik baik	 Akun pengguna pada SIPPN.  Screenshot tampilan akun unit layanan pada SIPPN yang menampilkan jumlah layanan yang telah disediakan SIPPN.
		1		Tersedia sistem informasi pelayanan publik non	
		2		Tersedia sistem informasi pelayanan publik non	
		3		Tersedia Sistem informasi pelayanan publik	
		4		Tersedia Sistem informasi pelayanan publik berbasis	
		5		Sistem informasi pelayanan publik telah	
Penjelasan: ● Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. (Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 25 Tahun 2009). ● Sistem informasi pelayanan publik nasional adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN. (Permenpanrb No. 13 Tahun 2017).					

22

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
22.d.B	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	0	5	Tidak tersedia sistem informasi pendukung	Screenshot tampilan dari unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik.
		1		SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal	
		2		SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal	
		3		SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal	
		4		SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal	
		5		SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal	
Penjelasan : Unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik harus sesuai dengan urutan yang ada pada tabel untuk memperoleh nilai yang maksimal. Data pendukung pelayanan adalah data penunjang standar pelayanan utama contohnya daftar antrian, dan/atau formulir pengisian data online, dan/atau dashboard monitoring proses pelayanan.					

23

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
23.d.As	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	0	5	SIPP Elektronik tidak terhubung secara daring.	☒ Screenshot tampilan dari SIPP Elektronik berbasis Website yang dimiliki. ☒ Screenshot tampilan <i>back-end</i> dari kanal
		1		SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah	
		2		SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah	
		3		SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah	
		4		SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah	
		5		SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah	
Penjelasan : Kualitas kegunaan SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan website/aplikasi seperti tampilan, kemudahan penggunaan, navigasi, loading time, visualisasi.					

24

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
24.d.T	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	0	5	Tersedia data dan informasi pelayanan publik yang	Foto atau screenshot paling tidak 5 informasi pelayanan yang
		1		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik	
		2		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik	

		3		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik	dipublikasikan secara
		4		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik	berturut-turut (foto
		5		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik	menunjukkan waktu
Penjelasan : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital adalah pembaruan data, informasi dan aplikasi yang disajikan dalam situs unit pelayanan.					
	TOTAL SKOR ASPEK 4		4.75		

V. KONSULTASI DAN PENGADUAN

25

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
25.e.P	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	0	5	Tidak tersedia Sarana konsultasi pengaduan	☑ Foto sarana/ media konsultasi dan pengaduan yang tersedia. ☑ SK Petugas Khusus.
		1		Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan	
		2		Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan	
		3		Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan	
		4		Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan	
		5		Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan	
Sarana konsultasi dan pengaduan adalah fasilitas dalam memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.					
Fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan: 1. Kotak saran/pengaduan; 2. Ruang khusus; 3. Petugas khusus; 4. Air minum/makanan ringan; 5. Register Konsultasi dan Pengaduan; 6. Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain).					

26

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
26.e.P	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	0	5	Tidak ada sarana dan petugas.	☑ Foto sarana/ media konsultasi dan pengaduan yang tersedia ☑ Data SP4N-LAPOR! ☑ Surat Keputusan.
		1		Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara <i>offline</i> menyatu dengan <i>front office</i> .	
		2		Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara <i>offline</i> namun terpisah dengan <i>front office</i> .	
		3		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara	
		4		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara	
		5		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara	
Penjelasan : Media konsultasi dan pengaduan secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, SMS/telepon/Aplikasi Percakapan. Media konsultasi dan pengaduan secara online meliputi media sosial, website, email, aplikasi mobile khusus, media chatting, aplikasi SP4N LAPOR! SP4N LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id , SMS 1708, serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! telah ditetapkan menjadi aplikasi umum tanggal 27 Oktober 2020 sehingga seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan.					

27

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
27.e.Ak	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	0	5	Tidak ada dokumentasi.	☑ Dokumentasi kegiatan konsultasi dan pengaduan.
		1		Terdapat dokumentasi yang diarsipkan.	☑ Screenshot dokumentasi pada website, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.
		2		Terdapat dokumentasi yang diarsipkan dan	
		3		Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam	
		4		Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam	
		5		Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam	
Penjelasan :					
Arsip konsultasi dan pengaduan: Kumpulan dokumentasi proses hingga hasil konsultasi dan pengaduan pada Unit Lokus Evaluasi.					
Laporan: Dokumentasi yang memuat informasi terkait jumlah laporan konsultasi dan pengaduan yang masuk, diproses, dan sudah ditindaklanjuti. Monev: Proses peninjauan laporan konsultasi dan pengaduan secara berkala. Tindak Lanjut: Langkah perbaikan berdasarkan monev yang telah dilakukan, bentuk tindak lanjut dapat berupa: FAQ dan bukti sebelum dan sesudah tindak lanjut.					
Publikasi: Penyampaian rekapitulasi hasil konsultasi dan pengaduan kepada publik, baik melalui media online maupun offline, dalam bentuk: pie chart, infografis, hingga laporan.					
Rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan adalah arsip proses konsultasi atau pengaduan yang telah dilakukan dan dapat dijadikan referensi baik oleh masyarakat maupun oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Contoh bentuk dokumentasi proses konsultasi dan pengaduan yaitu Rubrik, FAQ pada website, dan lain sebagainya.					
Laporan berkala minimal memuat informasi terkait jumlah laporan masuk, proses, dan sudah ditindaklanjuti.					

28

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
28.e.Ak	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	0	2	Tidak ada konsultasi atau pengaduan yang	☒ Dokumentasi konsultasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya. ☒ Screenshot tampilan pada SP4N-LAPOR! Yang menunjukkan jumlah
		1		< 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti	
		2		≥ 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti	
		3		< 50% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke	
		4		≥ 50% - 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke	
		5		≥ 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke	
Penjelasan : Tindak lanjut penyelesaian pengaduan mengacu pada mekanisme, tata cara dan pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018).					
	TOTAL SKOR ASPEK 5		4.25		

VI. INOVASI

29

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
29.f.B	Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	0	4	Tidak tersedia inovasi.	☒ Proposal Inovasi Pelayanan Publik. ☒ Dokumen studi tiru/progres rancang bangun (<i>blueprint</i>). ☒ Dokumentasi pelaksanaan Inovasi (foto, daftar hadir, dll) ☒ Bukti keikutsertaan dan/atau piagam penghargaan yang diperoleh dalam suatu
		1		Belum ada inovasi, masih dalam proses pembelajaran	
		2		Sudah ada inovasi namun kurang dari 1 tahun.	
		3		Sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun namun belum	
		4		Sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun dan sudah	
		5		Inovasi yang dilaksanakan sudah mendapatkan prestasi pada level (apapun).	
Penjelasan : 1. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 3. Kompetisi level instansi : kompetisi inovasi yang diadakan oleh Instansi Pemerintah atau non pemerintah dengan peserta terbatas dalam lingkup instansi tersebut. 4. Kompetisi level nasional : kompetisi inovasi yang diadakan oleh Instansi Pemerintah atau non pemerintah dengan peserta dari seluruh Indonesia. 5. Kompetisi level internasional : Kompetisi inovasi yang diadakan oleh pihak luar negeri. (PermenPANRB 91/2021)					

30

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
30.f.B	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	0	5	Belum ada sumber daya yang mendukung	☑ Dokumen payung hukum kelembagaan inovasi. ☑ Foto atau dokumen penganggaran inovasi. ☑ Foto sarana dan
		1		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi	
		2		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi	
		3		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi	
		4		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi	
		5		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi	
Penjelasan : 1. Untuk menjamin pelembagaan dan keberlanjutan inovasi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib membuat dasar hukum inovasi dan menyediakan program serta anggaran yang didukung dengan sistem pengembangan inovasi yang memadai. 2. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerja sama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi. 3. Kondisi yang terkait dengan pelembagaan inovasi antara lain meliputi: a. Dukungan kebijakan : Payung hukum terkait inovasi; b. Anggaran : Dokumen penganggaran; c. Sarana dan prasarana : Foto sarana prasarana pendukung inovasi; d. Sumber Daya Manusia : SK perorangan dan/atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi.					
	TOTAL SKOR ASPEK 5		4.50		

VII. INFORMASI TAMBAHAN

29

Kode	Indikator	Isian Hasil Penilaian			Sumber Data/ Lokasi Data
		Skala	Skor	Uraian	
	Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan.	0	5	Tidak tersedia sistem antrian.	☒ Foto berbagai fasilitas pada sistem antrian. ☒ Screenshot website, aplikasi, atau Whatsapp
		1		Tersedia sistem antrian dengan 1 fasilitas.	
		2		Tersedia sistem antrian dengan 2 fasilitas.	
		3		Tersedia sistem antrian dengan 3 fasilitas.	

		4	Tersedia sistem antrian dengan 4 fasilitas.	untuk sistem antrian online.
		5	Tersedia sistem antrian dengan lebih dari 4 fasilitas.	

Penjelasan :

Sistem antrian yaitu mekanisme urutan penerima layanan yang mendapat giliran dilayani di loket pelayanan.

Fasilitas sistem antrian dapat berupa:

1. Pengeras suara: berupa sound system, megaphone, dan jenis pengeras suara lainnya.
2. Dipandu: terdapat petugas yang bertugas memandu dan memberikan informasi terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.
3. Pengelompokan antrian: antrian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan layanan.
4. Sistem pendaftaran daring: terdapat sistem pendaftaran berbasis online yang dapat melalui: website, aplikasi, Whatsapp, dll.
5. Nomor antrian: terdapat sistem nomor antrian sesuai dengan urutan pendaftaran baik secara online maupun tatap muka.
6. Monitor antrian: Layar monitor yang menampilkan nomor antrian.

No	Aspek	Indeks	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	5.00	24%	1.20
2	Profesionalisme SDM	4.80	25%	1.20
3	Sarana dan Prasarana	4.50	18%	0.81
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	4.75	11%	0.52
5	Konsultasi dan Pengaduan	4.25	10%	0.43
6	Inovasi	4.50	12%	0.54
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4.70

Kategori
Makna

A
Pelayanan Prima

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai		Kategori	Makna	Keterangan
0 - 1,00	1.00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	1.01	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,51 - 2,00	1.51	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	2.01	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	2.51	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	3.01	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	3.51	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	4.01	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	4.51	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.



NOTA DINAS

Nomor 3145/BSKJI.1/LP/XI/2022

Kepada : Daftar Terlampir
Dari : Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Perihal : Pengisian Form Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 1 November 2022

Sehubungan dengan pemenuhan penilaian Perjanjian Kinerja BSKJI Tahun 2022 khususnya untuk Sasaran Strategis Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dengan Indikator Kinerja Indeks Layanan Publik, maka diperlukan pengisian *self-assessment* layanan publik. Adapun format *assessment* pada tahun 2022 telah mengadopsi PermenPANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perubahan dari PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara/i untuk mengisi *form* evaluasi pelayanan publik dan mengupload data dukung pada tautan berikut: <https://bit.ly/indekspeayananpublik2022>. Data dikirimkan paling lambat tanggal 8 November 2022. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Aulia Rosalinda BJ (Nomor HP: 0877-7731-1370).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,


E. Ratna Utarianingrum

Tembusan
Kepala BSKJI

Lampiran 1

Nota Dinas Nomor : **3145** /BSKJI.1/LP/XI/2022,

Tanggal : 1 November 2022

Daftar Undangan

1. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
2. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
3. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
4. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin;
5. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
6. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam;
7. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
8. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
9. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
10. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik;
11. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
12. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh;
13. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan;
14. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang
15. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
16. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung;
17. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak;
18. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
19. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
20. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
21. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado;
22. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon;
23. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta;
24. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA
**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
(BSPJI) BANJARBARU**
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 21/D-ND4/LHE/IV/2022
TANGGAL : 19 APRIL 2022

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2022**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru TA 2021 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja BSPJI Banjarbaru memperoleh nilai sebesar 83,15.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja BSPJI Banjarbaru dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja: 24,60
2. Pengukuran Kinerja : 24,00
3. Pelaporan Kinerja : 12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 22,25

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, kami rekomendasikan kepada BSPJI Banjarbaru agar dapat :

1. Mereviu kembali pedoman teknis atau SOP yang sudah ada, dan/atau menetapkan SOP yang terkait perencanaan kinerja (renstra, renja, renkin, perkin) dan SOP khusus pengumpulan data kinerja;
2. Mengevaluasi dan menyusun kembali Indikator Kinerja yang SMART, menetapkan target kinerja yang lebih menantang dan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
3. Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan analisis pengaruh pengukuran kinerja terhadap penyesuaian organisasi, dan strategi, serta dapat menetapkan dokumen kebijakan internal terkait dengan pemberian *reward and punishment*;
4. Menyajikan informasi yang memadai dalam Laporan Kinerja, terutama perbandingan tiap capaian kinerja dengan target jangka menengah, serta melakukan reviu terhadap keseluruhan dokumen Laporan Kinerja yang dapat dilakukan oleh BSKJI atau di dalam internal unit BSPJI Banjarbaru sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 459/IJ-IND/ST/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi

pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi, dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru yang sebelumnya bernama Balai Banjarbaru (BBLM) adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Dengan terbitnya Permenperin No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, nomenklatur unit kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru disesuaikan menjadi BSPJI Banjarbaru. Sesuai dengan Permenperin tersebut, BSPJI Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

BSPJI Banjarbaru menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, dan verifikasi;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik

negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP untuk tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum implementasi SAKIP pada BSPJI Banjarbaru sudah berjalan.

Hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada BSPJI Banjarbaru TA 2021 adalah 83,15 atau kategori A (Memuaskan).

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil dari penilaian evaluasi SAKIP tahun 2020 beserta rekomendasi dijabarkan sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
Target Kinerja pada Renstra dipastikan untuk memenuhi kriteria target kinerja yang baik dan dimonitor terhadap pencapaiannya	Renstra 2020-2024 telah direviu menjadi Renstra 2021-2024 terkait perubahan SOTK yang baru dan juga telah sesuai dengan kriteria target kinerja yang baik dan dimonitor terhadap pencapaiannya	Sudah dilaksanakan
Dalam dokumen PK pimpinan seharusnya diperjanjikan seluruh sasaran dan IK yang pada tahun berjalan terdapat target yang harus dicapai	Seluruh Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra 2021-2024 BSPJI Banjarbaru telah menjadi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja TA 2021 Baristand Industri Banjarbaru (Revisi)	Sudah dilaksanakan
Baristand Industri Banjarbaru agar	Indikator Kinerja Individu telah disesuaikan dengan	Sudah dilaksanakan

	menyusun indikator kinerja individu yang sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik (berorientasi output penting) dan mengacu pada indikator kinerja dapat dilakukan secara berjenjang. Pengukuran (capaian) kinerja khususnya eselon IV ke atas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus disesuaikan dengan IKU organisasi	kriteria Indikator kinerja yang baik (berorientasi output penting) dan mengacu pada indikator kinerja atasannya. Namun agar menjadi catatan, bahwa terdapat beberapa Indikator yang masih menggunakan awal kata kerja seperti "melakukan, melaksanakan, membuat, mengikuri, dan lainnya". Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan Juknis sesuai JFT-nya seperti PMB, PEDAL. Bukti Dukung : Cascading Revisi sesuai Perkin dan Permenpan yang baru	
	Laporan Kinerja Baristand Industri Banjarbaru selain menyajikan perbandingan capaian kinerja selama tahun-tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, agar dilengkapi pembandingan data kinerja dengan standar nasional, dan Realisasi atau capaian instansi dibanding realisasi atau instansi sejenis yang setara, serta penyajian evaluasi dan analisis Laporan Kinerja yang memadai untuk seluruh indikator kinerja	Laporan Kinerja telah membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, kecuali untuk Indikator Kinerja yang baru muncul di Perjanjian Kinerja TA 2021 (Revisi)	Sudah dilaksanakan

Evaluasi program diharapkan dapat dilaksanakan untuk menilai keberhasilan program dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan manajemen kinerja dan menilai keberhasilan program. Selain itu, pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dengan baik dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan, dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Evaluasi Program telah dilaksanakan secara berkala, setiap bulannya baik melalui Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat Monev, dan Rapat lainnya yang terkait. Pada TA 2021 ini, BI Banjarbaru mencoba mengintegrasikan rencana kerja berdasarkan Indikator Kinerja antara Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Zona Integritas. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tim berdasarkan data dan capaian tahun sebelumnya dimana menunjukkan saling keterkaitan dan mendukung satu sama lain. Selain itu, telah dibuat Nota Dinas Tindak Lanjut Rencana Aksi yang merupakan hasil dari Rapat Monev secara berkala	Sudah dilaksanakan
Baristand Industri Banjarbaru melakukan pembahasan penyusunan target yang dapat dicapai dan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya agar dapat lebih baik	Baristand Industri Banjarbaru telah melakukan penyesuaian target yang dapat dicapai	Sudah dilaksanakan

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

BSPJI Banjarbaru telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis TA 2020 – 2024 yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rencana Strategis TA 2021 - 2024 pada Desember 2021, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (tahunan), serta dokumen perencanaan aktivitas dan anggaran.

Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan telah menggambarkan kebutuhan serta tujuan/sasaran atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan target yang ditetapkan masih belum dapat dikatakan menantang walaupun pencapaiannya masih dianggap *on the right track*.

BSPJI Banjarbaru telah merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja mulai tingkat satker hingga individu (pegawai) yang capaiannya dalam rencana aksi telah dipantau secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja juga telah diperbaiki dan disempurnakan agar dapat dilakukan perbaikan kinerja dan hasil yang lebih baik.

Penilaian Evaluasi atas Perencanaan Kinerja BSPJI Banjarbaru tahun 2021 mendapatkan nilai 24,60 dari total nilai 30,00 yang dilakukan pada keberadaan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	24,60	
1.a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja	4,80	Seluruh kriteria terkait Dokumen Perencanaan Kinerja telah terpenuhi dan sudah ada lebih dari 1 tahun terakhir namun untuk pedoman teknis hanya berupa SOP Pengusulan Kegiatan dan Pengusulan Anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan dokumen

			perencanaan kinerja.
1.b	Kualitas Perencanaan Kinerja	6,30	- Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART yaitu indikator “Peningkatan peran balai dalam Pengembangan Industri” yang dinilai masih kurang spesifik untuk mendukung sasaran kinerjanya yakni “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”. - Target yang ditetapkan memang dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan realistis, , serta ada beberapa indikator baru dan berbeda dengan perkin di awal 2021 maupun perkin tahun sebelumnya, namun untuk indikator yang masih sama seperti Indeks Kepuasan Layanan tidak bisa dikatakan menantang karena targetnya tetap.
1.c	Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	13,50	- Anggaran maupun aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dan telah dibahas dalam LAKIP, namun masih ada 1 indikator yang tidak mencapai target yakni : Nilai Laporan Keuangan (target 90 namun capaian 87,30) meski demikian masih dianggap on the right track. - Terkait pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai terhadap kinerja yang direncanakan telah dibuat perkin yang didukung Pakta Integritas sampai di

			tingkat individu.
--	--	--	-------------------

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

BSPJI Banjarbaru mempunyai beberapa SOP yang memuat alur terkait pengumpulan data kinerja, data kinerja yang dikumpulkan juga telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, dan setiap unit kerja maupun pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Penilaian Evaluasi atas Pengukuran Kinerja BSPJI Banjarbaru tahun 2021 mendapatkan nilai 24,00 dari total nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
2	Pengukuran Kinerja	24,00	
2.a	Pemenuhan Pengukuran Kinerja	5,40	Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dibunyikan pada alur proses dalam SOP Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, dan Penyusunan Lap PP39. Juga terdapat monev terintegrasi tiap bulan yang di dalamnya mencakup pengumpulan data di google sheet, namun belum dijelaskan mekanismenya dalam SOP monev.
2.b	Kualitas Pengukuran Kinerja	8,10	- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi, dan terdapat upaya lebih atau inovasi yang berupa monev

			terintegrasi dengan google sheet, dan penggunaan aplikasi SIBIRU.
2.c	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	10,50	- Pengukuran kinerja belum berpengaruh pada penyesuaian organisasi, dan penyesuaian strategi. - Telah terdapat penyesuaian aktivitas dan bukti kebijakan internal terkait <i>reward and punishment</i> berupa BAP dan Nota Dinas Kedisiplinan Pegawai serta Penghargaan untuk Pegawai Tahun 2021. - Sedangkan terkait efisiensi atas penggunaan anggaran, belum dijelaskan secara rinci, dalam LAKIP hanya dijelaskan efisiensi anggaran untuk penggunaan sumber daya listrik, air, telepon, dan internet.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

BSPJI Banjarbaru telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala, disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan.

Laporan Kinerja BSPJI Banjarbaru telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk perbandingan realisasi dengan target jangka menengah belum dijelaskan untuk seluruh indikator.

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai serta telah digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja untuk dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya.

Penilaian Evaluasi atas Pelaporan Kinerja BSPJI Banjarbaru tahun 2021 mendapatkan nilai 12,30 dari total nilai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	12,30	
3.a	Pemenuhan Pelaporan	2,40	Laporan Kinerja telah disusun, disampaikan tepat waktu, dipublikasikan, namun belum dilakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja, minimal perlu dilakukan reviu dokumen dari pusat (BSKJI).
3.b	Kualitas Laporan Kinerja	3,15	- Laporan Kinerja telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja, serta realisasi kinerja dibandingkan target kinerja. - Namun Tidak semua indikator ada perbandingan dengan target jangka menengah (5 tahunan renstra), dan untuk indikator baru/indikator yang berubah tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. - Laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait efisiensi sumber daya listrik, air, telepon dan internet dalam mendukung pelaksanaan kinerja.
3.c	Pemanfaatan Laporan Kinerja	6,75	- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai

			kinerja. - Laporan kinerja dinilai telah berpengaruh terhadap perubahan budaya organisasi karena dilihat dari indeks profesionalitas ASN nilainya naik dibandingkan dari tahun sebelumnya serta telah melebihi target di tahun 2021.
--	--	--	---

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP pada seluruh unit kerja secara berjenjang, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti oleh BSPJI Banjarbaru.

Penilaian Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BSPJI Banjarbaru tahun 2021 mendapatkan nilai 22,25 dari total nilai 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	22,25	
4.a	Pemenuhan Evaluasi	5,00	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang.
4.b	Kualitas Evaluasi	6,00	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar oleh SDM yang memadai dan dengan pendalaman yang memadai. Akan tetapi di internal Kemenperin belum terdapat peraturan untuk evaluasi AKIP yang merujuk pada Permenpan RB No. 88 tahun 2021.

4.c	Pemanfaatan Evaluasi	11,25	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, dan telah dijelaskan dalam dokumen matriks tindak lanjut dari rekomendasi APIP hasil LHE SAKIP TA 2020.
-----	----------------------	-------	---

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJ) Banjarbaru TA 2021 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 83,15 atau Memuaskan (A).

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja BSPJI Banjarbaru dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja : 24,60
2. Pengukuran Kinerja : 24,00
3. Pelaporan Kinerja : 12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 22,25

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BSPJI Banjarbaru telah melakukan pengumpulan data kinerja, telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi capaian-capaian kinerja, menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal, serta melakukan upaya dan inovasi yang mendukung akuntabilitas kinerja seperti : penyusunan Pakta Integritas sampai tingkat individu terkait kepedulian pegawai, melakukan monev terintegrasi menggunakan google sheet, serta melakukan pengembangan sistem teknologi informasi SIBIRU.
2. Pedoman teknis terkait perencanaan kinerja di BSPJI Banjarbaru yang berupa SOP belum spesifik terkait dengan dokumen perencanaan kinerja. Terdapat Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, target kinerja yang belum menantang, serta terdapat 1 (satu) target dari indikator kinerja yang tidak tercapai.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja hanya dibunyikan dalam alur SOP penyusunan laporan dan SOP monev, belum ada SOP khusus pengumpulan data. Pengukuran kinerja belum berpengaruh pada penyesuaian organisasi, dan penyesuaian strategi. Dan meskipun telah terdapat implementasi *reward and punishment* dalam mencapai kinerja, namun belum terlihat jelas kebijakannya.

4. Laporan Kinerja telah disusun namun informasi yang disajikan masih kurang memadai terutama perbandingan dengan target kinerja jangka menengah, selain itu belum terdapat bukti reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja.
5. Hasil dari evaluasi SAKIP yang disampaikan dalam LHE TA 2020 telah dijelaskan dalam matriks tindak lanjut atas rekomendasi APIP dan telah dilakukan usaha perbaikan yang dipantau melalui tindak lanjut rencana aksi.

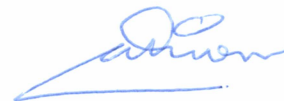
B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi tersebut diatas, dapat kami rekomendasi kepada BSPJI Banjarbaru agar :

1. Mereviu kembali pedoman teknis atau SOP yang sudah ada, dan/atau menetapkan SOP yang terkait perencanaan kinerja (renstra, renja, renkin, perkin) dan SOP khusus pengumpulan data kinerja;
2. Mengevaluasi dan menyusun kembali Indikator Kinerja yang SMART, menetapkan target kinerja yang lebih menantang dan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
3. Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan analisis pengaruh pengukuran kinerja terhadap penyesuaian organisasi, dan strategi, serta dapat menetapkan dokumen kebijakan internal terkait dengan pemberian *reward and punishment*;
4. Menyajikan informasi yang memadai dalam Laporan Kinerja, terutama perbandingan tiap capaian kinerja dengan target jangka menengah, serta melakukan reviu terhadap keseluruhan dokumen Laporan Kinerja yang dapat dilakukan oleh BSKJI atau di dalam internal unit BSPJI Banjarbaru sendiri.

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BSPJI Banjarbaru TA 2021 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inspektur III



Teguh Adhi Arianto

4. Laporan Kinerja telah disusun namun informasi yang disajikan masih kurang memadai terutama perbandingan dengan target kinerja jangka menengah, selain itu belum terdapat bukti reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja.
5. Hasil dari evaluasi SAKIP yang disampaikan dalam LHE TA 2020 telah dijelaskan dalam matriks tindak lanjut atas rekomendasi APIP dan telah dilakukan usaha perbaikan yang dipantau melalui tindak lanjut rencana aksi.

B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi tersebut diatas, dapat kami rekomendasi kepada BSPJI Banjarbaru agar :

1. Mereviu kembali pedoman teknis atau SOP yang sudah ada, dan/atau menetapkan SOP yang terkait perencanaan kinerja (renstra, renja, renkin, perkin) dan SOP khusus pengumpulan data kinerja;
2. Mengevaluasi dan menyusun kembali Indikator Kinerja yang SMART, menetapkan target kinerja yang lebih menantang dan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
3. Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan analisis pengaruh pengukuran kinerja terhadap penyesuaian organisasi, dan strategi, serta dapat menetapkan dokumen kebijakan internal terkait dengan pemberian *reward and punishment*;
4. Menyajikan informasi yang memadai dalam Laporan Kinerja, terutama perbandingan tiap capaian kinerja dengan target jangka menengah, serta melakukan reviu terhadap keseluruhan dokumen Laporan Kinerja yang dapat dilakukan oleh BSKJI atau di dalam internal unit BSPJI Banjarbaru sendiri.

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BSPJI Banjarbaru TA 2021 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inspektur III



Teguh Adhi Arianto

LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Berita Acara Penilaian
3. Surat Tugas

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		24.6		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	BB	4.8	Jika SOP dapat diterima sebagai pedoman teknis maka seluruh kriteria dapat terpenuhi.	1. Renstra 2020-2024 2. Notulen Renstra 2020-2024 3. Renstra 2021-2024 4. Notulen Renstra 2021-2024 5. Renja 2021 6. Renja 2022 7. Renkin 2021 (Awal) 8. Renkin 2021 (Reviu) 9. Perkin 2021 (Awal) 10. Notulen Perkin 2021 (Awal) & Nota Dinas BSKJI 11. Perkin 2021 (Revisi) 12. Notulen Perkin 2021 (Revisi) & Nota Dinas BSKJI 13. KAK Kegiatan ALKI (2021) 14. Satuan 3B 2021 15. Satuan 3B 2022 16. Satu Berkas DIPA Awal 2021 17. Rencana Aksi (Perkin Awal) 2021 18. Rencana Aksi Terintegrasi 2021 19. Notulen Rencana Kerja Terintegrasi 2021
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Ada SOP perencanaan di tingkat satker (SOP Pengusulan Kegiatan Balai, SOP pengusulan Anggaran --> namun belum ada SOP penyusunan renstra, renja, renkin, perkin)	1, 2, 3, 4, 7, 8 (SOP terkait)
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				YA, perencanaan jangka menengah ada di renstra	1, 2, 3, 4
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				YA, perencanaan jangka pendek ada di renja, renkin, perkin (tahunan)	5, 6, 9, 10, 11, 12
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				YA, KAK kegiatan, rencana aksi perkin	13, 17, 18, 19, 20
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				YA, ada sat 3B dan RKA	14, 15, 16
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	B	6.3	Belum seluruh kriteria terpenuhi (80%)	1. Publikasi Dokumen di Website BSPJI Banjarbaru 2. SKP 2021 (Awal) 3. Cascading SKP 2021 (Awal) 4. SKP 2021 (Revisi) 5. Cascading SKP 2021 (Revisi) 6. LHE SAKIP TA 2020 7. Perkin Individu 2021 8. SK 01 TA 2021 (Penempatan Pegawai) 9. Perkin 2021 (Awal) 10. Perkin 2021 (Akhir)
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				YA, Perkin, renstra, renkin, renja, sudah disahkan	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				YA, dokumen2 sudah dipublikasikan di website (perkin 2016 sampai dengan perkin 2022),	1
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				YA, tergambar dalam perjanjian kinerja dan rencana kinerja (revisi Desember 2021)	6, (9, 10)
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				YA, tergambar dengan target dalam perjanjian kinerja yang capaiannya sudah cascading dengan capaian atasan/organisasi	6, (9, 10)
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				TIDAK, belum semua indikator kinerja memenuhi kriteria SMART	6, (9, 10)
6	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				TIDAK, target dan indikator yang ditetapkan memang realistis dan dapat dicapai, serta ada beberapa indikator baru dan berbeda dengan perkin di awal 2021 maupun perkin tahun sebelumnya sehingga bisa dikatakan cukup menantang, namun untuk indikator yang masih sama seperti Indeks Kepuasan Layanan tidak bisa dikatakan menantang karena targetnya tetap. (salah satu target yang dikatakan menantang untuk sasaran terkait 4.0, di tahun 2022 meningkat targetnya jadi 2 perusahaan)	6, (9, 10, Perkin 2020)

7	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	YA, keselarasan dapat dilihat di cascading SKP	2, 3, 4, 5, 7, 8			
8	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	YA, sudah dibuat cascading SKP serta matriks peran dan hasil yang juga menunjukkan tugas antar bidang/seksi	2, 3, 4, 5, 7, 8			
9	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	YA, perkin disusun dan ditetapkan (di TTD kepala satker dan kepala BSKJI)	9, 10			
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	YA, sudah ada SKP dan perkin individu	2, 3, 4, 5, 7, 8			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Seluruh kriteria terpenuhi (terdapat tambahan berupa Perkin dan Pakta Integritas sampai tingkat individu)	1. Matriks Keterkaitan Komponen (Lampiran Renstra) 2. ND Tindak Lanjut Rencana Aksi 2021 3. Notulen Perumusan Kompetensi Balai 4. Notulen Usulan Indikator Baru TA 2021 5. Notulen Revisi Perkin 2021 6. Notulen Renstra 2021-2024 (Reviu) 7. Perjakin Individu TA 2021 8. Capaian Rencana Aksi Per Triwulan 2021 9. Notulen Monev 2021 10. LAKIP TA 2021 11. POK TA 2021 12. Inputan Kegiatan ALKI TA 2021 13. Pakta Integritas Pegawai 14. History Kaji Ulang Dokumen SMM 2021			
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	YA, anggaran di POK sudah dikaitkan dengan indikator kinerja perkin	1, 11			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	YA, aktivitas disajikan dalam rencana aksi	2, 8, 9, 12, 14			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	YA, capaian kinerja tiap indikator perkin dibahas dalam LAKIP hampir semuanya memenuhi target (namun ada 1 indikator yang tidak mencapai target yakni Nilai Laporan Keuangan, target 90 namun capaian 87,30) - masih ditoleransi dianggap <i>on the track</i>	10			
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	YA, pemantauan rencana aksi dilakukan per triwulan	2, 8, 9			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	YA, dilakukan revisi atas perencanaan kinerja (ND rapat usulan indikator)	3, 4, 5, 6			
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	YA, dilakukan revisi atas perencanaan kinerja (ND rapat usulan indikator)	3, 4, 5, 6			
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	YA, sesuai yang diperjanjikan di perkin dan dibuat pakta integritas	7, 13			
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	YA, perkin pejabat sudah dibuat, SKP pegawai sudah dibuat dan pakta integritas tiap pegawai juga dibuat	7, 13			
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24			
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	A	5.4	kriteria terpenuhi (dokumen sudah ada lebih dari 1 tahun)	
1	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Mekanisme pengumpulan data hanya dibunyikan pada SOP Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, dan Penyusunan Lap PP39. Terdapat monev terintegrasi tiap bulan yang di dalamnya mencakup pengumpulan data di google sheet, namun belum dijelaskan mekanismenya dalam SOP monev.			1. Notulen Monev 2021 2. Inputan Kegiatan ALKI 2021 3. Laporan Triwulanan ALKI 2021 4. Realisasi e-monitoring 2021	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	A	8.1	Seluruh kriteria terpenuhi, (konfirmasi apakah ada upaya lebih atau hal berbeda/inovatif -> adanya penggunaan aplikasi SIBIRU)	1. Notulen Monev 2021 2. Inputan Kegiatan ALKI 2021 3. Realisasi e-monitoring 2021 4. Nota Dinas Tindak Lanjut Rencana Aksi 2021 5. Laporan Triwulanan ALKI 2021 6. e-monev Bappenas 7. e-monev SMART DJA 8. e-rekonsiliasi 9. Laporan Audit Internal 10. Laporan Bulanan Zona Integritas 2021 11. Laporan Triwulanan Zona Integritas 2021

1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision)				YA, kepala satker selalu terlibat dalam rapat monev	1
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				YA	1, 2, 3, 5
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang				YA	1, 2, 3, 5
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				YA, bulanan dan triwulanan	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				YA	1, 2, 4, 9, 10
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				YA, selain penggunaan aplikasi monev standar (ada inovasi dijelaskan untuk ZI yakni monev terintegrasi dengan google sheet, dan aplikasi SIBIRU)	2, 3
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi				YA	1, 3, 6, 7, 8
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	B	10.5	Belum seluruh kriteria terpenuhi 77,8% (nilai maksimal B)	1. POK TA 2021 2. Notulen Reviu Renstra 2021-2024 3. Notulen Perumusan Kompetensi Balai 4. Notulen Usulan Indikator TA 2021 5. Notulen Monev 2021 6. DP3 2021 7. Berkas Penyesuaian Tunjin/Gaji 2021 8. Nota Dinas Disiplin Pegawai 2021 9. Notulen Perkin TA 2021 (Revisi) 10. History Kaji Ulang Dokumen SMM 2021 11. Laporan Audit Internal 2021 12. Nota Dinas Tindak Lanjut Rencana Aksi 2021 13. BAP Pegawai 2021 14. Penghargaan Pegawai 2021
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				YA, tunjin telah disesuaikan (ada penyesuaian grading untuk salah 1 pegawai dari grade 6 ke 7) --> apakah bisa dianggap penyesuaian pengukuran kinerja?	7
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				TIDAK, (kondisi saat ini terbalik, refocusing bskji justru mempengaruhi pengukuran kinerja)	2, 3, 4, 9
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				TIDAK, (kondisi saat ini penyesuaian strategi lebih ke pusat/bskji)	2, 3, 4, 9
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				YA, (terdapat bukti kebijakan terkait reward punishment)	2, 3, 4, 9
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				YA	2, 3, 4, 5, 9
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				YA	1
7	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				belum ada penjelasan untuk efisiensi penggunaan anggaran, namun perlu dipertimbangkan di LAKIP terdapat penjelasan terkait efisiensi anggaran untuk penggunaan sumber daya listrik, air, telepon, dan internet. serta terkait adanya revisi POK (yakni ada anggaran yang bisa dimaksimalkan dengan revisi, salah satunya akhir tahun ada revisi pengadaan alat lab dan penambahan anggaran sampling untuk meningkatkan PNPB),	1, (LAKIP)
8	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				YA, dilihat dari selalu ada tindak lanjut atas rencana aksi	6, 8, 10, 11, 12
9	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				YA disampaikan dalam nota dinas hasil rencana aksi (penanggung jawab kegiatan)	6, 12
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		12.3		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	BB	2.4	Seluruh kriteria terpenuhi	1. LAKIP 2021 2. LAPORAN PP39 TA 2021 3. Publikasi Laporan di Website BSPJI Banjarbaru 4. Surat Pengantar LAKIP 2021 5. Nota Dinas LAKIP 2021 6. Surat Pengantar dan Nota Dinas Laporan PP39 7. Peraturan Kepala Balai terkait Renstra 2021-2024 8. SK IKU Renstra 2021-2024
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				YA	1, 2
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				YA, (untuk PP39 triwulanan)	1, 2
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				YA	1, 2, 7, 8
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				YA, (namun minimal perlu ada reviu dari pusat BSKJI)	1, 2
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				YA, (bukti publikasi di website)	3

6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	YA	5, 6
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi	4.50 B 3.15	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	YA, seluruh capaian indikator telah dibahas dalam LAKIP	LAKIP TA 2021
2	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	YA	LAKIP TA 2021
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Sudah ada perbandingan, namun Tidak untuk semua indikator ada perbandingan dengan target jangka menengah (5 tahunan renstra)	LAKIP TA 2021
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	YA, beberapa indikator ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun2 sebelumnya (untuk indikator baru/indikator berubah tidak bisa dibandingkan hanya disebutkan)	LAKIP TA 2021
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	YA	LAKIP TA 2021
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	YA, terdapat penjelasan terkait efisiensi anggaran untuk penggunaan sumber daya listrik, air, telepon, dan internet. (rincian terlampir)	LAKIP TA 2021
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	YA terdapat rekomendasi untuk tiap analisis capaian kinerja	LAKIP TA 2021
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50 A 6.75	Seluruh kriteria terpenuhi, (nilai meningkat karena ada kenaikan nilai indeks profesionalitas ASN)
			1. Laporan Tinjauan Manajemen 2021 2. LAKIP 2021 3. Satuan 3B 2022 4. DIPA TA 2022 5. Notulen Monev 2021 6. Cascading SKP 2021 (Revisi) 7. POK 2021 8. Dokumen Tim Agen Perubahan
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	YA, kehadiran pimpinan dalam rapat2	2
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	YA, (secara real tidak seluruh pegawai, tapi terwakili dengan kehadiran dalam rapat monev)	5, 6
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	YA	1, 5
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	YA	3, 4, 7
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	YA, dibahas dalam rapat monev	1, 5
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	YA, penyesuaian dibahas dalam notulen rapat monev untuk perencanaan tahun berikutnya	1, 3, 4
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	YA, dilihat dari indeks profesionalitas ASN nilainya naik dari tahun sebelumnya serta telah melebihi target,	8
4	EVALUASI AKUNTABILITAS	25.00 22.25	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00 AA 5	Evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP setiap tahun
			1. Notulen Monev 2021 2. Capaian Rencana Aksi Per Triwulan 2021 3. Nota Dinas Tindak Lanjut Renkin 2021 4. Laporan Bulanan Zona Integritas 2021 5. Laporan Triwulan Zona Integritas 2021
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	YA	1, 2, 3, 4, 5
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	YA	1, 2, 3, 4, 5
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50 BB 6	Seluruh kriteria terpenuhi (evaluasi yang dilakukan oleh APIP)
			1. Notulen Monev 2021 2. Capaian Rencana Aksi Per Triwulan 2021 3. Nota Dinas Tindak Lanjut Renkin 2021 4. Laporan Bulanan Zona Integritas 2021 5. Laporan Triwulan Zona Integritas 2021 6. SK Kegiatan TA 2021 7. Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Balai 2021 8. PELATIHAN - SERTIFIKAT PEGAWAI (AKUNTABILITAS) 9. Inputan ALKI TA 2021

1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	YA,	1
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	YA,	6, 7, 8
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	YA	7, 8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	YA	1, 2, 3, 4, 5
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	YA,	9
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50 A 11.25	Seluruh kriteria terpenuhi, (konfirmasi apakah ada upaya lebih atau hal berbeda/inovatif --> apakah integrasi monitoring dan rencana kerja bisa dianggap?) 1. Notulen Monev 2021 2. ND Tindak Lanjut Rencana Aksi 2021 3. Notulen Perumusan Kompetensi Balai 4. Notulen Usulan Indikator Baru TA 2021 5. Notulen Revisi Perkin 2021 6. Notulen Renstra 2021-2024 (Reviu) 7. History Kaji Ulang Dokumen SMM 2021 8. Laporan Audit Internal 9. Cascading SKP 2021 (Revisi)
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	YA, telah dilakukan tindak lanjut rencana aksi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	YA, dari hasil LHE SAKIP TA 2020, sudah terdapat bukti tindak lanjut dari rekomendasi APIP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	YA, ada integrasi monitoring dan rencana kerja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	YA, ada integrasi monitoring dan rencana kerja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	YA, sudah ada perbaikan dari segi dokumen pendukung dan Laporan AKIP,	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Nomor : ~~D 67~~ /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Laporan
Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I
TA 2021

Jakarta, 22 Agustus 2022

Yth.
(daftar terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Penilaian Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja dan Eselon I Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hasil Resume Hasil Penilaian Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja dan Eselon I Tahun 2021.

Kami harapkan hasil penilaian ini dapat menjadi evaluasi bagi Unit Akuntansi di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menjaga kualitas Laporan Keuangan di seluruh jenjang pelaporan sehingga mendukung tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

Kasduni

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021
Nomor : 0857 /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 12 Agustus 2022

DAFTAR PENERIMA

1. Sekretaris Ditjen IA;
2. Sekretaris Ditjen ILMATE;
3. Sekretaris Ditjen IKFT;
4. Sekretaris Ditjen IKMA;
5. Sekretaris Ditjen KPAll;
6. Sekretaris Itjen;
7. Sekretaris BSKJI;
8. Sekretaris BPSDMI
9. Kepala Pusdatin;
10. Kepala Pusat P3DN;
11. Kepala Pusat PIH;
12. Direktur Politeknik STMI Jakarta;
13. Direktur Politeknik APP Jakarta;
14. Direktur Politeknik STTT Bandung;
15. Direktur Politeknik AKA Bogor;
16. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta;
17. Direktur Politeknik ATI Makassar;
18. Direktur Politeknik PTKI Medan;
19. Direktur Politeknik ATI Padang;
20. Direktur Politeknik Industri Logam Morowali;
21. Direktur Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal;
22. Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
23. Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
24. Kepala SMK-SMAK Bogor;
25. Kepala SMK-SMTI Yogyakarta;
26. Kepala SMK-SMTI Makassar;
27. Kepala SMK-SMAK Makassar;
28. Kepala SMK-SMTI Banda Aceh;
29. Kepala SMK-SMTI Padang;
30. Kepala SMK-SMAK Padang;
31. Kepala SMK-SMTI Tanjung Karang;
32. Kepala SMK-SMTI Pontianak;
33. Kepala BDI Jakarta;
34. Kepala BDI Yogyakarta;
35. Kepala BDI Surabaya;
36. Kepala BDI Medan;
37. Kepala BDI Padang;
38. Kepala BDI Makassar;

Lampiran I Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021

Nomor : 857 /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

39. Kepala BDI Denpasar;
40. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
41. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
42. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
43. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
44. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin;
45. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam;
46. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
47. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
48. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik;
49. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
50. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
51. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
52. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh;
53. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan;
54. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang;
55. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
56. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung;
57. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak;
58. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
59. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
60. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado;
61. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon;
62. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta;
63. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
64. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;
65. Koordinator Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Kepala Biro Keuangan



Kasduni

Lampiran II Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021

Nomor : B 87/SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2021 TINGKAT SATUAN KERJA

NO	SATKER	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
1	BARISTAND PALEMBANG	20,00	59,00	3,00	17,00	99,00
2	BARISTAND PONTIANAK	20,00	58,40	3,00	17,00	98,40
3	BBKKP	20,00	58,75	3,00	16,50	98,25
4	BBTPPI	20,00	57,00	3,00	17,00	97,00
5	BARISTAND MANADO	18,00	59,50	3,00	16,00	96,50
6	BDI DENPASAR	20,00	56,25	3,00	17,00	96,25
7	BARISTAND SAMARINDA	20,00	55,50	3,00	17,00	95,50
8	BBKB	20,00	55,50	3,00	17,00	95,50
9	BPPSI PEKANBARU	19,00	56,25	3,00	17,00	95,25
10	BSI	20,00	55,15	3,00	17,00	95,15
11	BBLM	20,00	55,50	3,00	16,50	95,00
12	BBT	20,00	55,00	3,00	17,00	95,00
13	BBIA	20,00	56,90	3,00	15,00	94,90
14	BARISTAND ACEH	20,00	55,50	3,00	16,00	94,50
15	BDI JOGJA	20,00	56,50	3,00	15,00	94,50
16	BARISTAND BANJARBARU	20,00	54,40	3,00	17,00	94,40
17	POLTEK APP	20,00	56,00	3,00	15,00	94,00
18	BARISTAND AMBON	20,00	54,00	3,00	17,00	94,00
19	AKOM SURAKARTA	20,00	55,90	3,00	15,00	93,90
20	BBK	16,00	59,90	3,00	15,00	93,90

Lampiran II Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021

Nomor : 859 /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

NO	SATKER	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
21	BARISTAND SURABAYA	20,00	53,80	3,00	17,00	93,80
22	BARISTAND MEDAN	19,00	54,50	3,00	17,00	93,50
23	PTKI MEDAN	18,00	56,40	3,00	16,00	93,40
24	SMAKBO	20,00	55,25	3,00	15,00	93,25
25	BARISTAND PADANG	19,00	54,00	3,00	17,00	93,00
26	BARISTAND LAMPUNG	18,00	55,75	3,00	16,00	92,75
27	POLTEK ATI MAKASSAR	20,00	52,75	3,00	17,00	92,75
28	B4T	19,00	56,00	3,00	14,00	92,00
29	BBKK	18,00	56,00	3,00	15,00	92,00
30	PPIH	18,00	53,75	3,00	17,00	91,75
31	SMAK PADANG	20,00	52,25	3,00	16,00	91,25
32	BDI SURABAYA	19,00	53,50	3,00	15,00	90,50
33	BBPK	16,00	56,00	3,00	15,00	90,00
34	POLTEK ATI PADANG	20,00	51,90	3,00	15,00	89,90
35	PUSDATIN	20,00	50,40	3,00	16,00	89,40
36	BBHP	19,00	50,40	3,00	17,00	89,40
37	BDI JAKARTA	20,00	48,40	3,00	17,00	88,40
38	SMTI JOGJA	20,00	48,00	3,00	17,00	88,00
39	BPIPI SIDOARJO	20,00	47,65	3,00	17,00	87,65
40	AKA BOGOR	19,00	49,40	3,00	16,00	87,40
41	POLTEK ATK JOGJA	20,00	47,90	3,00	16,00	86,90
42	SMTI LAMPUNG	20,00	47,40	3,00	16,00	86,40
43	SMTI PONTIANAK	20,00	45,00	3,00	17,00	85,00
44	SMTI PADANG	20,00	44,40	3,00	16,50	83,90
45	BDI PADANG	20,00	47,90	3,00	13,00	83,90
46	AKOM BANTAENG	20,00	45,00	3,00	15,00	83,00
47	POLTEK STMI	16,00	50,05	3,00	13,00	82,05

Lampiran II Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021

Nomor : 881/SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

NO	SATKER	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
48	BDI MAKASSAR	20,00	40,65	3,00	17,00	80,65
49	SMTI MAKASSAR	20,00	41,90	3,00	15,00	79,90
50	POLTEK KENDAL	20,00	41,25	3,00	15,00	79,25
51	P3DN	19,00	40,00	3,00	17,00	79,00
52	POLTEK MOROWALI	20,00	38,15	3,00	16,50	77,65
53	SMAK MAKASSAR	20,00	41,55	3,00	12,00	76,55
54	STTT BANDUNG	16,00	42,15	3,00	12,50	73,65
55	SMTI ACEH	20,00	34,90	3,00	14,00	71,90
56	BDI MEDAN	19,00	30,90	3,00	15,00	67,90

Kepala Biro Keuangan


Kasduni

Lampiran III Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021

Nomor : 851 /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2021 TINGKAT UNIT ESELON I

NO	ESELON I	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
1	IKMA	11,00	61,80	2,00	19,50	94,30
2	BSKJI	14,00	60,40	2,00	17,50	93,90
3	ITJEN	13,00	61,15	2,00	16,50	92,65
4	SETJEN	10,00	63,00	2,00	17,50	92,50
5	ILMATE	14,00	62,50	2,00	14,00	92,50
6	KPAII	15,00	57,50	2,00	17,50	92,00
7	IKFT	15,00	55,15	2,00	16,50	88,65
8	AGRO	14,00	53,50	2,00	15,50	85,00
9	BPSDMI	12,00	50,15	2,00	15,00	79,15

Kepala Biro Keuangan



Kasduni